

**EVALUASI KINERJA FORUM BINA LINGKUNGAN (BILIK)
DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR SUNGAI
DI KECAMATAN CIKARANG BARAT
KABUPATEN BEKASI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota

Oleh :

**EKO SUPARYADI
L4D 006 016**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**EVALUASI KINERJA FORUM BINA LINGKUNGAN (BILIK)
DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR SUNGAI
DI KECAMATAN CIKARANG BARAT
KABUPATEN BEKASI**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

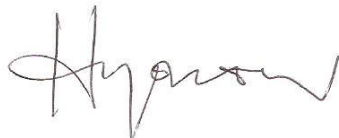
**EKO SUPARYADI
L4D 006 016**

Diajukan pada Sidang Tesis
Tanggal 07 Mei 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 07 Mei 2008

Pembimbing Pendamping



Ir. Hadi Wahyono, MA

Pembimbing Utama



Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 07 Mei 2008

EKO SUPARYADI

NIM L4D 006 016

ABSTRAK

Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai manifestasi partisipasi stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi pengawasan dan pengendalian pencemaran air dalam pengelolaan sungai. Masyarakat memiliki fungsi kontrol dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan partisipasi. Forum Bilik dibentuk di sekitar sub daerah aliran sungai dengan keanggotaan terdiri dari masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan) dan pengusaha/ industriawan. Dengan terbentuknya Forum Bilik diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai.

Melalui penelitian studi kasus terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup akan dikaji kinerja forum bina lingkungan (bilik) dalam pengawasan pencemaran air sungai. Fokus penelitian yaitu mendeskripsikan realita yang terjadi di wilayah studi atas kinerja forum bilik dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan diskusi kelompok kecil.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Forum Bilik tersebut belum efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja forum bilik, yaitu faktor *stakeholder* internal (masyarakat dan industri) dan *stakeholder* eksternal (pemerintah daerah). Faktor *stakeholder* eksternal (peran pemerintah daerah) terlihat dari proses perencanaan dalam pembentukan forum bilik, dimana masyarakat dan industri tidak terlibat dalam setiap tahapan (proses) perencanaan. Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pembentukan forum bilik hanya berorientasi proyek yang merupakan perwujudan dari perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*). Hal ini berdampak terhadap dukungan/program dari pemerintah terhadap forum bilik, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, pembiayaan/stimulan dan pendampingan/fasilitator, termasuk juga sosialisasi serta pembinaan yang tidak berjalan.

Adapun faktor *stakeholder* internal antara lain: persepsi dan partisipasi masyarakat dan industri serta kelembagaan forum bilik. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan secara partisipatif, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai masih kurang. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber data, yaitu bahwa pengelolaan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah. Persepsi perusahaan/industri tentang partisipasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai baru sebatas pemenuhan kewajiban terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga inisiatif pihak perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang.

Dari hasil penelitian direkomendasikan untuk menyusun kembali (restrukturisasi) kelembagaan forum bilik dengan konsep perencanaan partisipatif (perencanaan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat), sehingga memberikan peluang dan jaminan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan program pendampingan (fasilitasi) dan pemberian stimulan kepada forum bilik agar kinerja forum bilik menjadi efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan pencemaran sungai akibat limbah industri dapat diminimalkan dan pada akhirnya ekosistem sungai dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kata kunci: kinerja, forum bilik, pengawasan, pencemaran sungai.

ABSTRACT

Forum Bilik as the manifestation of stakeholder participation in environmental management is one of management and control action strategy of waste water in river management. Society has control function in environmental management that can be realized by controlling the industrialist performance. Forum Bilik is formed around river basin (Sub DAS) with membership consist of form society (society figure, environmental activity) and industrialist. The forming of Forum Bilik is expected to help government in environment management, especially in management and control action of waste water.

Through case study research of society participation in environment management, Forum Bina Lingkungan (Bilik) will be studied in observation of water river contamination. Research will be focused on describing reality that happened in study region for the problem of Forum Bilik performance in observation and control action of water contamination. Data collecting in this research was conducted by direct observation, interview and small group discussion.

From the research result, it is found that Forum Bilik activity in study region experiences emptiness, so it can be concluded that performance of Forum Bilik referred as uneffective and unefficient. Factors influencing performance of Forum Bilik is internal stakeholder factor (society and industry) and external stakeholder factor (local government). External stakeholder factor (local government role) is seen in the planning process of Forum Bilik forming where society and industry keep off in every parts of planning process. On the other hand, research result also shows that forming of Forum Bilik is just oriented as the consequence of top down planning. This condition affects government's support to Forum Bilik such as availability of basic facilities, defrayal/stimulant, facilitating and also included socialization and construction which are done unwell.

Internal stakeholder factor are perception and participation of society, industry and institute of Forum Bilik. Society perception of partisipative development, especially in observation and control action of water contamination still less. This condition is in according with information gotten from data source which tells that river management becomes government responsibility. Whereas company/industry perception about participation in observation and control action of water contamination is limited in obligation accomplishment based on applied regulation and law, so company initiative to participate in environment management still less.

From the result of research, it is recommended to rearrange (restructured) institute of Forum Bilik into the participative planning concept (development program planning that lay on real need of society), so that it gives opportunity and guarantee of society participation in decision making. On the other hand, facilitating program and stimulant giving are also needed in order to make Forum Bilik performance become effective and efficient. With all of this, hopefully, river contamination caused by industrial diposal can be minimized and finally river ecosystem can be functioned properly.

Keyword: *performance, forum bilik, management and control, waste water.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk “menimba setetes” ilmu-Nya serta atas limpahan hidayah dan kemurahan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Perkenalkan penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D** dan **Ir. Hadi Wahyono, MA** selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas segala diskusi, masukan, kritik serta bimbingannya kepada penulis. Tak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA** dan Ibu **Ir. Artiningsih, MT** sebagai dosen pembahas yang telah memberikan masukan, kritik dan koreksi sebagai bahan kesempurnaan penelitian ini.

Selanjutnya terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
2. Kepala Pusbindiklatren Bappenas dan seluruh staf yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk tugas belajar melalui beasiswa pendidikan.
3. Bupati Bekasi yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengikuti tugas belajar ini.
4. Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Kabupaten Bekasi beserta seluruh staf atas kesempatan, dukungan dan fasilitas yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas belajar ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen pengampu yang tak bosan-bosannya untuk membagi ilmunya kepada penulis, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat serta amal jariyah di akherat kelak.
6. Rekan-rekan senasib seperjuangan MTPWK – Kelas Bappenas 3, semoga hubungan baik selama ini tetap berkelanjutan serta berbagai pihak yang tidak bisa

kami sebutkan satu demi satu, yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

7. Istriku tercinta *Lia Yuliana, S.Si*, segenap orang tuaku yang telah memberikan dukungan moral dan material, dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih pada seluruh staf pengelola MTPWK UNDIP.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan memberikan sumbangan khasanah dan wawasan bagi segenap pembaca. Amien....

Semarang, Mei 2008

Eko Suparyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Studi	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Sasaran	8
1.3.3 Manfaat Studi	9
1.4 Ruang Lingkup	9
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	9
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Keaslian Penelitian	15
1.7 Metodologi Penelitian	18
1.7.1 Metode Penelitian	18
1.7.2 Tahapan Penelitian	19
1.7.3 Kebutuhan Data	21
1.7.4 Situasi Sosial	23
1.7.5 Teknik Pengambilan Sampel	24
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data	25
1.7.7 Teknik Penyajian Data	26
1.7.8 Teknik Analisis Data	28
1.8 Sistematika Pembahasan	32

BAB II KAJIAN LITERATUR PARTISIPASI MASYARAKAT	
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN	33
2.1 Evaluasi Kinerja Organisasi	33
2.1.1 Organisasi	33
2.1.2 Evaluasi Kinerja	36

2.2	Pengelolaan Lingkungan	38
2.3	Pembangunan Partisipatif	42
2.3.1	Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	45
2.3.2	Manfaat Partisipasi Masyarakat	50
2.3.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Partisipasi.....	54
2.3.4	Hambatan dalam Menerapkan Partisipasi	56
2.3.5	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	58
2.4	Pembelajaran Sosial dan Perencanaan Transaktif	59
2.5	Rangkuman Kajian Teori	60
BAB III	KAJIAN UMUM WILAYAH STUDI	66
3.1	Kajian Umum Kabupaten Bekasi	66
3.1.1.	Kependudukan	68
3.1.2.	Ketenagakerjaan	69
3.1.3.	Kegiatan Industri	70
3.1.4.	Kondisi Fisik dan Lingkungan Kabupaten Bekasi	73
3.1.5.	Isu-Isu Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bekasi	76
3.2	Kajian Umum Kecamatan Cikarang Barat	81
3.2.1	Pembentukan Forum Bina Lingkungan (BILIK)	82
3.2.2	Kelembagaan Forum BILIK	88
BAB IV	ANALISIS KINERJA FORUM BINA LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KHUSUSNYA PENGAWASAN PENCEMARAN AIR SUNGAI	90
4.1	Analisis Kondisi Fisik Lingkungan dan Kondisi Sosial Lokasi Penelitian	91
4.1.1	Kondisi Fisik dan Lingkungan Sub DAS Sadang dan Cikedokan	91
4.1.2	Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Cikarang Barat ...	95
4.1.3	Sintesis Analisis Kondisi Fisik Lingkungan dan Kondisi Sosial Lokasi Penelitian	99
4.2	Analisis Pembentukan Forum Bina Lingkungan (Bilik)	101
4.2.1	Latar Belakang Munculnya Forum Bilik	101
4.2.2	Proses Pembentukan Forum Bilik dalam Kerangka Perencanaan	104
4.3	Analisis Peran Stakeholder Nonpemerintah dalam Mendukung Forum Bilik	108
4.3.1	Peran Masyarakat dalam Mendukung Forum Bilik dan Pengelolaan Sungai	108
4.3.2	Peran Industri dalam Mendukung Forum Bilik dan Pengelolaan Sungai	113
4.4	Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Forum Bilik	116
4.5	Analisis Kegiatan Forum Bilik	119

4.6	Analisis Kinerja Forum Bilik	125
4.7	Analisis Komprehensif	132
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	140
5.1	Kesimpulan	140
5.2	Rekomendasi	147
DAFTAR PUSTAKA		150
LAMPIRAN		154

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Forum Bina Lingkungan dan Sub DAS di Wilayah Kabupaten Bekasi	6
TABEL I.2	: Keaslian Penelitian	17
TABEL I.3	: Kebutuhan Data dalam Penelitian	22
TABEL II.1	: Tabel Rangkuman Kajian Teori	65
TABEL II.2	: Pertanyaan Panduan Wawancara dalam Penelitian Kinerja Forum Bilik	64
TABEL III.1	: Kepadatan dan Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Menurut Kecamatan	69
TABEL III.2	: Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Bekasi Menurut Kelompok Industri	71
TABEL III.3	: Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi sampai dengan Tahun 2002	71
TABEL III.4	: Hasil Analisis Kualitas Air Sungai Sadang dan Cikedokan Tahun 2006	84
TABEL IV.1	: Jumlah Penduduk Kecamatan Cikarang Barat	95

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 : Peta Administrasi Kabupaten Bekasi	11
GAMBAR 1.2 : Peta Administrasi Kecamatan Cikarang Barat	12
GAMBAR 1.3 : Peta Lokasi Penelitian	13
GAMBAR 1.4 : Kerangka Pemikiran Penelitian	16
GAMBAR 1.5 : Situasi Sosial	23
GAMBAR 1.6 : Analisis Data Kualitatif Model Interaktif	29
GAMBAR 1.7 : Kerangka Analisis	31
GAMBAR 2.1 : Tingkat Partisipasi Menurut Arstein	50
GAMBAR 3.1 : Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Bekasi	67
GAMBAR 3.2 : Peta Lokasi Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi.....	72
GAMBAR 3.3 : Peta Lokasi Kawasan Industri di Kecamatan Cikarang Barat .	83
GAMBAR 3.4 : Hasil Pengukuran BOD dan COD pada Sungai Sadang dan Cikedokan	85
GAMBAR 3.5 : Struktur Organisasi Forum Bilik	89
GAMBAR 4.1 : Kondisi air Sungai Cikedokan dibelakang PT. Coca-Cola	94
GAMBAR 4.2 : Kondisi air Sungai Sadang di Desa Talajung	94
GAMBAR 4.3 : Keterkaitan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan..	100
GAMBAR 4.4 : Sampah pada Badan Sungai Sadang dan Cikedokan	110
GAMBAR 4.5 : Penyuluhan terhadap Masyarakat dan Industri di Sekitar Sungai Sadang dan Cikedokan	118
GAMBAR 4.6 : Keterlibatan Masyarakat dalam Prokasih Sungai Sadang	118
GAMBAR 4.7 : Kegiatan Forum Bilik Sadang Hulu Tahun 2005	121
GAMBAR 4.8 : Hasil Analisis Parameter BOD dan COD Sungai Sadang dan Cikedokan Tahun 2002-2007.....	130
GAMBAR 4.9 : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Forum Bilik	139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep dan batasan tentang pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Brundtland (1987) dalam Budihardjo (1999) menyebutkan bahwa "pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka". Dalam usaha untuk mengubah keseimbangan lingkungan yang ada pada mutu lingkungan yang lebih tinggi, diusahakan agar lingkungan tetap dapat mendukung mutu hidup yang lebih tinggi itu. Dengan demikian perlu pelestarian daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berlanjut pertumbuhan dan perkembangan yang diusahakan dalam pembangunan (Soemarwoto, 1999).

Dalam konsep selanjutnya pembangunan berkelanjutan merupakan interaksi antara tiga sistem, yaitu sistem ekologis dan sumberdaya alam, sistem ekonomi dan sistem sosial. Menurut Jacobs dkk (1986) dalam Hadi (2005: 43-48), terdapat empat prinsip untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- 1) Prinsip pemenuhan kebutuhan dasar (*fulfilment of human needs*), dalam kaitan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan materi (termasuk di dalamnya sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan nonmateri (rasa aman, hak asasi manusia, kesempatan berkumpul dan mengemukakan pendapat).
- 2) Pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*), berkaitan

dengan pemeliharaan lingkungan, yaitu prinsip perlindungan lingkungan (konservasi). Lingkungan baik sebagai sumber daya maupun sebagai ruang yang harus dilindungi karena keterbatasan daya dukung. Setiap yang dilakukan haruslah diatur agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sebagai ruang. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan manusia.

- 3) Keadilan sosial (*social equity*), dalam kaitan dengan keadilan sosial meliputi keadilan masa kini dan keadilan masa depan. Prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam pembangunan, termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat. Adapun keadilan masa depan yaitu perlunya solidaritas antargenerasi. Hal ini karena adanya keterbatasan sumber daya alam, sehingga harus diatur penggunaannya agar berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.
- 4) Kesempatan untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*). Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Prinsip partisipatori demokrasi adalah keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan yang menyangkut nasib mereka, maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses, sehingga akan menumbuhkan rasa memiliki serta akan merasakan manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

Paradigma pembangunan dewasa ini telah bergeser ke arah pembangunan

masyarakat dengan strategi pemberdayaan dan partisipasi. Konsep pembangunan yang menempatkan pembangunan pada kepentingan manusia tidak lagi hanya sebagai alat dalam proses pembangunan itu sendiri (*man – centered development concept*), sehingga hasil pembangunan itu akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Yudohusodo, 1991).

Munculnya paradigma pembangunan partisipatif mengindikasikan adanya dua perspektif, pertama yaitu pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program/proyek, sehingga akan mewarnai kehidupan mereka yang pada akhirnya akan dapat dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Kedua, akan diperoleh umpan balik (*feedback*) yang pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan itu sendiri (Jamieson, 1989 dalam Mikkelsen 2003: 63).

Dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat, Soetrisno (1995) mengemukakan pendapat bahwa partisipasi dapat diartikan bahwa adanya kerjasama antara rakyat/masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri. Dengan pandangan yang lebih luas, ada beberapa manfaat dari partisipasi masyarakat antara lain: terjadinya proses pembelajaran, mengeliminasi perasaan terasing, menjadikan masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab, menimbulkan dukungan dan penerimaan suatu program dari pemerintah, serta menciptakan kesadaran berpolitik dalam masyarakat, dimana hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan

masyarakat sebenarnya.

Dari tipologi yang diajukan oleh Arstein (1969) dalam Panudju (1999: 69 – 76) secara ringkas dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) Tidak ada partisipasi sama sekali atau *nonparticipation*, yang meliputi *manipulation* dan *therapy*.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism*, yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power*, meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen power*.

Demikian juga dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap orang/anggota masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta/partisipasi dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- Memberikan saran pendapat dan menyampaikan informasi.

Wadah dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi-organisasi pecinta lingkungan maupun organisasi informal lainnya. Di Kabupaten Bekasi media peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengawasan pencemaran air sungai disebut dengan Forum Bina Lingkungan (Bilik), yang dibentuk di sekitar wilayah daerah pengaliran sungai (Sub DAS) dengan keanggotaan terdiri dari masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan); pengusaha/industriawan dan LSM.

Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 telah memfasilitasi terbentuknya sembilan Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik). Forum Bina Lingkungan tersebut sebagaimana tersebut pada Tabel I.1.

Kecamatan Cikarang Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi yang dilewati dua sungai yaitu, Sungai Cikedokan dan Sadang. Di Wilayah Kecamatan Cikarang Barat terdapat lokasi kegiatan industri besar, sedang dan kecil, baik di dalam kawasan industri maupun zona industri. Kawasan industri antara lain KI. MM 2100, KI. Bekasi Fajar, KI. Zipper Indonesia dan KI. Gobel Dharma Nusantara. Selain kawasan industri, pada zona industri juga terdapat industri besar antara lain: industri farmasi, makanan dan minuman, industri kimia, percetakan, tekstil, *laundry*, manufaktur, karoseri serta pergudangan. Sungai Cikedokan dan Sungai Sadang di bagian hulu berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian dan perikanan, sedangkan pada bagian tengah sungai tersebut difungsikan sebagai saluran pembuang limbah industri, baik yang berlokasi di kawasan maupun di zona industri menuju Sungai (kanal) Cikarang Bekasi Laut (CBL).

TABEL I.1
FORUM BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN BEKASI

No.	Sub DAS	Nama Forum Bilik	Wil. Administrasi	Tahun Dibentuk
1.	Sub DAS Cikedokan	Cikedokan	Kec. Cikarang Barat	2003
2.	Sub DAS Sadang Hulu	Sadang Hulu	Kec. Cikarang Barat	2003
3.	Sub DAS Sadang Hilir	Sadang Hilir	Kec. Cikarang Barat dan Cibitung	2003
4.	Sub DAS Jambe Hulu	Jambe Hulu	Kec. Tambun Selatan	2004
5.	Sub DAS Jambe Hilir	Jambe Hilir	Kec. Tambun Utara	2004
6.	Sub DAS Sasakjarang Hulu	Sasakjarang Hulu	Kec. Tambun Selatan	2005
7.	Sub DAS Sasakjarang Hilir	Sasakjarang Hilir	Kec. Tambun Utara	2005
8.	Sub DAS Cilemahabang Hulu	Cilemahabang Hulu	Kec. Cikarang Selatan dan Cikarang Utara	2005
9.	Sub DAS Cilemahabang Hilir	Cilemahabang Hilir	Kec. Cikarang Timur dan Karang Bahagia	2005

Sumber : Dinas PDL.P Kabupaten Bekasi, 2005

1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi, baik pembangunan di sektor industri maupun di sektor lainnya yang begitu pesat, dimana perkembangan tersebut memberikan dampak negatif menurunnya kualitas lingkungan hidup. Salah satu ekosistem yang sangat penting dan banyak terdapat di Wilayah Kabupaten Bekasi, yaitu sungai berikut Sub Daerah Aliran Sungai (DAS). Sub DAS - sub DAS ini diharapkan dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga keberadaan sub DAS tersebut perlu dipelihara dan dijaga kelestariannya.

Menyadari semakin tingginya tingkat pencemaran dan menurunnya kualitas air pada sub DAS – sub DAS di Wilayah Kabupaten Bekasi, maka pemanfaatan dan pemeliharaan sub DAS oleh masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya, baik secara hak, kewajiban dan tanggung jawab harus dilakukan secara bersama, seimbang dan berkesinambungan. Peran pemerintah dalam pengelolaan sub DAS

adalah sebagai fasilitator, pengarah dan pembina bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah aliran sungai (sub DAS).

Dengan adanya pergeseran kebijakan pembangunan pada upaya peningkatan sumber daya manusia, dimana pola pendekatan pembangunan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pelaku utama di dalam setiap pembangunan, yang semestinya juga dapat diterapkan untuk berperan serta dalam proses pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan terutama pencemaran air pada sub DAS - sub DAS yang ada di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks, sehingga tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja melainkan menuntut keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah baik masyarakat pelaku usaha, masyarakat luas maupun lembaga swadaya masyarakat. Keberadaan Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai media peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang telah terbentuk sejak tahun 2003 diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Organisasi adalah himpunan orang-orang yang berinteraksi untuk melakukan tugas dan pekerjaan tertentu dengan dukungan sumber-sumber daya serta berhadapan dengan kendala-kendala dari lingkungan maupun luar lingkungan guna mencapai tujuan bersama. Demikian juga dengan Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai organisasi informal yang tentunya memiliki unsur tujuan, sumber daya, kendala dan lingkungan (internal maupun eksternal) organisasi.

Kinerja organisasi (dalam hal ini Forum Bilik) merupakan suatu gambaran hasil atau prestasi dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain bahwa untuk

mengetahui keberhasilan atau prestasi suatu organisasi maka perlu dikaji kinerja dari organisasi tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dari uraian tersebut ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk dicari jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah: Bagaimanakah kinerja Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) dalam pengelolaan lingkungan hidup? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja Forum Bilik tersebut?

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja dari Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai media peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya, pengawasan pencemaran air sungai dan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Forum Bilik dalam pengawasan pencemaran air sungai di Kabupaten Bekasi.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang akan capai adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji pengaruh keberadaan industri terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.
- b. Mengkaji proses pembentukan Forum Bilik
- c. Mengkaji persepsi, perilaku dan partisipasi *stakeholder* dalam mendukung forum bilik dan pengelolaan lingkungan hidup.

- d. Mengkaji peran pemerintah dalam mendukung Forum Bilik.
- e. Mengkaji kinerja Forum Bilik dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai.
- f. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Forum Bilik.

1.3.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui pengetahuan dan keinginan *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dijadikan masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan berbasis masyarakat.
- b. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hidup.
- c. Memberikan masukan dalam perencanaan pengembangan wilayah/kota yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- d. Masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi yang menjadi batasan di dalam kajian pada penelitian ini.

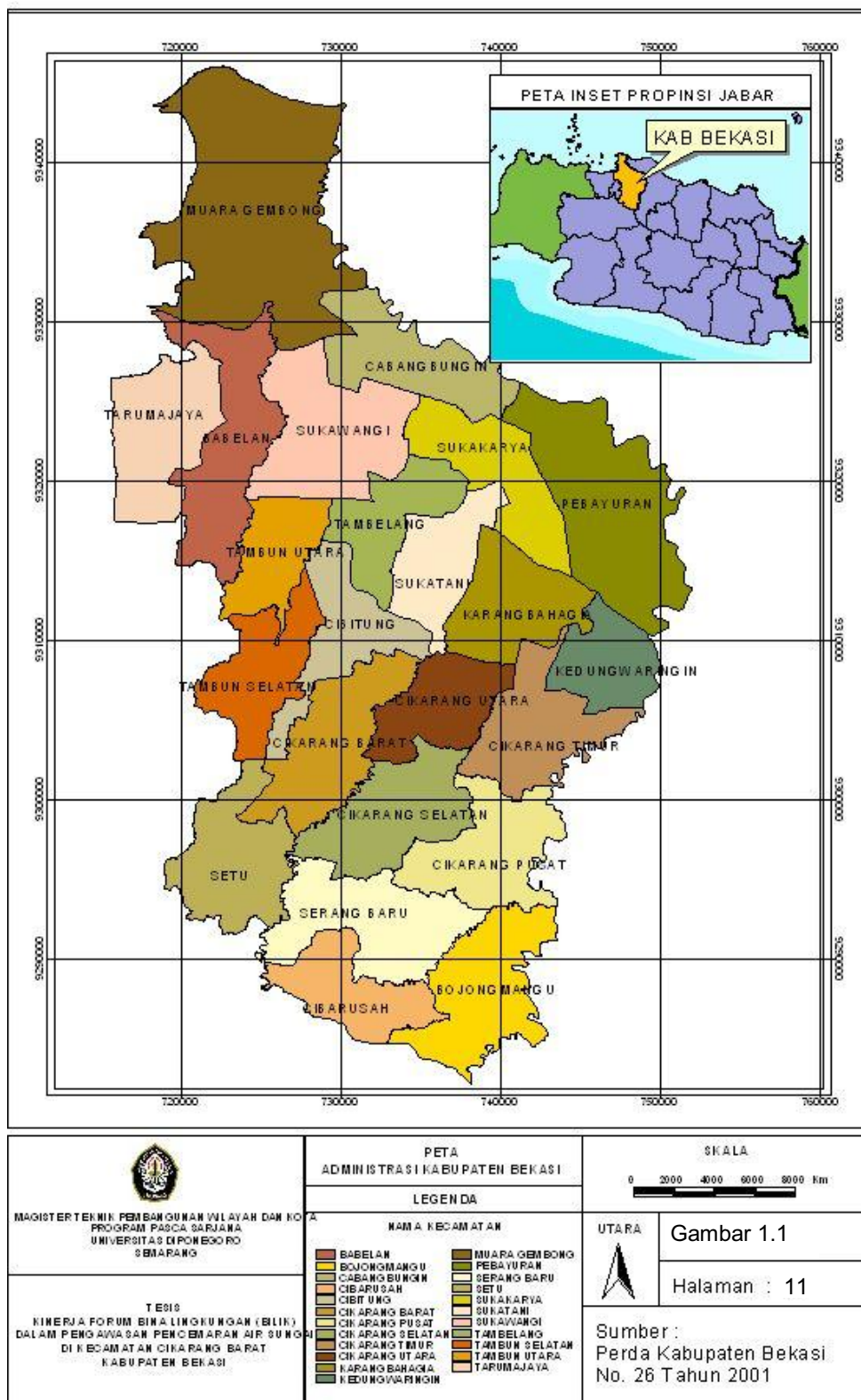
1.4.1 Ruang Lingkup Materi

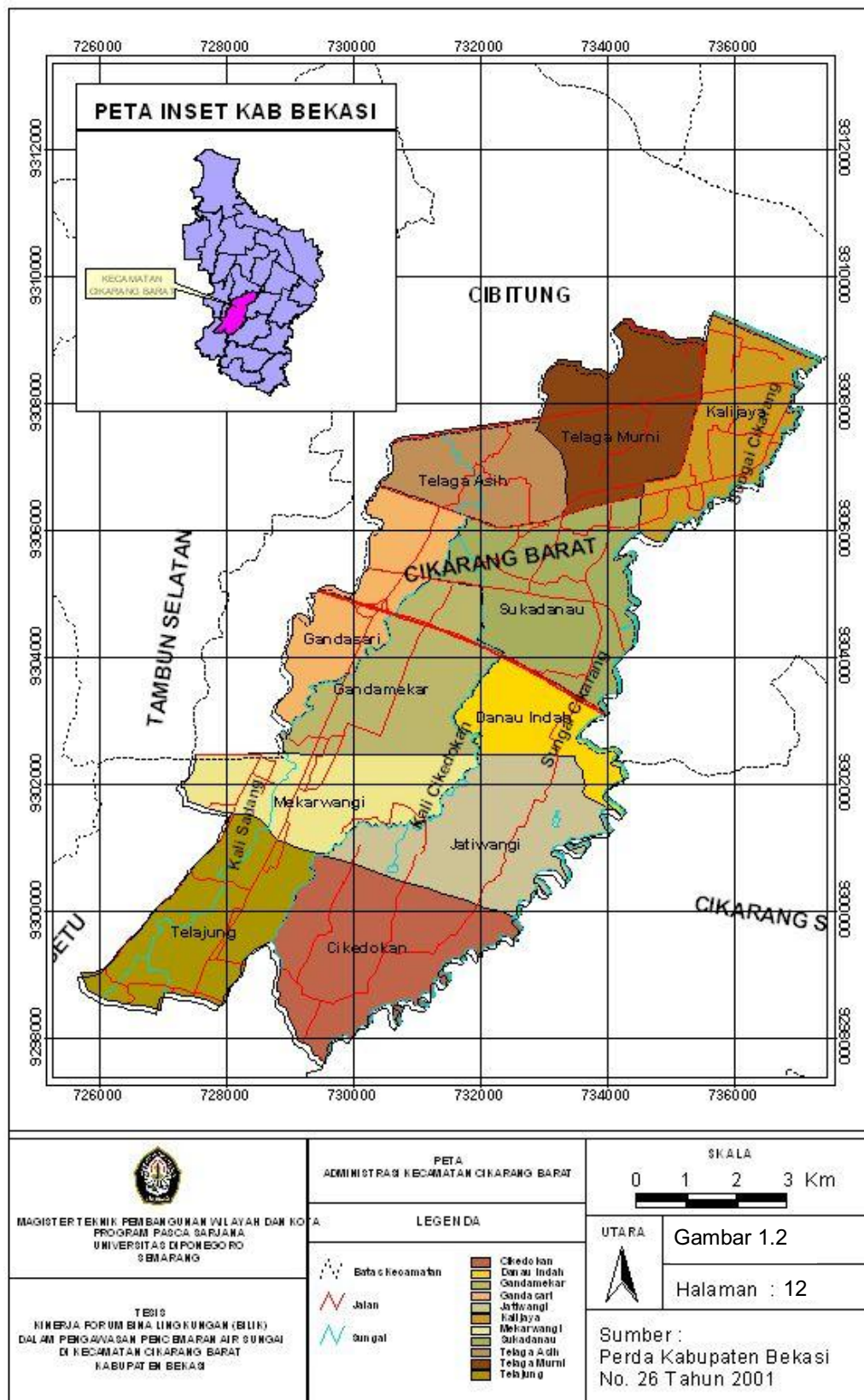
Untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan sebagai berikut:

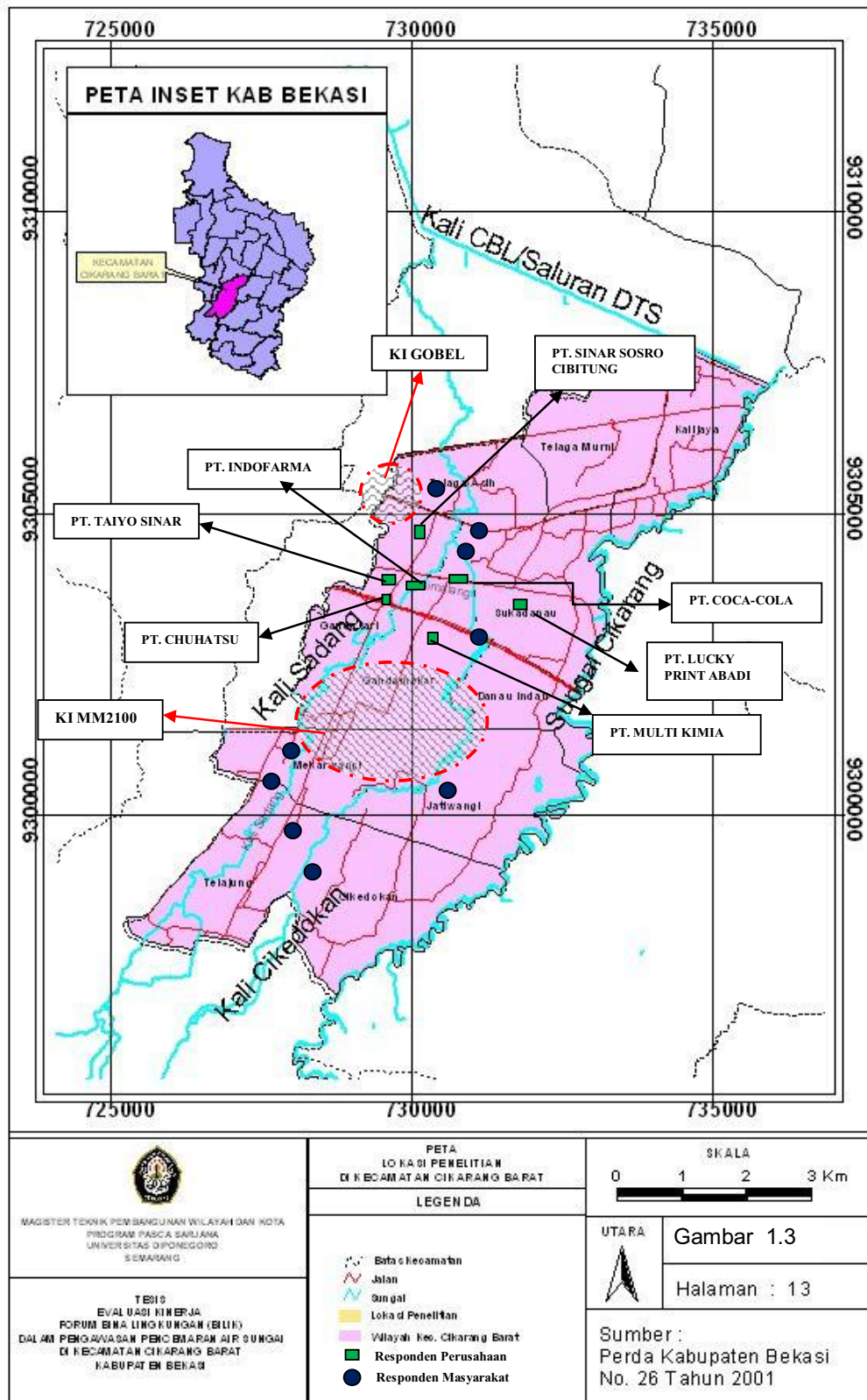
1. Permasalahan dibatasi pada proses pembentukan dan kinerja dari Forum Bilik sebagai media peran serta masyarakat dalam pengawasan pencemaran khususnya pencemaran air sungai, baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan merupakan pelibatan tertinggi dari masyarakat, dengan perencanaan masyarakat dapat menentukan tujuan, maupun merumuskan program termasuk biaya dan sumber biaya. Tahap pelaksanaan, bertitik pangkal pada sejauhmana masyarakat dan *stakeholder* secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas riil dari program atau kegiatan yang telah digariskan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Forum Bina Lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai, baik faktor dari dalam, yaitu kemampuan masyarakat (masyarakat umum dan industri/pengusaha) dan kesediaan mereka untuk berperan aktif maupun faktor dari luar masyarakat, yaitu peran pemerintah (kebijakan) dan lembaga formal lainnya.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah studi penelitian ini meliputi Forum Bilik Sadang Hulu dan Sadang Hilir pada sub DAS Sadang dan Forum Bilik Cikedokan pada sub DAS Cikedokan yang berada di wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Pemilihan ini dengan pertimbangan bahwa kedua sungai tersebut melewati beberapa kawasan industri dan zona-zona industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 sampai dengan Gambar 1.3







1.5 Kerangka Pemikiran

Berkembangnya industri di Wilayah Kabupaten Bekasi berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan, terutama lingkungan perairan sungai (Sub-DAS) dimana sungai yang sebelumnya berfungsi untuk pengairan/pertanian berubah menjadi saluran pembuang limbah. Sungai sebagai saluran pembuang limbah sebagai industri apabila tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dan diimbangi dengan pengendaliannya secara nyata tentu akan berakibat degradasi kualitas air sungai.

Dengan terjadinya degradasi kualitas air sungai, perlu dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan, pelestarian dan konservasi terhadap air sungai. Pengawasan dan pengendalian merupakan instrumen pencegahan dan pelestarian lingkungan terutama sumber daya air (sungai). Dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran air sungai, pemerintah mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Disamping itu dalam pengawasan diperlukan kerjasama antarsemua *stakeholder*, baik masyarakat, pengusaha/industriawan maupun pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai media peran serta masyarakat dalam pengawasan pencemaran air sungai. Dalam hal ini peran serta masyarakat menentukan keberhasilan dalam pengawasan pencemaran air sungai. Dalam pelaksanaannya Forum Bilik yang telah terbentuk belum berfungsi secara optimal. Hal ini menandakan masih rendahnya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengawasan pencemaran air sungai.

Beranjak dari hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai media peran serta

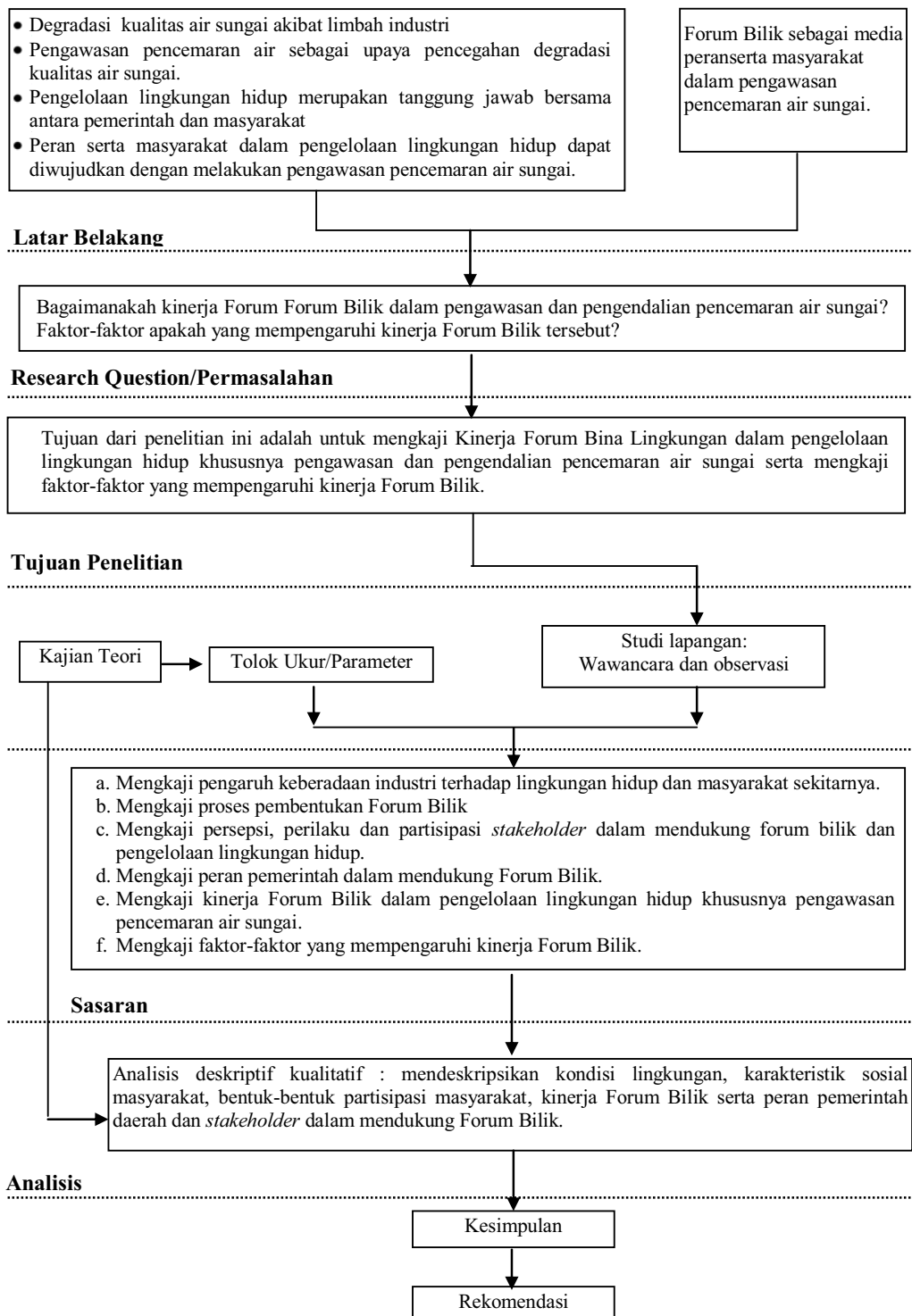
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai, dengan sarannya antara lain untuk mengkaji bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam pengawasan pencemaran air sungai, mengkaji kelembagaan Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik), serta mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung Forum Bilik.

Beberapa teori yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kinerja organisasi dan teori pengelolaan lingkungan hidup diperlukan untuk mendukung keberhasilan penelitian ini. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Adapun kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 1.4.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini diilhami dari beberapa penelitian-penelitian tentang peran serta/partisipasi masyarakat berkaitan dengan permasalahan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut seperti terangkum dalam Tabel I.2.

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: peneliti, 2007

GAMBAR 1.4.
KERANGKA PEMIKIRAN

TABEL I.2.
POSISI DAN KEASLIAN PENELITIAN

No.	Peneliti	Judul dan Tahun penelitian	Lokasi penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rina Yulianti	Efektivitas metode peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan limbah perkotaan di Perumahan Mojosongo Surakarta, 2000	Perumahan Mojosongo Surakarta	Kuantitatif, deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sudah terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan dan operasi. • Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan limbah perkotaan kurang efektif.
2.	Budi Haryanto	Studi efektivitas partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) dalam upaya pengelolaan lingkungan di Kelurahan Sukajaya Palembang, 2003	Kelurahan Sukajaya Palembang	Kualitatif, deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sudah terlibat sejak perencanaan dan pelaksanaan program • Peran serta masyarakat dalam pembangunan IPLT kurang efektif.
3.	Didik Ari Suryanto	Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan prasarana perkotaan (studi kasus: Pembangunan Pengolah Limbah Cair di Kelurahan Mergosono Kota Malang), 2003	Kelurahan Mergosono Kota Malang	Kuantitatif, deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dimulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi dan pascakonstruksi
4.	Mulyanto	Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran di DAS Babon (studi kasus di Kelurahan Sendang Mulyo Kec. Tembalang, Kota Semarang, 2003	Kel. Sendang Mulyo Kota Semarang	Kualitatif, deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran di Kel. Sendang Mulyo cukup baik. • Masyarakat Sendang Mulyo terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
5.	I Made Donny Harthayasa	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Sungai Badung sebagai Obyek Wisata Air "City Tour" di Kota Denpasar.	Kota Semarang	Kuantitatif, Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perbedaan tingkat partisipasi yang berdasarkan desa dengan tingkat partisipasi berdasarkan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dibutuhkan program-program yang nyata dari Pemkot Denpasar dalam perencanaan Sungai Badung sebagai obyek wisata air "city tour".
6.	Cok Istri Mirahyani	Partisipasi Para Pihak dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Pemogan (Studi Kasus Industri Pencelupan dan Pencapan di Kota Denpasar, Bali)	Denpasar, Bali		

Sumber : Kajian Peneliti, 2007

1.7 Metodologi Penelitian

Dalam upaya untuk menemukan jawaban dari hasil perumusan masalah, maka dilakukan pendekatan penelitian untuk mengetahui konsep dan faktor–faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan penyediaan air bersih pedesaan berbasis partisipasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami permasalahan manusia (sosial) dengan cara menjelaskan informasi dari informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Nasir, 1999).

Menurut Moleong (1994: 4), penelitian kualitatif menggunakan *setting* alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*) untuk pengumpulan data. Data yang terkumpul dalam bentuk kata–kata dan gambar–gambar. Fokus utama penelaahan terkait langsung dengan kehidupan manusia. Penggunaan data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil analisis.

1.7.1 Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari penelitian ini diperlukan tahapan kegiatan, dimulai dari persiapan dan perancangan studi yang akan dilakukan, pengenalan wilayah studi dan permasalahan yang akan diteliti, kebutuhan data yang diperlukan, populasi yang akan diteliti dan teknik sampling, referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, metode analisis yang digunakan serta jadwal kegiatan yang relevan.

Di dalam suatu penelitian terdapat suatu prosedur kerja yang dipandu oleh

suatu metode tertentu yang disebut metode penelitian. Menurut Nasir (1999), metode penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri atas prosedur dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Prosedur mengarahkan urutan-urutan yang akan dilakukan, sedangkan teknik penelitian memberikan alat atau cara apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1999: 65). Penelitian deskriptif juga mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan – kegiatan, sikap – sikap, pandangan – pandangan serta proses – proses yang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan dengan upaya penggambaran data. Metode ini digunakan untuk mengamati dan meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang secara sistematis, faktual dan akurat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

1.7.2 Tahapan penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian guna mendukung penyusunan laporan hasil

penelitian, didasarkan pada metodologi serta keterkaitan dengan output yang akan dihasilkan. Tahapan pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. Tahap observasi awal dan penetapan lokasi penelitian, yang berguna untuk:
 - Identifikasi masyarakat yang ada di lokasi penelitian.
 - Identifikasi permasalahan Forum Bina Lingkungan.
 - Penetapan lokasi penelitian, sebagai dasar justifikasi wilayah studi. Kriteria wilayah yang akan menjadi lokasi penelitian ada dua, yaitu: pertama, adalah wilayah secara administratif yang di dalamnya terdapat Forum Bina Lingkungan. Kedua, karakteristik masyarakat yang ada dalam lokasi penelitian adalah heterogen.

2. Tahap studi literatur

Pada tahap ini peneliti melakukan kajian literatur sebagai dasar untuk melakukan penelitian dalam merumuskan suatu konsep sementara tentang kinerja Forum Bina Lingkungan sebagai media peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengawasan pencemaran air sungai.

3. Pelaksanaan penelitian

Pengambilan data primer dilakukan dengan dengan observasi lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dari instansional maupun media massa.

4. Kompilasi dan analisis data

Data yang diperoleh dari tahapan survei selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kebutuhan analisis, untuk kemudian dilakukan pengolahan data dan interpretasi terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga

muncul konsep sementara tentang kinerja Forum Bina Lingkungan.

5. Penyusunan Laporan

Tahap ini adalah tahap terakhir dari keseluruhan proses penelitian.

1.7.3 Kebutuhan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini pada prinsipnya akan bermuara pada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengkaji kinerja dari Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai media peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan pencemaran air sungai. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang optimalnya kinerja Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Kebutuhan data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data, yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti dari masyarakat dan industriawan di sekitar Sungai Sadang dan Sungai Cikedokan di Kecamatan Cikarang Barat, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait. Data primer yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk analisis data yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat, persepsi masyarakat dan peran kelembagaan.
2. Data sekunder, merupakan data tertulis yang diperoleh melalui sumber-sumber dokumentasi yang telah dipublikasikan secara terbatas dan tidak terbatas.

Pengumpulan data ini digunakan untuk menghemat waktu, biaya, tenaga dan guna mendukung hasil analisis. Untuk lebih jelasnya kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel I.3.

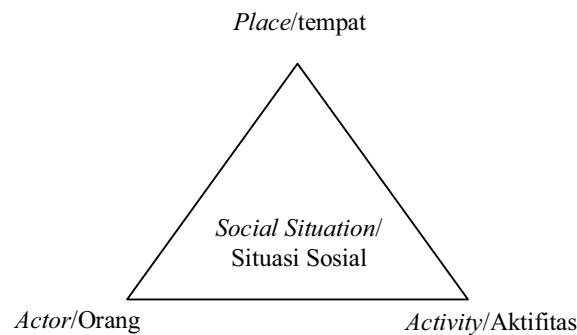
TABEL I.3
KEBUTUHAN DATA DALAM PENELITIAN

TUJUAN	SASARAN	DATA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TEKNIK ANALISIS
Mengkaji kinerja Forum Bilik sebagai media peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran air Sungai Sadang dan Cikedokan di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi	Identifikasi ekosistem sungai, pengelolaan, potensi dan permasalahan lingkungan di lokasi penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi fisik lingkungan Sungai Sadang dan Cikedokan - Permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan - Wawancara - Data Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pengusaha di sekitar Sungai Sadang dan Cikedokan - Literatur 	Deskriptif kualitatif
	Identifikasi persepsi, perilaku, dan partisipasi masyarakat dan pe-ngusaha tentang pengelolaan sungai dan keberadaan Forum Bilik	<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku terhadap lingkungan - bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan - Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pengusaha di sekitar Sungai Sadang dan Cikedokan 	Deskriptif kualitatif
	Kinerja Forum Bilik dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja forum bilik tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan-kegiatan yang dilakukan Forum Bilik dan hasil yang telah dicapai - Kendala-kendala dalam kegiatan Forum Bilik dan penyelesaiannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan - Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pengusaha di sekitar Sungai Sadang dan Cikedokan 	Deskriptif kualitatif
	Mengkaji peran pemerintah dalam mendukung Forum Bilik	<ul style="list-style-type: none"> - Proses perencanaan kebijakan Forum Bilik - keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan Forum Bilik 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan - Wawancara - Data Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pengusaha di sekitar Sungai Sadang dan Cikedokan - Dinas/ instansi terkait 	Deskriptif kualitatif

Sumber : Hasil Kajian Peneliti, 2007

1.7.4 Situasi Sosial

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui "apa yang terjadi" di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu. Situasi sosial seperti ditunjukkan pada Gambar 1.5.



Sumber: Sugiyono, 2005: 50.

GAMBAR 1.5
SITUASI SOSIAL (*SOCIAL SITUATION*)

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono, 2005: 50).

Dalam penelitian ini diambil batasan sosial yaitu: tempat (*place*) Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, orang (*actor*) anggota forum bina lingkungan (Forum Bilik) dengan aktivitasnya sebagai media peran serta masyarakat dalam pengawasan pencemaran air sungai Sub DAS Sungai Sadang dan Cikedokan di Wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

1.7.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling bola salju (*snowball sampling*).

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang

diperlukan. Dalam hal ini sumber data merupakan anggota dari forum bilik. Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sumber data sebelumnya tersebut, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian.

Sugiyono (2005: 55) menjelaskan bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf "*redundancy*" (datanya telah jenuh), ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang signifikan.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting-nya*, data dapat dikumpulkan pada kondisi alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data

dapat dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat fokus dan mengakses data secara komprehensif adalah dengan memasang beberapa jenis instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*depth interview*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam, penelitian ini adalah obsevasi lapangan, wawancara mendalam (*depth interview*) kepada sumber data, serta melakukan dokumentasi. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dari pemberitaan media massa untuk mendukung analisis (analisis isi).

1.7.7 Teknik Penyajian Data

1.7.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti

akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

1.7.7.2 Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2005: 95). Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

1.7.7.3 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2005: 99). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.7.8 Teknik Analisis Data

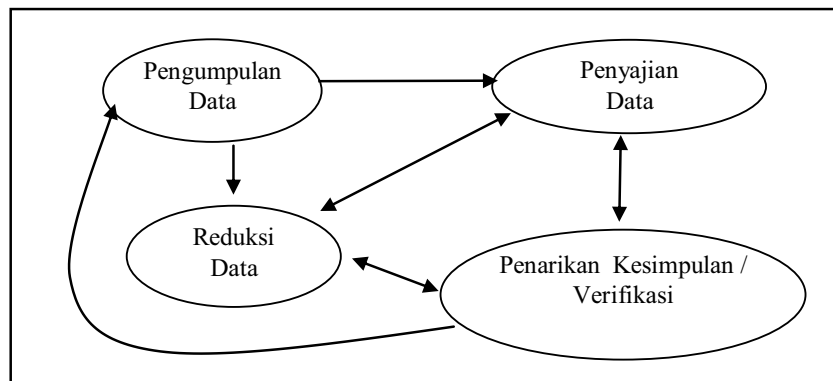
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam analisis.

Sugiyono (2005: 89) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis yang dipilih dalam penelitian ini juga mendasarkan pada tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin-mengjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam Gambar 1.6, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu

sendiri merupakan proses siklus interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus.



Sumber: Miles dan Huberman 1992: 20

GAMBAR 1.6
KOMPONEN-KOMPONEN ANALISIS DATA KUALITATIF
MODEL INTERAKTIF

Penelitian ini pada dasarnya akan mengadopsi ketiga alat analisis kualitatif tersebut, namun penggunaannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai kejadian yang terkait dengan topik penelitian. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data kualitatif hasil wawancara dan observasi, terutama menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian.

Pendekatan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu meliputi:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya

dari berbagai sumber dan bukan usaha untuk membuat generalisasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk: (a) mendeskripsikan fenomena dan fakta mengenai kondisi lingkungan hidup, khususnya kualitas air sungai di lokasi penelitian, karakteristik sosial budaya masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (b) mendeskripsikan kegiatan/aktifitas Forum Bina Lingkungan dalam pengawasan pencemaran air sungai; serta (c) mendeskripsikan peranan pemerintah daerah dan *stakeholder* di lokasi penelitian, dalam mendukung kinerja Forum Bina Lingkungan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai.

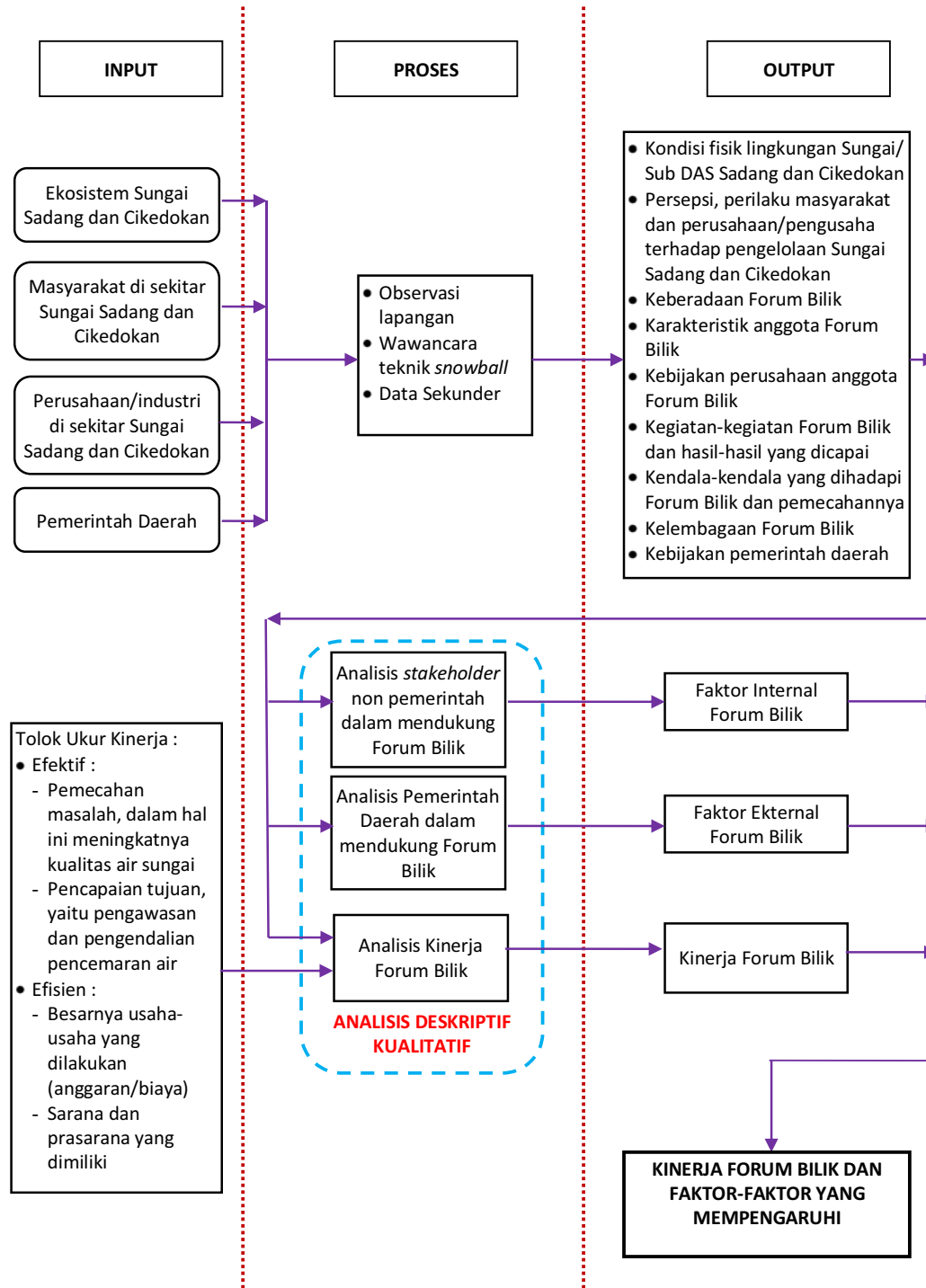
2. Analisis Isi

Untuk mendukung analisis deskriptif kualitatif akan dilakukan analisis isi, yaitu analisis berdasarkan data dari pemberitaan media massa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Analisis Komprehensif

Analisis dengan membandingkan data-data, fenomena maupun kesimpulan sementara yang diperoleh selama observasi lapangan dan wawancara terhadap keadaan yang seharusnya mengikuti suatu kondisi ideal tertentu, dimana kondisi tersebut dapat merupakan suatu standar yang ditetapkan. Analisis ini digunakan untuk menilai bagaimana kondisi yang seharusnya berjalan pada wilayah penelitian.

Adapun kerangka analisis yang mendasari penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 1.7.



Sumber : Hasil Kajian Peneliti, 2007

GAMBAR 1.7
KERANGKA ANALISIS

1.8 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Sistematika penulisan laporan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI EVALUASI KINERJA FORUM BINA

LINGKUNGAN DALAM PENGAWASAN LINGKUNGAN

Bab ini menguraikan teori – teori yang berkaitan dengan evaluasi kinerja organisasi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta teori lain yang mendukung dengan perumusan masalah dengan harapan teori yang dikemukakan akan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III KAJIAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini menguraikan kajian umum wilayah penelitian yaitu Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Cikarang Barat.

BAB IV ANALISIS KINERJA FORUM BINA LINGKUNGAN DALAM

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kinerja Forum Bilik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.

BAB II

KAJIAN LITERATUR KINERJA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Evaluasi Kinerja Organisasi

2.1.1 Organisasi

Bryant dan White (1998), menyatakan bahwa organisasi dapat digambarkan sebagai kelompok manusia yang berhimpun bersama untuk tujuan-tujuan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. Menurut Chester A. Benrnard dalam Thoha (1998) bahwa organisasi sebagai suatu sistem aktivitas-aktivitas organisasi yang terorganisasi secara sadar atas ketentuan-ketentuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (1998) menjelaskan bahwa sesuatu organisasi terwujud apabila ada sekelompok orang yang sepakat untuk melakukan usaha bersama demi kepentingan bersama pula. Selanjutnya organisasi dapat dipandang sebagai suatu wadah, dimana berbagai kegiatan organisasional berlangsung, dan yang kedua sebagai suatu proses kerjasama antara kelompok orang demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, pengertian organisasi adalah himpunan orang-orang yang berinteraksi untuk melakukan tugas dan pekerjaan tertentu dengan dukungan sumber-sumber daya serta berhadapan dengan kendala-kendala dari lingkungan maupun luar lingkungan guna mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pengertian organisasi mengandung unsur tujuan, sumber daya, kendala dan lingkungan dalam arti bahwa terkandung unsur internal maupun

eksternal organisasi.

Secara terminologis, kinerja merupakan terjemahan dari *performance*. Kata kinerja tersusun dari dua kata, yaitu kinetika (yang berarti kemampuan atau prestasi) dan kerja. Oleh karena itu, kinerja dapat diartikan kemampuan atau prestasi kerja (Webster Dictionary dalam Dunn, 1998). Selain itu, kinerja dapat diartikan pula sebagai suatu penampilan dari sesuatu dengan persyaratan, sehingga memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan atau menyelesaikan sesuatu yang diharapkan.

Kinerja organisasi merupakan suatu gambaran hasil atau prestasi dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, bahwa untuk mengetahui keberhasilan atau prestasi suatu organisasi, maka perlu diketahui dahulu kinerjanya. Untuk dapat mengukur kinerja suatu organisasi, maka perlu diketahui dahulu kinerjanya serta factor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Mac Donald dan Lawton dalam Keban (1995), bahwa penilaian kinerja organisasi dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Efektifitas suatu organisasi dapat dilihat dari aspek pencapaian tujuannya. Keberhasilan organisasi harus pula mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi, tetapi juga mekanisme untuk mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Tolok ukur yang sebenarnya untuk manajemen yang baik adalah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada/tersedia dalam mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif.

Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian

dan tergantung pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula. Sementara itu, menurut Bernard dalam Gibson (1997: 56), efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas.

Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih, 2005: 22) yang dapat dilihat dari:

- 1) Kemampuan memecahkan masalah. Keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.
- 2) Pencapaian tujuan. Efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan, dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata.

Kriteria efektivitas suatu kebijakan suatu fungsi yang ditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan organisasi kebijakan. Hal tersebut untuk meminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran yang berbeda, sebagaimana dikutip Drabkin dalam Wahyuningsih (2005: 22). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan antara lain:

- 1) Aturan struktur institusional yang diimplementasikan sebagai suatu kerangka kerja untuk mengimplementasikan kebijakan.

- 2) Program kebijakan yang diimplementasikan pada tingkat nasional, regional maupun daerah. Partisipasi pemerintah di tingkat lokal pada penyusunan rencana regional maupun nasional terhadap pelaksanaan kebijakan di pemerintah tingkat lokal merupakan faktor utama yang mengemukakan suatu keefektifan suatu kebijakan.
- 3) Adanya agen publik yang menentukan skema pembangunan yang berbeda-beda.

Menurut Ginanjar (1997) dalam Soegijoko (2005), pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau dan evaluasi terus-menerus untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilakukan dan bagaimana hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang diinginkan. Sebagaimana organisasi pada umumnya, maka organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah mampu berperan sebagai agen pemerintah di bidangnya untuk menjalankan sebagian peranan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Tolok ukur keberhasilan dari organisasi yang dibentuk tersebut dapat dilihat dari sisi kinerjanya.

2.1.2 Evaluasi Kinerja

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai. Hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna (Dunn, 1998: 608).

Evaluasi mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Fungsi pertama dan yang paling penting bahwa evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan/program, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

Fungsi kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

Fungsi ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan/program dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi kebijakan/program yang baru atau revisi kebijakan/program dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Dunn, 1998: 609-611).

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis

menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan/program. Dalam menilai kinerja organisasi publik diperlukan kriteria yang menjadi landasan penilaian sehingga dapat diketahui keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kriteria kinerja organisasi publik menurut Dunn (1998) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas dapat pula diartikan suatu kriteria untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal terlepas dari pertimbangan efisiensi. Dalam hal ini efektifitas dapat diartikan bahwa apakah dengan adanya Forum Bilik dapat mengurangi tingkat pencemaran sungai akibat limbah industri.
2. Efisiensi (*Efficiency*), yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dapat pula diartikan suatu kriteria untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut membuahkan hasil yang rasio efektivitas biayanya lebih tinggi dari batas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan antara efektivitas dan usaha.

2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1997, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup mengandung arti upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Kebijakan penataan lingkungan hidup meliputi upaya terpadu dalam kegiatan: penyusunan dan penetapan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain memuat target standar kualitas lingkungan; mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan SDA yang terkait dengan tata ruang, tata guna tanah, tata guna air dan tata guna udara; pengorganisasian dan ketatalaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang pada dasarnya membentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang disebutkan dalam pasal 23 Undang-undang No. 23 tahun 1997.

Pemanfaatan lingkungan hidup merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan rencana dan program pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan kewajiban pemerintahan yang meliputi:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan :
 - kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

- kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Mengembangkan dan mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- f. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Pemeliharaan adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin keseimbangan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Adapun dalam pengawasan lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 23 tahun 1997 pasal 22 ayat 3, bahwa wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah

daerah.

Menurut Supardjo (2005) dalam laporan kegiatan Dinas PDLP Kabupaten Bekasi (2006: 76), pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah. Dalam kegiatan pengendalian ini dapat dilakukan dengan:

- a. Melalui pendekatan *command and control*, misalnya: pembuatan AMDAL bagi setiap kegiatan usaha yang berdampak penting dan besar; melalui instrumen perizinan.
- b. Pengenaan sanksi administrasi, pidana dan tuntutan perdata.
- c. Penetapan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup
- d. Kewajiban melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan larangan impor limbah B3
- e. Melalui pendekatan *voluntary compliance*, meliputi: audit lingkungan, program PROKASIH, Program Langit Biru, Program PROPER, Sertifikat ISO 14000; pemberian kesempatan yang sama dan seluas-seluasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Pembangunan yang memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin

meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (UU No. 23 Tahun 1997).

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat ada, dan lain-lainnya, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

2.3 Pembangunan Partisipatif

Paradigma pembangunan yang telah bergeser ke arah pembangunan

masyarakat dengan strategi pemberdayaan dan partisipasi. Konsep pembangunan yang menempatkan pembangunan pada kepentingan manusia, tidak lagi hanya sebagai alat (obyek) (*man-centered development concept*) tetapi sebagai subyek dalam proses pembangunan itu sendiri, sehingga hasil pembangunan itu akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Yudohusodo, 1991).

Pembangunan partisipatif telah ditempatkan sebagai isu utama dalam model pendekatan pembangunan terkini. Hal tersebut juga terdokumentasi dalam ” *Shaping the 21st Century: The Contribution and Development Cooperation*” (yang dikenal sebagai dokumen *New Development Strategy*). Isu-isu tersebut disemangati oleh peningkatan efisiensi dalam manajemen proyek melalui keterlibatan masyarakat lokal untuk mengelola sumberdaya secara lebih dalam dan berkelanjutan.

Dikemukakan oleh Jamieson (dalam Mikkelsen 2003: 63) bahwa munculnya paradigma pembangunan partisipatif mengindikasikan adanya dua perspektif, pertama yaitu pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program/proyek, sehingga akan mewarnai kehidupan mereka yang pada akhirnya akan dapat dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai – nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Kedua, akan diperoleh umpan balik (*feedback*) yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan itu sendiri.

Menurut Panudju (1999), partisipasi masyarakat erat terkait dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan yang meliputi identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan

berbagai kegiatan. Beberapa alasan utama partisipasi menjadi sangat penting dalam pembangunan masyarakat menurut Conyers (1984), yaitu:

1. Bahwa partisipasi merupakan alat untuk memperoleh informasi, kebutuhan dan sikap masyarakat, dimana tanpa partisipasi program pembangunan atau proyek yang sedang berjalan besar kemungkinan akan gagal.
2. Dengan partisipasi masyarakat akan lebih percaya kepada program/proyek yang sedang berjalan karena masyarakat merasa ikut dilibatkan mulai proses persiapan, persiapan dan perencanaan, dengan pertimbangan bahwa masyarakat lebih tahu seluk beluknya dan akhirnya akan menimbulkan rasa memiliki terhadap program/proyek dimaksud.
3. Dikemukakan bahwa partisipasi merupakan hak demokrasi dalam pelibatan pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Strategi tersebut digambarkan sebagai reaksi terhadap strategi kesejahteraan (*welfare strategy*), dimana terdapat keyakinan bahwa orang hidup akan secara langsung dipengaruhi oleh usaha – usaha pembangunan untuk mengetahui dengan pasti kebutuhan dan kekurangannya. Dimensi lanjut dari strategi ini adalah menekankan pada upaya memperkuat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Pembangunan masyarakat yang sedemikian bersifat holistik karena memerlukan pendekatan yang komprehensif tentang isu kemiskinan sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat diselesaikan secara terpisah dan melalui teknologi terspesialisasi serta tidak dapat diukur dengan sekumpulan indikator statistik.

2.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi atau peran serta masyarakat banyak dikemukakan oleh beberapa ahli dan lembaga resmi. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan Keith Davis dalam Sastropetro (1985: 51). Secara lebih mendalam Sastropetro (1985: 51) partisipasi mengandung tiga ide pokok, yaitu:

- a. Partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata – mata keterlibatan fisik secara jasmaniah.
- b. Kesiediaan memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan kelompok. Hal ini menunjukkan adanya faktor rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok/komunitas.
- c. Adanya unsur tanggung jawab yang merupakan aspek yang menonjol dari rasa keanggotaan. Dengan diakuinya sebagai anggota maka menimbulkan *"sense of belongingness"*.

Partisipasi juga diartikan sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan (Alastraire dalam Sastropetro, 1988). Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat harus digerakkan dan dibentuk untuk dapat berfungsi sebagai output pembangunan, sehingga dapat diketahui peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mandiri (Ndraha, 1990).

Partisipasi dalam hubungannya dengan pembangunan, definisi partisipasi

PBB dalam Slamet (1993) adalah keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan yang berbeda dalam: (a) proses pembentukan keputusan yang bertujuan untuk menentukan tujuan – tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber – sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut; (b) pelaksanaan program dan proyek secara sukarela; (c) pemanfaatan hasil – hasil dari suatu program atau proyek.

Dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat, Soetrisno (1995) mengemukakan pendapat bahwa partisipasi dapat diartikan bahwa adanya kerjasama antara rakyat/masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri. Beberapa pengertian tentang partisipasi seperti yang dikemukakan oleh FAO dalam Mikkelsen (2003) yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi juga diartikan sebagai pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak – dampak sosial.
- c. Partisipasi juga didefinisikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.

Meskipun banyak pengertian yang dikemukakan mengenai partisipasi tetapi pada dasarnya komponen utama dari partisipasi adalah menolong diri sendiri, yaitu saling tolong menolong dalam komunitas (Chouguill, 1996). Melalui

partisipasi, masyarakat secara bersama dengan pengetahuan, kemampuan yang dimiliki, mempunyai kesempatan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan dan menyampaikan permasalahannya serta menentukan sendiri cara pemenuhan dan penyelesaiannya secara bersama-sama. Dengan cara yang diambil bersama, maka tindakan-tindakan yang telah ditentukan mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan komunitasnya secara lebih tepat sasaran.

Menurut Arstein (1969) sebagaimana dikutip dalam Panudju (1999: 69-76), jenjang partisipasi atau tingkat peran serta masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibagi dalam delapan jenjang anak tangga partisipasi yang sangat terkenal, dimana mendasarkan pada distribusi kekuasaan, yaitu sebagai berikut:

1) Manipulasi (*Manipulation*)

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

2) Terapi (*Therapy*)

Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlihat banyak terlibat dalam kegiatan, tetapi tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada untuk mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

3) Informasi (*Informing*)

Pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait

proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negoisasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.

4) Konsultasi (*Consultation*)

Masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah *attitude survey* atau survei tentang arah pikiran masyarakat ataupun dengan *neighbourhood meeting* atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.

5) Penenteraman (*Placation*)

Pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, usulan masyarakat tetap diperhatikan, namun karena kedudukannya relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah, maka tidak mampu mempengaruhi keputusan.

6) Kemitraan (*Partnership*)

Publik berhak berunding dengan pengambil keputusan (pemerintah), atas

kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

7) Pelimpahan Kekuasaan (*Delegated Power*)

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, pemerintah harus mengadakan negoisasi dengan masyarakat tetapi tidak dapat memberikan tekanan dari atas. Masyarakat dimungkinkan mempunyai tingkat kendali atas keputusan-keputusan pemerintah.

8) Kontrol Masyarakat (*Citizen Control*)

Publik dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negoisiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga pada tingkatan ini dapat langsung berhubungan dengan sumber dana untuk mendapatkan bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

Dari tipologi yang diajukan oleh Arstein (1969) secara ringkas dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. Tidak ada partisipasi sama sekali atau *nonparticipation*, yang meliputi *manipulation* dan *therapy*.

2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism*, yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power*, meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen power*.

Secara grafis dapat dijelaskan seperti terlihat dalam Gambar 2.1.

8	Citizen Control	Degrees of Citizen Power
7	Delegated Power	
6	Partnership	
5	Placation	Degrees of Tokenism
4	Consultation	
3	Informing	
2	Therapy	Non Participation
1	Manipulation	

Sumber : Panudju, 1999, diolah

GAMBAR 2.1
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT MENURUT ARSTEIN

2.3.2 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Pembangunan yang selama ini hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan fisik banyak dikritik karena tidak atau kurang menyentuh sisi lain kehidupan manusia, yakni aspek sosial politik masyarakat. Tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia yang dioperasionalkan dengan tidak melibatkan manusia sebagai subyek dalam pembangunan itu sendiri. Padahal secara alamiah usaha-usaha peningkatan taraf

hidup masyarakat yang disertai dengan pendayagunaan sumber-sumber daya yang ada di sekitarnya telah ada dalam masyarakat itu sendiri (Slamet, 1993)

Menyangkut dimensi apapun, operasionalisasi program pembangunan selalu terkait dengan fungsi manajemen yaitu: *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* (POAC). Berbasis pada fungsi-fungsi manajemen ini program pembangunan dioperasionalkan dalam suatu proses atau siklus.

Proses perencanaan melibatkan penyusunan suatu strategi mengenai bagaimana mendapatkan persoalan yang dihadapi sekarang dan berpindah setahap demi setahap menuju visi yang diinginkan akan suatu kondisi atau permasalahan yang dihadapi. Perencanaan tidak mengambil suatu tempat di dunia yang ideal, tetapi perencanaan selalu diatur dalam konteks yang ada (Nieras, 2002). Healey dalam Darminto (2003) mengemukakan bahwa perencanaan sering mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya di masa lalu, karena menggunakan pendekatan teknik dan administrasi yang secara luas didasarkan pada rasionalisme ilmiah. Pendekatan partisipasi yang dikembangkan pada pertengahan 1980-1990 adalah cara atau pembenaran perencanaan terkini. Tujuan perencanaan yang muncul pada tahun 1990-an adalah meningkatkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Darminto, 2003).

Menurut De Roux dalam Nieras (2002), *Participatory Planning* dipandang sebagai suatu proses sosial yang dinegosiasikan, artinya fokus dari perencanaan partisipatif terutama tidak menghasilkan suatu rencana tetapi lebih menciptakan ruang-ruang dialog antar berbagai aktor dengan berbagai harapan, persepsi dan interpretasi berkenaan dengan persoalan-persoalan dan isu-isu yang

diungkapkan dan dirundingkan. Perencanaan partisipatif juga menawarkan kesempatan unik bagi teknisi dan anggota komunitas untuk berinteraksi dan menghubungkan pengetahuan masing-masing.

Menurut Abe (2005), suatu perencanaan yang berbasis pada prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkret masyarakat dimana penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak penting, yaitu: (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi dan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat; (2) memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan perencanaan, semakin banyak masyarakat terlibat maka diharapkan hasilnya juga akan semakin baik; (3) meningkatkan kesadaran dan ketrampilan berpolitik dalam masyarakat.

Sementara itu, tujuan utama partisipasi menurut Sanoff (2000) adalah (a) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; (b) untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; (c) untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum.

Walaupun dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya memuaskan, namun hasil dari suatu program/proyek yang telah dihasilkan melalui peran serta masyarakat jelas lebih menguntungkan dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dibandingkan bila sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dengan tidak menempatkan masyarakat sebagai obyek, melainkan sebagai subyek dalam proses pembangunan maka

masyarakat akan berperan sebagai mitra dalam proses pembangunan dari awal perencanaan hingga operasi pemeliharaannya, sehingga akan terjamin keberlanjutannya. Dengan pandangan yang lebih luas, ada beberapa manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya proses pembelajaran.

Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan pengalaman baru dan kepercayaan diri yang lebih, sehingga akan meningkatkan peran partisipasinya lebih jauh dengan bentuk yang lebih berkualitas

2. Mengeliminasi perasaan terasing

Dengan turut aktifnya seseorang atau sekelompok komunitas, maka perasaan terasing dari kelompoknya akan lenyap, karena akan merasa bagian dari kelompok atau masyarakat tersebut.

3. Menjadikan masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab

Dengan adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, maka akan memberikan paksaan kepada seseorang untuk membuka pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini kepentingan publik, sehingga orang tersebut tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sikap tanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama (Mill dalam Abe, 2005).

4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan suatu program dari pemerintah

Dengan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, seseorang atau komunitas cenderung mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan yang telah

diambil. Artinya, dengan partisipasi masyarakat akan menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik dan menambah kepercayaan publik atas proses politik yang sedang dijalankan oleh pengambil keputusan.

5. Menciptakan kesadaran berpolitik dalam masyarakat

Pada proses partisipasi pada tingkatan lokal akan terjadi proses pendidikan sebenarnya dalam berdemokrasi dengan melakukan proses demokrasi itu sendiri. Jadi, semakin sering atau selalu melakukan proses partisipasi maka masyarakat sebenarnya sedang berpraktik pemerintahan skala kecil yang nantinya akan membuat masyarakat belajar bagaimana bila diterapkan dalam lingkup yang lebih luas.

6. Hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebenarnya. Melalui partisipasi masyarakat akan terjadi distribusi yang lebih adil terhadap keuntungan pembangunan yang didapat karena skala kepentingan yang lebih luas telah tercakup di dalam proses pengambilan keputusan.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Partisipasi

Menurut Mulasari dalam Rico dkk. (2007), faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan atau kegagalan partisipasi antara lain kapasitas organisasi (faktor internal), kapasitas dan peran pemimpin lokal, peran “*intermediary agencies*” (fasilitator), dan situasi-kondisi eksternal organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, dengan pendekatan

partisipatif ditentukan oleh banyak faktor, meskipun faktor utamanya adalah komponen masyarakatnya sendiri. Faktor lain yang berpengaruh adalah keterlibatan pihak ketiga sebagai pendamping. Kondisi masyarakat Indonesia, khususnya pedesaan dengan tingkat kesederhanaan dan keterbatasannya, seperti pendidikan, wawasan, teknologi dan ekonomi, memerlukan upaya pemberdayaan melalui pengarahannya dan pendampingan. Untuk itulah diperlukan peran fasilitator dalam upaya pemberdayaan, sehingga masyarakat mampu merumuskan masalah, membuat rencana, serta mengorganisasikan komunitasnya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan mengintegrasikan segenap sumberdaya yang dimilikinya.

Selain kedua faktor di atas, mekanisme pelaksanaan program juga sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari program pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Sesuai dengan pengertian pengelolaan oleh masyarakat sebagai bagian siklus pembangunan partisipatif, maka masyarakat harus mampu memberikan pengaruh yang kuat serta mengontrol dalam mekanisme pelaksanaan pembangunannya. Untuk itu, adanya pilihan teknologi dan tingkat layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam keberlanjutannya (Mc. Common, dalam Unicef, 1999: 20). Hal ini bisa diterjemahkan juga sebagai faktor karakteristik program/proyek yang dilaksanakan.

2.3.4 Hambatan dalam Menerapkan Partisipatif Masyarakat

Hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi

setempat, ada tiga kendala penting dalam partisipasi (Bappenas, 2001: 18), yaitu:

1. Waktu, masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka merasa bahwa proyek berguna.
2. Menyusun dan membuat pandangan mereka sendiri, partisipasi akan menjadi kendala apabila dalam forum-forum masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menyalurkan pandangan mereka.
3. Sikap profesional, sikap dari para pelaksana (pendamping dan aparat pemerintah) harus berpihak kepada masyarakat. Mereka harus percaya kepada kemampuan masyarakat dan dapat membagi pengetahuannya.

Belajar dari pengalaman, semua kelompok masyarakat berbeda. Para pelaksana harus fleksibel dan mau belajar dari pengalaman serta mencoba beberapa metode dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kapasitas dari masyarakat dan institusi dapat berubah dengan sendirinya, mendapat pengakuan, dukungan dan menambah kepercayaan diri masyarakat.

Menurut Korten sebagaimana dikutip dalam Slamet (1993: 66-74) mengemukakan sejumlah hambatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Hambatan dalam badan-badan, tempat pembentukan keputusan, sikap-nilai-keahlian, sistem evaluasi, stabilitas penempatan pegawai. Dalam hal ini terdapat pula hambatan birokrasi.
- b. Hambatan dalam komunitas, kurangnya organisasi lokal yang memadai, kurangnya keahlian berorganisasi, lemahnya fasilitas komunikasi, perbedaan dalam golongan-golongan.

Menurut Hetifah (2000) dalam Rico (2007), mengemukakan adanya tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik, yaitu:

- a. Hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Diantaranya adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi fiskal.
- b. Hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisasi dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi.
- c. Hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.

Menurut Rico (2007) hambatan dan tantangan terbesar dari penerapan perencanaan partisipatif adalah resistensi birokrasi (*mental block*) dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan desa masih sangat terbatas, baik teknis maupun sikap/perilaku berdemokrasi.

Resistensi birokrasi terutama berkaitan dengan pembagian/pendelegasian kewenangan dan perimbangan keuangan. Sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas/instansi yang dikuasainya. Selain itu, masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi “proyek”. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi lokal (kelembagaan partisipasi masyarakat) pun dilaksanakan dengan pendekatan proyek.

Resistensi politisi diperkirakan akan muncul karena salah satu konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah berkurangnya anggaran daerah yang berarti juga mengurangi nominal anggaran legislatif. Hal ini lebih mudah diselesaikan melalui pendekatan politik dengan mengedepankan sikap kenegarawanan.

Tantangan terberat adalah bagaimana agar manajemen partisipatif ini tidak terdistorsi dan dimanipulasi oleh kelompok tertentu, seperti elit desa dan sebagainya. Pengembangan manajemen partisipatif ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kesabaran, keuletan dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya.

2.3.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Setiap orang/anggota masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya, peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan

lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya

- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
- d. Memberikan saran pendapat dan menyampaikan informasi, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.4 Pembelajaran Sosial dan Perencanaan Transaktif

Menurut Darminto (2003), tujuan perencanaan yang muncul pada tahun 1990-an adalah untuk meningkatkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Friedman (1987) dalam Hadi (2005) salah satu penyebab terjadinya krisis perencanaan adalah tidak adanya keterkaitan antara pengetahuan (*knowledge*) dan implementasi (*action*). Hal ini menandakan ketidakberhasilan memahami kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya muncul teori perencanaan transaktif atau pembelajaran sosial untuk menjembatani *communication gap* antara pengetahuan

teknik dari para perencana dengan pengetahuan keseharian masyarakat (Hadi, 2005: 27).

Menurut Abe (2005), suatu perencanaan yang berbasis pada prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dimana penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Hadi (2005) mengemukakan kunci dari gagasan perencanaan transaktif dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Burchel (1988) dalam Hadi (2005: 27), pendekatan transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang diketahui dengan apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teori dalam praktik dan teori yang diperkaya dari pelajaran di lapangan. Contoh lain adalah adanya *public hearing* yang bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.

2.5 Rangkuman Kajian Teori

Berdasarkan literatur dan pendapat ahli/pakar di atas serta sejalan dengan tujuan dan sasaran penelitian ini maka dapat dirangkum seperti ditunjukkan dalam Tabel II.1 sebagai berikut:

TABEL II.1
RANGKUMAN KAJIAN TEORI

PAKAR	PENDAPAT	VARIABEL / FOKUS
UU No. 23 Tahun 1997	Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup mengandung arti upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup	Aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup - kebijakan penataan - pemanfaatan - pengembangan - pemeliharaan - pemulihan - pengawasan - pengendalian
Keith Davis, dalam Sastropetro, (1985 : 51).	Partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan	Keterlibatan anggota masyarakat
Soetrisno (1995)	Dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat, partisipasi dapat diartikan bahwa adanya kerjasama antara rakyat/masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri.	Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
Yudohusodo, 1991	Konsep pembangunan yang menempatkan pembangunan pada kepentingan manusia, tidak lagi hanya sebagai alat (obyek) (<i>man – centered development concept</i>), tetapi sebagai subyek dalam proses pembangunan itu sendiri, sehingga hasil pembangunan itu akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan	Paradigma pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat
Conyers (1994)	Alasan utama partisipasi menjadi sangat penting dalam pembangunan masyarakat: 1. Bahwa partisipasi merupakan alat untuk memperoleh informasi, kebutuhan dan sikap masyarakat, dimana tanpa partisipasi program pembangunan atau proyek yang sedang berjalan besar kemungkinan akan gagal. 2. Dengan partisipasi masyarakat akan lebih percaya kepada program/proyek yang sedang berjalan karena masyarakat merasa ikut dilibatkan mulai proses persiapan, persiapan dan perencanaan, dengan pertimbangan bahwa masyarakat lebih tahu seluk beluknya dan akhirnya akan menimbulkan rasa memiliki terhadap program/proyek dimaksud. 3. Dikemukakan bahwa partisipasi merupakan hak demokrasi dalam pelibatan pembangunan masyarakat mereka sendiri.	Pentingnya partisipasi, tujuan dan manfaat partisipasi

Lanjut ke halaman 62

Lanjutan Tabel II.1 Halaman 61

PAKAR	PENDAPAT	VARIABEL / FOKUS
Sanoff (2000)	Tujuan utama partisipasi adalah (1) melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; (2) melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; (3) mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum.	
Friedman (1987) dalam Hadi (2005)	Salah satu penyebab terjadinya krisis perencanaan adalah tidak adanya keterkaitan antara pengetahuan (<i>knowledge</i>) dan implementasi (<i>action</i>). Hal ini menandakan ketidakberhasilan memahami kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya muncul teori perencanaan transaktif atau pembelajaran sosial untuk menjembatani <i>communication gap</i> antara pengetahuan teknik dari para perencana dengan pengetahuan keseharian masyarakat	Perencanaan Transaktif dan Pembelajaran Sosial
Abe (2005)	Suatu perencanaan yang berbasis pada prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat, dimana penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat.	
Burchel (1988) dalam Hadi (2005)	Pendekatan transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang diketahui dengan bagaimana harus melakukan.	
Bryant dan White (1989)	Organisasi dapat digambarkan sebagai kelompok manusia yang berhimpun bersama untuk tujuan-tujuan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu.	Pengertian Organisasi
Chester A. Benrnard dalam Thoha (1998)	Organisasi sebagai suatu sistem aktivitas-aktivitas yang terorganisasi secara sadar atas ketentuan-ketentuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.	
Webster Dictionary dalam Gibson (1997)	Secara terminologis, kinerja merupakan terjemahan dari <i>performance</i> . Kata kinerja tersusun dari dua kata yaitu kinetika (yang berarti kemampuan atau prestasi) dan kerja. Oleh karena itu, kinerja dapat diartikan kemampuan atau prestasi kerja. Selain itu, kinerja dapat diartikan pula sebagai suatu penampilan dari sesuatu dengan persyaratan, sehingga memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan atau menyelesaikan sesuatu yang diharapkan.	Kinerja Organisasi
Dunn (1998)	Kriteria kinerja kebijakan public : 1. Efektivitas (<i>effectiveness</i>), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 2. Efisiensi (<i>Efficiency</i>), yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.	Kriteria Efektifitas dan Efisiensi

Sumber: Kajian Peneliti, 2007

Berdasarkan uraian dalam kajian teori tersebut di atas, dalam penelitian ini kajian kinerja organisasi (Forum Bilik) dibatasi pada variabel sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*), yaitu apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas dilihat dari:
 - a) Pemecahan masalah, efektivitas dibentuknya Forum Bina Lingkungan tercapai apabila dalam pelaksanaan menunjukkan suatu hasil berupa pemecahan persoalan, dalam hal ini adalah meningkatnya fungsi air Sungai Sadang dan Cikedokan di Kecamatan Cikarang Barat.
 - b) Pencapaian tujuan, dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai.
2. Efisiensi (*Efficiency*), yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi memfokuskan perhatian pada masukan-masukan (*input*) yang digunakan dan cara masukan-masukan tersebut ditangani.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan kinerja forum bilik tidak optimal. Dalam hal ini faktor-faktor dilihat dari pendekatan kelembagaan, antara lain struktur organisasi Forum Bilik, kapasitas dan kewenangan Forum Bilik dalam pengawasan pencemaran air sungai. Selain itu, faktor-faktor juga dilihat dari sumber daya manusia (SDM) dari Forum Bilik, sarana dan prasarana yang ada dan pembiayaan/anggaran kegiatan Forum Bilik.

Agar variabel-variabel tersebut di atas lebih operasional, maka dibuat

pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan dalam wawancara terhadap responden dimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengkaji kinerja Forum Bilik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel II.2

TABEL II.2
PERTANYAAN PANDUAN WAWANCARA
DALAM PENELITIAN KINERJA FORUM BILIK

No.	Subtansi	Pertanyaan- pertanyaan
1.	Identitas responden	1) Nama, jenis kelamin 2) Umur 3) Pendidikan terakhir, pekerjaan 4) Alamat
2.	Persepsi/pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan (sungai)	1) Apakah responden mengetahui pengelolaan sungai beserta fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat? 2) Bagaimanakah kondisi/kualitas air sungai? 3) Apakah air sungai masih dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya? 4) Menurut responden, bagaimanakah pengaruh keberadaan industri? 5) Menurut responden, apakah keberadaan limbah industri mempengaruhi kualitas air sungai? 6) Bagaimanakah pandangan responden terhadap pencemaran/kerusakan sungai? 7) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan sungai?
3.	Pengetahuan masyarakat tentang Forum Bilik	1) Apakah responden mengetahui keberadaan Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) ? 2) Siapa saja yang menjadi anggota dari Forum Bilik? 3) Apakah responden termasuk anggota dari Forum Bilik? 4) Apa tujuan dari pembentukan Forum Bilik? 5) Bagaimanakah SDM dari Forum Bilik? 6) Bagaimana kelembagaan dan organisasi Forum Bilik? 7) Apa saja tugas Forum Bilik? 8) Apakah ada pelimpahan kewenangan kepada Forum Bilik?
4.	Inisiasi (asal-usul Forum Bilik)	1) Menurut responden, bagaimana proses pembentukan Forum Bilik? 2) Menurut responden, apa latar belakang munculnya Forum Bilik? 3) Menurut responden, apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan program/pembangunan, khususnya pembentukan Forum Bilik? 4) Menurut responden, apakah responden terlibat dalam proses perencanaan pembentukan Forum Bilik? 5) Sejauhmana keterlibatan tersebut?

Lanjut ke halaman 65

Lanjutan Tabel II.2 Halaman 64

No.	Subtansi	Pertanyaan- pertanyaan
5.	Efektivitas	1) Menurut responden, apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Bilik? 2) Apakah dengan adanya kegiatan Forum Bilik dapat meningkatkan fungsi air sungai? 3) Menurut responden, kegiatan apa yang dilakukan oleh masyarakat (selain kegiatan Forum Bilik) untuk menanggulangi pencemaran air sungai? 4) Menurut responden, apakah pemerintah daerah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi pencemaran air sungai? Apa saja upaya-upaya tersebut? 5) Menurut responden, apakah fungsi/kinerja Forum Bilik efektif?
6.	Efisiensi	1) Menurut responden, dari manakah sumber dana yang digunakan untuk kegiatan Forum Bilik? 2) Apakah pemerintah daerah memberikan bantuan dana untuk kegiatan Forum Bilik? 3) Menurut responden, bagaimanakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Forum Bilik? 4) Berapakah dana yang diperlukan untuk kegiatan Forum Bilik selama ini? 5) Bagaimana hasil-hasil yang dicapai oleh kegiatan Forum Bilik selama ini? 6) Menurut responden, apakah kegiatan Forum Bilik efisien?
7.	Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja Forum Bilik	1) Menurut responden, bagaimanakah kinerja Forum Bilik? 2) Menurut responden, apakah kegiatan Forum Bilik telah mencapai tujuan? 3) Menurut responden, apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Forum Bilik? 4) Bagaimana menyelesaikan kendala-kendala tersebut?

Sumber: Kajian Peneliti, 2007

BAB III

KAJIAN UMUM WILAYAH STUDI

3.1 Kajian Umum Kabupaten Bekasi

Wilayah Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 23 kecamatan yang meliputi 187 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Setu, Cikarang Barat dan Cikarang Utara. Luas wilayah mencapai 127.388 Ha. Kecamatan yang paling luas yaitu kecamatan Muaragembong (14.009 Ha) atau 9,65 % dari luas wilayah. Banyaknya desa di kecamatan berkisar antara 6 sampai dengan 13.

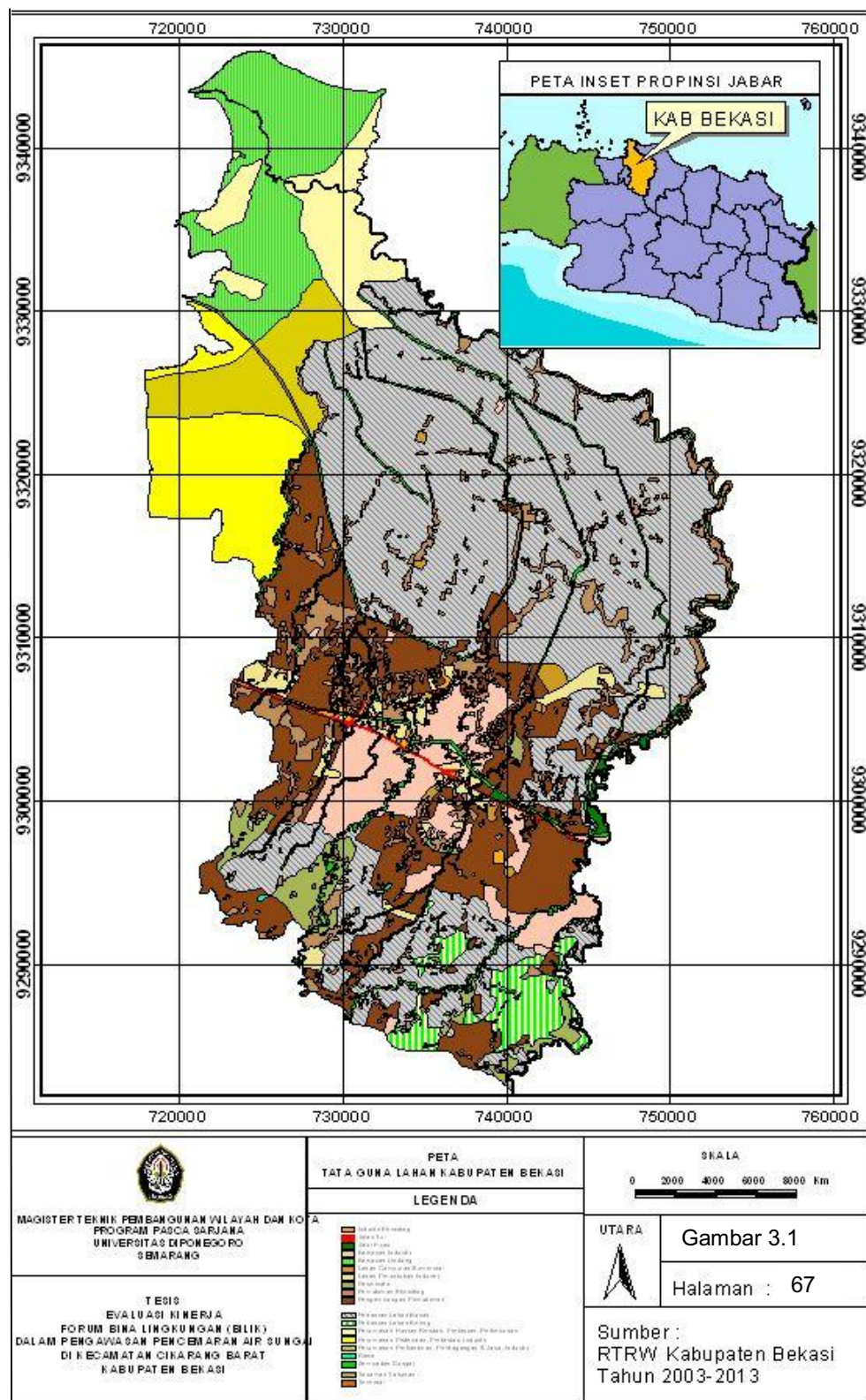
Secara geografis Kabupaten Bekasi berada di bagian utara Jawa Barat, terletak pada koordinat $106^{\circ} 58' 28''$ - $107^{\circ} 17' 29''$ BT dan $5^{\circ} 54' 6''$ - $6^{\circ} 30' 30''$ LS.

Secara administrasi Kabupaten Bekasi berbatasan dengan :

Bagian Utara : Laut Jawa;
Bagian Selatan : Kabupaten Bogor;
Bagian Timur : Kabupaten Karawang;
Bagian Barat : Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 wilayah Kabupaten Bekasi dibagi dalam empat Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

1. Wilayah Pengembangan (WP) I: Bekasi Bagian Utara meliputi Kecamatan Tarumajaya, Muaragembong dan Babelan dengan sebutan Kota Baru Pantai Makmur seluas 25.028 Ha, dengan peruntukan meliputi pengembangan pemukiman, perdagangan dan jasa, pergudangan, industri dan pariwisata.
2. Wilayah Pengembangan (WP) II: Bekasi Bagian Timur meliputi Kecamatan Cabangbungin, Sukawangi, Sukakarya, Tambelang, Pebayuran, Sukatani,



Karangbahagia, Tambun Utara dan Kedungwaringin, dengan peruntukan pertanian, perumahan/pemukiman dan pariwisata.

3. Wilayah Pengembangan (WP) III: Bekasi Bagian Tengah/Koridor Timur-Barat meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Timur dan Cikarang Pusat, dengan peruntukan perumahan/pemukiman, industri, jasa dan perdagangan, pariwisata serta pemerintahan.
4. Wilayah Pengembangan (WP) IV: Bekasi Bagian Selatan meliputi Kecamatan Setu, Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu, dengan peruntukan pertanian/hortikultura, perumahan/pemukiman dan pariwisata.

Arahan penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi sesuai dengan RTRW Tahun 2003-2013 seperti terlihat pada Gambar 3.1.

3.1.1 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2005 mencapai 2.027.902 jiwa, yang terdiri dari 1.040.957 laki-laki dan 986.945 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 105,5. Penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) sejumlah 79 %. Adapun penduduk yang belum produktif (< 10 tahun) sejumlah 18 % dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sejumlah 3%. Dengan demikian, beban ketergantungan sebesar 3,72. Keberadaan penduduk menurut kecamatan tidak menyebar secara merata. Penduduk paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu 16,82 %, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Bojongmangu 1,20 %. Tabel III.1

memperlihatkan kepadatan dan distribusi jumlah penduduk Kabupaten Bekasi menurut kecamatan.

TABEL III.1.
KEPADATAN DAN DISTRIBUSI JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN BEKASI MENURUT KECAMATAN

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas Wilayah/ <i>Width of Region</i> (Ha)	Jumlah Penduduk/ <i>Total Population</i> (jiwa/people)		Kepadatan/ <i>Density</i> (jiwa per km ² / <i>persons per km²</i>)	
		2004	2005*	2004	2005*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Setu	6,216	73,888	76,830	1,189	1,236
2. Serang Baru	6,380	59,943	62,329	940	977
3. Cikarang Pusat	5,174	39,712	41,291	768	798
4. Cikarang Selatan	4,760	78,155	81,270	1,642	1,707
5. Cibirusah	5,131	57,921	60,232	1,129	1,174
6. Bojongmangu	5,369	23,446	24,378	437	454
7. Cikarang Timur	4,330	70,955	73,781	1,639	1,704
8. Kedungwaringin	5,039	49,575	51,551	984	1,023
9. Cikarang Utara	6,006	154,216	160,363	2,568	2,670
10. Karang bahagia	3,153	73,964	76,908	2,346	2,439
11. Cibitung	4,610	138,398	143,914	3,002	3,122
12. Cikarang Barat	4,530	149,594	155,566	3,302	3,434
13. Tambun Selatan	4,310	328,110	341,175	7,613	7,916
14. Tambun Utara	3,442	85,609	89,017	2,487	2,586
15. Babelan	6,360	141,500	147,139	2,225	2,314
16. Tarumajaya	5,463	79,204	82,363	1,450	1,508
17. Tambelang	6,719	33,374	34,703	497	516
18. Sukawangi	3,791	39,879	41,466	1,052	1,094
19. Sukatani	3,752	61,057	63,487	1,627	1,692
20. Sukakarya	4,240	42,085	43,760	993	1,032
21. Pebayuran	9,634	88,349	91,867	917	954
22. Cabangbungin	4,970	46,552	48,404	937	974
23. Muaragembong	14,009	34,723	36,108	248	258
Kabupaten Bekasi	127,388	1,950,209	2,027,902	1,531	1,592

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2006

** angka sementara*

3.1.2 Ketenagakerjaan

Masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai tenaga kerja. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah tenaga

kerja pun turut meningkat. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja. Pada tahun 2005 kelompok usia ini berjumlah 1.460.335 orang, atau 72,01 % dari jumlah seluruh penduduk. Sementara itu, pencari kerja yang terdaftar di Disnaker tercatat 17.284 orang. Mereka paling banyak kelompok pria 9.907 orang atau 57,32 %. Dari pencari kerja tersebut yang sudah mendapat penempatan berjumlah 3.304 orang atau 19,12 %. Dari jumlah ini, kelompok perempuan paling banyak penempatan tenaga kerjanya. Dibandingkan dengan tahun 2004, penempatan pencari kerja tahun 2005 mengalami penurunan.

3.1.3 Kegiatan Industri

Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Bekasi. Jumlah industri besar dan sedang adalah 761 industri dengan menyerap tenaga kerja 204.492 orang, dimana penyerapan tenaga kerja ini naik 5% dari tahun 2003, seperti tersaji dalam Tabel III.2.

Lokasi industri di Kabupaten Bekasi terkonsentrasi pada wilayah tengah, yaitu koridor timur-barat (sekitar jalan tol Jakarta – Cikampek), sedangkan wilayah utara penggunaan lahannya adalah untuk pertanian (sawah). Ada dua jenis lokasi kegiatan industri di Kabupaten Bekasi, yaitu industri yang berlokasi di zona industri dan kawasan industri. Pada tahun 2002 telah dikeluarkan ijin lokasi untuk kawasan industri sebanyak 16 perusahaan pengelola kawasan industri dengan luas total 6.219,4 Ha, seperti pada Tabel III.3, sedangkan Gambar 3.2 memperlihatkan lokasi dari kawasan industri.

TABEL III.2.
JUMLAH INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI KABUPATEN BEKASI
MENURUT KELOMPOK INDUSTRI

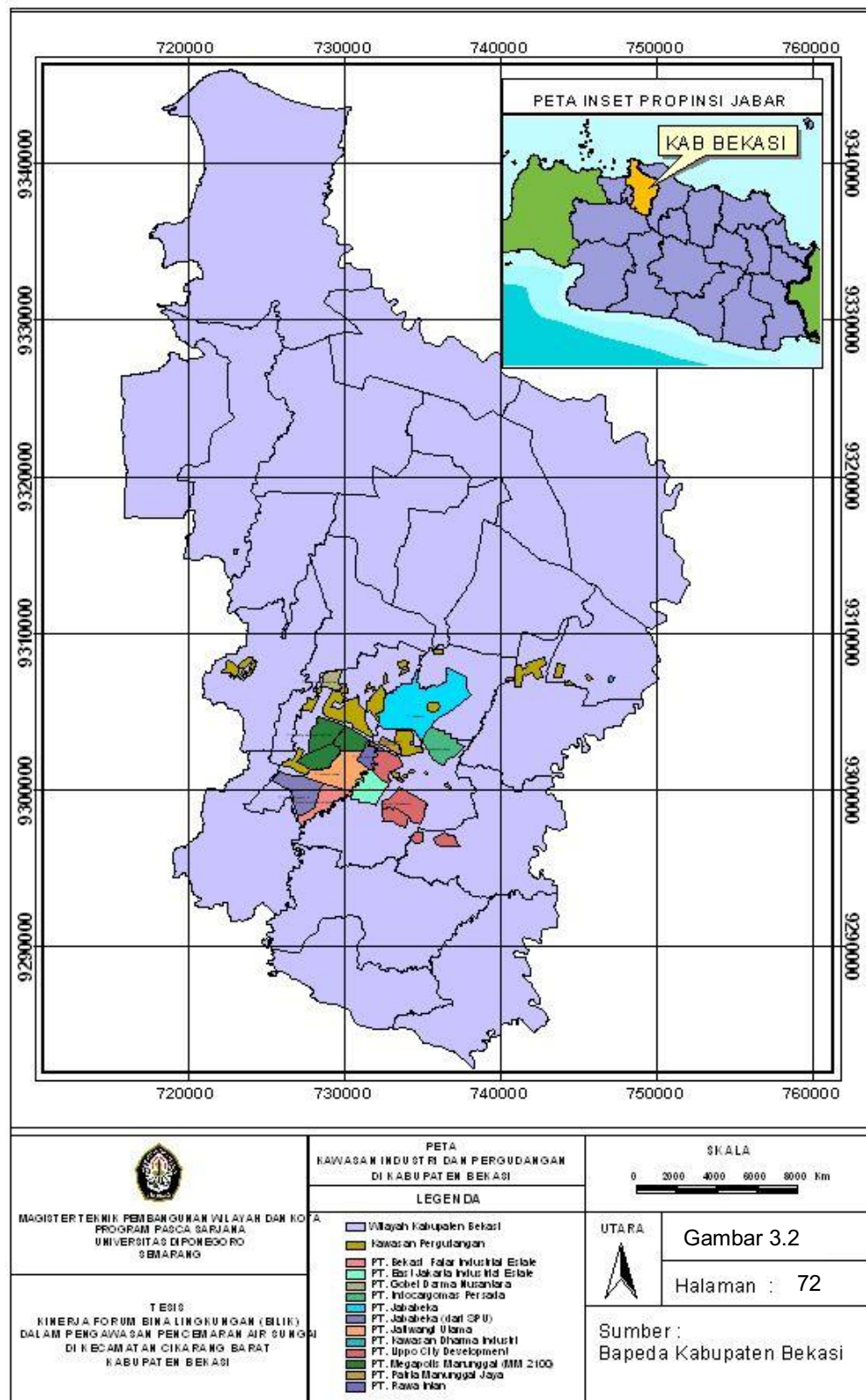
No.	Kelompok Industri	Jumlah		Rata-Rata Tenaga Kerja
		Industri	Tenaga Kerja	
1.	Makanan, minuman dan tembakau	42	5.898	140,43
2.	Tekstil, pakaian jadi dan kulit	69	16.810	243,62
3.	Kayu dan barang-barang dari kayu Termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu	30	5.500	183,33
4.	Kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	36	5.391	149,75
5.	Kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan barang-barang dari plastik	161	21.098	131,04
6.	Barang-barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batubara	25	3.898	155,92
7.	Logam Dasar	23	3.155	137,17
8.	Barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya	351	56.033	159,64
9.	Industri pengolahan lainnya	12	1.192	99,33
	Jumlah 2005	749	118.975	158,85
	2004	761	204.492	268,71
	2003	703	195.626	278,27

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2006

TABEL III.3.
KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN BEKASI
SAMPAI DENGAN TAHUN 2002

No.	Kawasan Industri	Luas (Ha)	Keterangan
1.	KI. Jababeka	790	Di Kec. Cikarang Utara
2.	KI. Jababeka II	250	Di Kec. Cikarang Utara
3.	Bekasi Fajar Industrial Estate	700	Di Kec. Cikarang Barat
4.	Megapolis Manunggal Development	760	Di Kec. Cikarang Barat
5.	Lippo City Development	427,4	Di Kec. Cikarang Selatan
6.	East Jakarta Industrial Park (EJIP)	320	Di Kec. Cikarang Selatan
7.	Hyunday Inti Development	200	Di Kec. Cikarang Selatan
8.	Rawa Intan	100	Di Kec. Cikarang Barat
9.	Patria Manunggal Jaya	90	
10.	Jatiwangi Utama	20	Di Kec. Cikarang Barat
11.	Gobel Dharma Nusantara	54	Di Kec. Cikarang Barat
12.	YKK Zipper Indonesia	20	Di Kec. Cikarang Barat
13.	Kawasan Dharma Industri	18	
14.	Indocargomas Persada	230	
15.	Gerbang Teknologi Cikarang	240	Belum beroperasi
16.	Pura Delta Lestari	2000	Belum beroperasi
	Luas Total	6.219,4	

Sumber: DPDLP Kabupaten Bekasi, 2004



3.1.4 Kondisi Fisik dan Lingkungan Kabupaten Bekasi

3.1.4.1 Kondisi Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Bekasi terbagi atas tiga bagian, yaitu dataran rendah (berkisar <25 m dpl) sebagian besar wilayah utara seluas 91.720 Ha (meliputi Kecamatan Muaragembong, Tarumajaya, Babelan, Sukawangi, Sukakarya, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Cibitung, Kedungwaringin, Karang Bahagia, Tambun Utara, Cikarang Utara dan Cikarang Timur serta sebagian wilayah Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Selatan dan Cikarang Pusat), dan daerah bergelombang (berkisar antara 26 - 100 m dpl) wilayah bagian selatan (meliputi Kecamatan Setu, Serang Baru, Cibarusah serta sebagian wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat dan Bojongmangu). Adapun daerah dengan ketinggian >101 m dpl terletak di Kecamatan Bojongmangu bagian selatan. Kemiringan berkisar antara 0 - 25 %.

3.1.4.2 Kondisi Iklim

Kabupaten Bekasi termasuk wilayah iklim tropis dengan suhu rata-rata 28 ° - 32 ° C, rata-rata curah hujan pada tahun 2003 menurun dibandingkan tahun 2002, yaitu dari 9.480 mm menjadi 1.504 mm. Adapun jumlah hari hujan pada tahun 2002 sebanyak 57 hari, sedangkan pada tahun 2003 sebanyak 46 hari (*Bappeda Kabupaten Bekasi, 2003*).

3.1.4.3 Kondisi Geologi

Secara keseluruhan Kabupaten Bekasi ini memiliki struktur geologi yang

cukup baik untuk mengembangkan/mendirikan bangunan gedung berbagai jenis kegiatan, baik pembangunan gedung perumahan maupun bukan perumahan (sarana dan prasarana perkotaan/wilayah).

Sebagian besar struktur geologi yang ada berupa *aluvium* dan *pleistocene volcanic facies* dengan luas areal sekitar 15.421,59 Ha atau 75,11% dari luas keseluruhan. Luas areal lainnya sekitar 5.110,41 Ha atau 24,89% berupa *pliocene sedimentary faces* dan *Miocene Sedimentary Faces Pleistocene Volcanic Face*, kedua areal ini merupakan lokasi yang cukup layak untuk dikembangkan/dibangun.

Jenis tanah di Kabupaten Bekasi diklasifikasikan dalam 7 kelompok. Kelompok yang paling layak untuk pengembangan pembangunan yakni jenis asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu; kompleks latosol merah kekuningan, latosol coklat, dan podsolik merah; aluvial kelabu tua; asosiasi glei humus dan alluvial kelabu; dan asosiasi latosol merah, latosol coklat kemerahan, dan laterit. Luas areal jenis tanah ini sekitar 16.682,25 Ha (81,25%). Klasifikasi cukup layak seluas 3.745,04 Ha (18,24%) terdiri dari jenis tanah asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sisanya sekitar 104, 71 Ha atau 0,51% dari jenis podsolik kuning merupakan areal yang kurang layak untuk pembangunan.

Ditinjau dari tekstur tanahnya, sebagian besar wilayah ini memiliki tekstur tanah halus sekitar 15.555,04 Ha atau 75,76% dan bertekstur sedang berada di sebelah utara dan sebelah selatan yakni sekitar 4.755,21 Ha atau 23,16%, sedangkan sisanya sekitar 221,75 Ha atau 1,08% bertekstur kasar berada di sebelah barat. Tingkat kepekaan tanah terhadap erosi cukup baik/stabil. Tingkat

kepekaan ini diklasifikasikan 3 bagian yakni stabil (tidak peka), peka, dan sangat peka. Sebagian besar lahan merupakan lahan stabil yakni sekitar 83,87% atau 17.220,19 Ha (layak), sisanya 15,23% atau 3.127,02 Ha kondisi lahannya peka (cukup layak), sedangkan di bagian selatan sangat peka terhadap erosi yakni sekitar 184,79 Ha atau 0,9% (kurang layak). Berdasarkan kondisi tekstur tanahnya, secara umum kawasan ini layak untuk dikembangkan berbagai macam kegiatan perkotaan.

3.1.4.4 Kondisi Hidrologi

a. Air Permukaan

Kabupaten Bekasi pada awalnya direncanakan sebagai daerah pertanian lahan basah. Kondisi ini terlihat dari sungai-sungai yang ada terhubungkan dengan saluran-saluran irigasi baik primer, sekunder dan tersier yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Sungai-sungai yang ada tersebut pada umumnya mengalir dari selatan ke utara.

Sumber air utama dari saluran-saluran irigasi yang ada adalah Saluran Induk Tarum Barst (Kali Malang) yang mengalir dari timur (Karawang) ke barat (DKI Jakarta). Dengan perkembangan penggunaan lahan, banyak saluransaluran yang ada berubah fungsi menjadi saluran pembuang baik industri maupun perumahan/pemukiman.

b. Air Tanah

Kondisi air tanah terkait dengan kondisi geologi. Secara umum kondisi air tanah di Kabupaten Bekasi dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) daerah

yaitu daerah utara (Kecamatan Muaragembong, Tarumajaya dan Babelan) air tanahnya sudah mengandung garam, daerah dengan air tanah yang cukup banyak meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Setu, Cibitung dan Cikarang Barat, sedangkan daerah yang air tanahnya sangat terbatas adalah daerah timur meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Serang Baru dan Cibirusah.

3.1.4.5 Kondisi Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Bekasi diklasifikasikan ke dalam 9 jenis tanah, yaitu Assosiasi Kelabu dan Alluvial Cokelat Kelabu, Assosiasi Podsolik Kuning dan Hidromorf Kelabu, Assosiasi Laltosol Merah, Latosol Coklat Kemerahan dan Leterit, Assorsiasi Gleihumus dan Alluvial Kelabu, Podsolik Kuning, Komplek Latosol Merah kekuningan, Latosol Coklat, Podsolik Merah, Komplek Grumosol, Regusol.

3.1.5 Isu-Isu Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bekasi

Isu-isu lingkungan yang berpengaruh terhadap degradasi lingkungan di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya, dan akibat perkembangan industri seakan menjadi dikotomi dengan dampak positif, terutama terhadap kondisi sosial ekonomi bilamana dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Isu yang bergulir pada umumnya bersumber pada upaya pembangunan yang seharusnya secara sadar dan terencana mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara

adil dan demokratis, selain untuk kelestarian usaha dan kegiatannya.

Peningkatan penduduk miskin terutama setelah krisis ekonomi berpengaruh kepada pola hidup dan daya beli, sehingga menjadi tekanan yang cukup besar terhadap kondisi lingkungan, terutama penyediaan sarana/prasarana penunjang dan pemanfaatan sumber daya alam. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Bekasi kurang diimbangi oleh pertumbuhan infrastruktur terutama jalan, pemenuhan air bersih, pengelolaan limbah cair domestik dan persampahan, sehingga menjadi tambahan beban bagi lingkungan, terutama kualitas badan air, air tanah dan udara.

3.1.5.1 Pencemaran Air

Di Kabupaten Bekasi ada beberapa sungai yang berfungsi cukup penting sebagai sumber air baku air bersih serta sungai yang mendapatkan beban cukup berat terutama dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Sungai-aungai tersebut pada umumnya melalui daerah-daerah yang aktivitasnya cukup tinggi, terutama industri dan perumahan/permukiman di hulunya dan daerah pertanian serta pertambakan di hilirnya. Sungai-sungai tersebut diantaranya adalah Sungai Citarum, Kalimalang (Saluran Induk Tarum Barat), Sungai Cikarang, Sungai Cilemahabang, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, CBL, Sungai Jambe, Sungai Menir, Sungai Sasakjarang, dan Sungai Bekasi.

Sungai Citarum merupakan sungai terbesar yang melintasi dan bermuara di wilayah Kabupaten Bekasi. Sungai ini juga merupakan batas alam antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang. Selain itu, sungai ini merupakan

muara dari Sungai Cibeet dan Sungai Cipamingkis. Sungai ini melintasi beberapa kabupaten mulai dari Kabupaten Bandung, Cianjur, Purwakarta, Karawang dan Kabupaten Bekasi. Pencemaran air, khususnya air sungai sering menjadi potensi konflik, terutama antara industri dan masyarakat di sekitarnya serta antara sektor industri dan pertanian.

Lokasi industri dan permukiman yang terkonsentrasi di sepanjang Jalan Tol Jakarta - Cikampek dan sepanjang Jalan Koridor Timur – Barat, sedangkan kegiatan pertanian terutama persawahan yang pada umumnya berlokasi di daerah utara menjadi permasalahan yang klasik.

Kualitas air sungai sudah terdegradasi, sungai-sungai yang dijadikan badan air penerima limbah sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan sumber air baku air minum (kelas I) bahkan banyak sungai yang cenderung menurun kualitasnya dari kelas II menjadi kelas III. Sungai-sungai yang dijadikan sumber air baku sekarang ini, yaitu Kalimalang (Saluran Tarum Barat) dan Kali Cikarang meskipun merupakan sungai yang bukan merupakan badan air penerima limbah tetapi menghadapi tekanan kualitas.

3.1.5.2 Pencemaran Udara

Kegiatan-kegiatan yang paling dominan berpotensi mencemari udara di Kabupaten Bekasi adalah transportasi dan industri. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup pesat kurang diimbangi kebijakan-kebijakan pengaturan emisi kendaraan bermotor. Pengelolaan kualitas udara dari industri masih bersifat preventif melalui laporan-laporan pemantauan kualitas udara masing-masing

industri melalui dokumen lingkungannya (RKL/RPL atau UKL/UPL).

3.1.5.3 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kegiatan industri dan rumah sakit pada khususnya tidak terlepas dari penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penggunaan B3 sebagai bahan baku maupun bahan penolong pada industri dan rumah sakit baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari.

Alternatif pengelolaan yang terbatas, keterbatasan pemahaman, teknologi dan upaya pengelolaan menjadi kendala dalam pengelolaan limbah B3. Pada saat ini di Kabupaten Bekasi industri-industri yang telah mengelola limbah B3 nya pada umumnya bekerjasama dengan PT. PPLI yang mempunyai ijin dalam pengolahan limbah B3 padat maupun cair. Pengelolaan limbah B3 dari industri yang masih mempunyai nilai ekonomi dikelola oleh pihak ke-3 dan hal ini belum sepenuhnya terkendali. Permasalahan kewenangan antara pusat dan daerah menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah B 3 oleh pihak ke-3 ini.

3.1.5.4 Pengelolaan Sampah Domestik

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2003 adalah 1.877.414 jiwa, apabila sesuai dengan standar timbulan sampah rata-rata di Indonesia, yaitu sebesar 2 liter/orang/hari, maka jumlah timbulan sampahnya adalah 3.755 m³ perhari untuk timbulan sampah dari kegiatan domestik di luar kegiatan-kegiatan lainnya seperti industri, perdagangan, kesehatan dan lain-lainnya. Persentase

pelayanan pengangkutan sampah total di Kabupaten Bekasi masih sangat rendah, yaitu 4,85 % dari seluruh jenis aktivitas, dengan pelayanan paling tinggi di jalan protokol (93%) dan terendah pelayanan sampah rumah tangga (2,34%). Sampah-sampah yang tidak terangkut oleh Dinas Kebersihan pada umumnya dimanfaatkan kembali (*recycle/reuse*) dengan perantara pemulung (seperti plastik, kaleng dan kertas), dibakar, dibuang ke TPA milik Kota Bekasi/Jakarta (Selayang *Pandang* Kebersihan, 2004).

Belum membudayanya pemisahan sampah berdasarkan jenisnya serta pemanfaatan sampah basah menjadi kompos untuk mengurangi jumlah timbulan sampah menjadi beban bagi TPA (Tempat Pembuangan Akhir). TPA untuk sampah di Kabupaten Bekasi kapasitasnya masih terbatas dan terletak di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu yang direncanakan luasnya 10 Ha. Dibangun sejak tahun 1993/1994 dan mulai berfungsi tahun 1997, kapasitas terbangun sekarang adalah seluas 7,6 Ha dari luas tersebut lahan efektif TPA adalah $\pm 4,5$ Ha, sedangkan sisanya adalah untuk sarana/prasarana $\pm 3,1$ Ha. Keterbatasan pelayanan pengangkutan sampah maupun kapasitas TPA menjadi tekanan terhadap kualitas lingkungan, terutama kualitas air (sampah yang masuk ke sungai), kualitas udara (sampah yang dibakar) dan kualitas tanah/air tanah (sampah yang ditimbun dan lindi/*leachate*) serta keindahan/kenyamanan lingkungan.

3.1.5.5 Limbah Cair Domestik

Kondisi pengelolaan limbah cair domestik pada umumnya masih

dengan sistem *on site*, air dari mandi dan cuci (*grey water*) pada umumnya langsung dibuang ke badan air tanpa pengolahan sedangkan air tinja (*black water*) pada umumnya dialirkan ke *Septic Tank*. Sistem *off site* baru diterapkan di beberapa perumahan untuk golongan ekonomi menengah ke atas. Limbah cair domestik yang berasal dari air cucian, air buangan kamar mandi dan toilet juga merupakan sumber pencemar air sungai dan air tanah.

3.2 Kajian Umum Kecamatan Cikarang Barat

Kecamatan Cikarang Barat merupakan kecamatan hasil pemekaran sebagian wilayah dari Kecamatan Cibitung, Cikarang dan Setu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001. Luas Wilayah Kecamatan Cikarang Barat 5.369 Ha yang terbagi menjadi sebelas desa. Secara administrasi Kecamatan Cikarang Barat dapat dilihat pada Peta 1.2 di halaman 13. Jumlah penduduk pada tahun 2005 adalah 155.566 jiwa dengan kepadatan penduduk 34 jiwa/Ha.

Kecamatan Cikarang Barat dalam RUTRW Kabupaten Bekasi termasuk Wilayah Pengembangan (WP) III : Bekasi Bagian Tengah/koridor Timur-Barat dengan peruntukan perumahan/pemukiman, industri, jasa dan perdagangan, pariwisata serta pemerintahan.

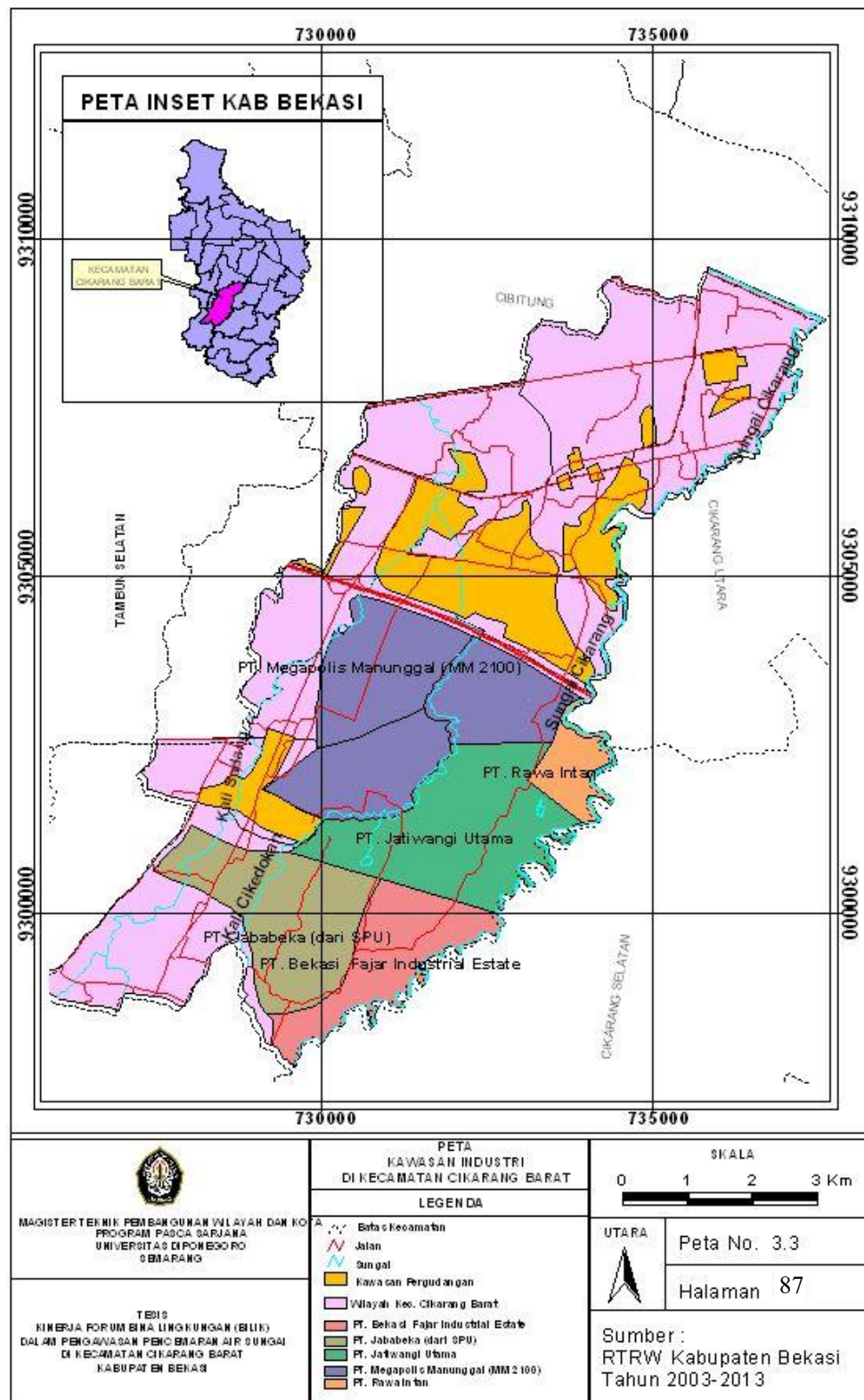
Kecamatan Cikarang Barat merupakan salah satu kecamatan dimana terdapat lokasi kegiatan industri besar, sedang dan kecil, baik di dalam kawasan industri maupun zona industri. Kawasan industri antara lain KI. MM 2100, KI. Bekasi Fajar, KI. Zipper Indonesia dan KI. Gobel Dharma Nusantara dengan jenis

industri yang bervariasi antara lain otomotif, tekstil, makanan dan minuman, industri kimia, percetakan dan farmasi. Selain kawasan industri, pada zona industri juga terdapat industri besar antara lain: industri farmasi, makanan dan minuman, industri kimia, percetakan, tekstil, *laundry*, manufaktur, karoseri serta pergudangan. Gambar 3.3 memperlihatkan peta lokasi industri dan pergudangan di Kecamatan Cikarang Barat.

Wilayah Kecamatan Cikarang Barat dilewati dua sungai, yaitu Sungai Cikedokan dan Sadang. Sungai tersebut di bagian hulu berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian dan perikanan, sedangkan pada bagian tengah sungai tersebut difungsikan sebagai saluran pembuang limbah industri, baik yang berlokasi di kawasan maupun di zona industri menuju Sungai (kanal) Cikarang Bekasi Laut (CBL). Hasil pemeriksaan kualitas air Sungai Sadang dan Cikedokan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Kabupaten Bekasi pada tahun 2006 untuk parameter BOD dan COD melampaui Baku Mutu air permukaan (PP no. 82 Tahun 2001 kelas III), seperti terlihat pada Tabel III.4 dan secara tematik dapat dilihat pada Gambar 3.4.

3.2.1 Pembentukan Forum BILIK

Menyadari semakin tingginya tingkat pencemaran dan menurunnya kualitas air pada sungai-sungai di Wilayah Kabupaten Bekasi, maka pemanfaatan dan pemeliharaan sub DAS oleh masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya baik secara hak, kewajiban dan tanggung jawab harus dilakukan secara bersama, seimbang dan berkesinambungan.



TABEL III.4
TABEL HASIL ANALISIS KUALITAS AIR SUNGAI CIKEDOKAN DAN SADANG TAHUN 2006

No.	PARAMETER	BAKU MUTU *)	SATUAN	HASIL ANALISIS											
				Sungai Cikedokan				Sungai Sadang							
				Titik Hulu	Titik Tengah	Titik Hilir	Titik Hulu	Titik Tengah	Titik Hilir	Titik Hulu	Titik Tengah	Titik Hilir	Titik Tengah	Titik Hilir	Titik Hilir
A.	FISIKA			2-Oct-06	2-Nov-06	2-Oct-06	2-Nov-06	2-Oct-06	2-Nov-06	2-Oct-06	2-Nov-06	2-Oct-06	2-Nov-06	2-Oct-06	2-Nov-06
1	Suhu (insitu)	Udara ± 3°C	° C	32,3	33,0	34,5	33,7	35,6	36,4	30,3	33,4	33,4	33,4	33,1	33,8
2	Zat padat terlarut (TDS)	1000	mg/l	2,48	3,460	739	490	915	704	992	2,86	811	812	771	783
3	Zat padat tersuspensi (TSS)	400	mg/l	396	1,030	256	293	311	345	12	63	21	28	194	114
4	Kekeruhan	-	NTU	462	920	158	204	208	279	14	47	32	31	137	107
B	KIMIA														
1	pH (Insitu)	6-9	-	2,21	2,32	7,00	7,88	8,17	9,14	3,97	2,31	7,43	7,58	7,44	7,96
2	Oksigen terlarut (DO) insitu	3	mg/l	0		2,8	2,8	2,4	2,4	3,6	2,4	3,6	3,2	2,0	2,8
3	Fenol	1	mg/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
4	Minyak Lemak	1	mg/l	< 0,2	8,6	< 0,2	0,4	1,6	0,9	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
5	Nitrat (NOyN)	20	mg/l	2,3	2,1	0,5	1,1	0,7	0,6	2,3	2,1	6,2	1,3	< 0,1	0,5
6	Nitrit (NO2-N)	0,06	mg/l	0,337	0,419	0,026	0,066	0,033	0,089	0,048	0,368	1,721	0,406	< 0,002	0,075
7	Seno (Zn)	0,05	mg/l	0,85	0,62	0,14	0,24	0,16	0,16	0,81	0,55	0,21	0,21	0,26	0,31
8	Slanida €N)	0,02	mg/l	< 0,005	< 0,005	< 0,006	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,006	< 0,005	< 0,005	< 0,005
9	Surfaktan amon (MBAS)	0,2	mg/l	0,34	0,67	0,20	0,20	0,14	0,16	0,17	0,07	0,16	0,20	0,49	0,16
10	BODs	6	mg/l	63,4	153,4	12,7	15,2	20,2	23,2	2,7	15,3	6,0	4,0	24,9	12,6
11	COD	50	mg/l	387,3	929,2	76,3	53,8	123,6	142,8	16,5	93,8	37,1	24,5	152,4	77,5
12	Besi (Fe)	-	mg/l	24,71	26,04	< 0,06	0,62	< 0,06	0,58	3,93	23,79	< 0,06	0,21	0,16	0,19
13	Mangan (Mn)	-	mg/l	3,53	3,77	< 0,02	0,15	< 0,02	0,16	2,14	1,42	0,97	0,74	0,33	0,16
14	Amonia (NH ₃)	-	mg/l	22,67	38,16	0,73	0,76	0,83	0,75	21,66	33,89	5,48	5,42	0,91	0,47
15	Sulfat(SO<i>4</i>)	-	mg/l	276,0	10,4	76,0	97,7	90,2	121,6	150,0	7,9	50,0	72,1	68,4	94,0
16	Klorida (Cl)	-	mg/l	1.151,0	1.548,2	165,0	175,1	200,6	230,0	461,7	1.333,3	142,8	179,9	157,0	184,0

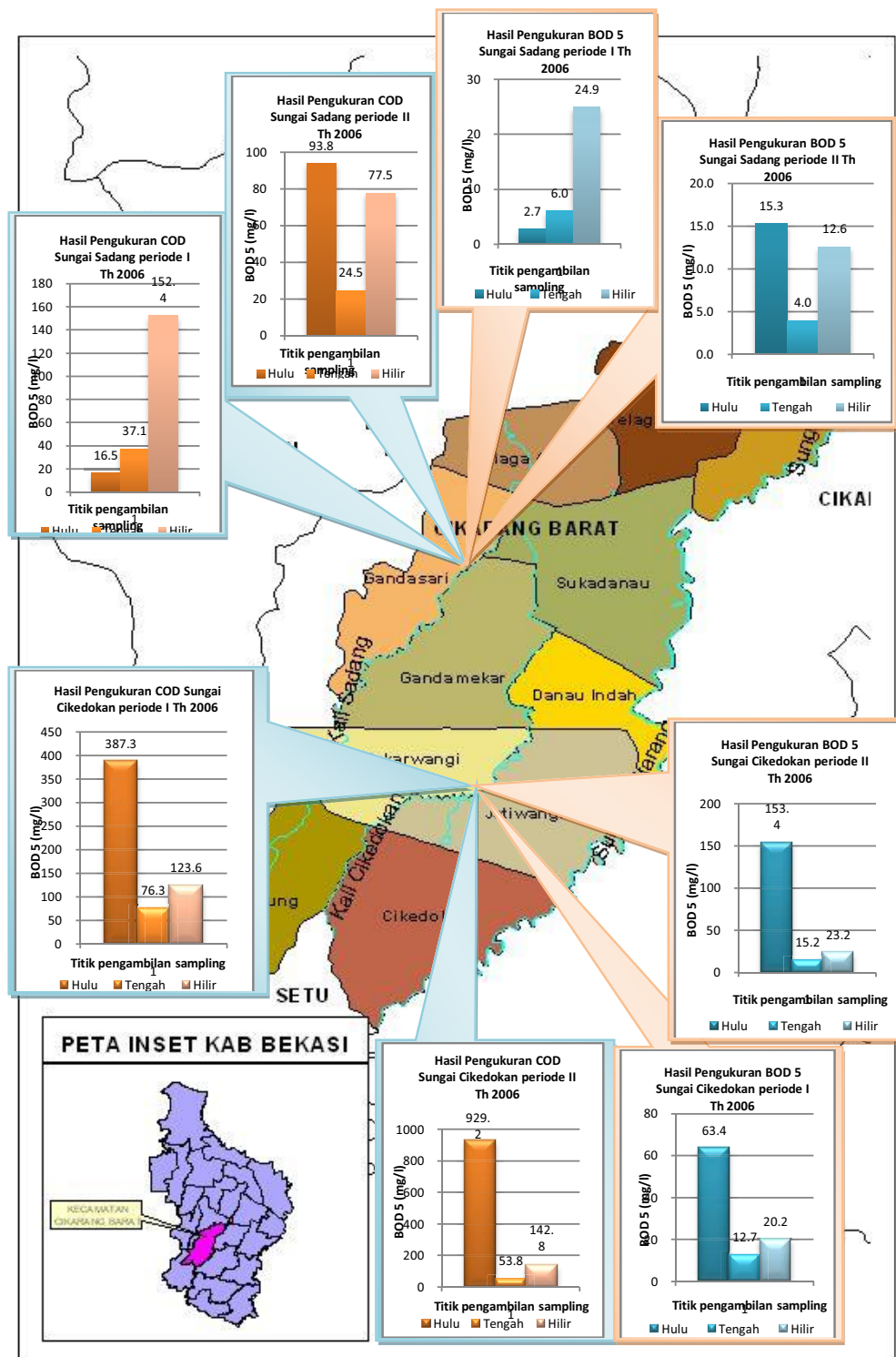
Sumber: Dinas PDLP Kabupaten Bekasi 2006

Keterangan

*) Baku Mutu Air Permukaan Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001

Kelas III: Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air

tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut.



GAMBAR 3.4
HASIL PENGUKURAN BOD DAN COD
PADA SUNGAI SADANG DAN CIKEDOKAN TAHUN 2006

Peran pemerintah dalam pengelolaan sub DAS adalah sebagai fasilitator, pengarah dan pembina bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah aliran sungai (sub DAS). Keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah baik masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat luas. Pelaku usaha masih menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai beban bagi ongkos produksi, masyarakat luas masih terfokus pada perbaikan kondisi ekonomi. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks, sehingga tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi masih rendah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk Forum Bina Lingkungan (BILIK). Forum BILIK tersebut merupakan sarana/forum komunikasi antara masyarakat dan pengusaha/industri yang berada dalam suatu DPS (Daerah Pengaliran Sungai) untuk bekerjasama saling tukar menukar informasi serta bersama-sama mengelola industrinya agar tidak mencemari suatu DPS.

Pada tanggal 28 Agustus 2003 forum bilik mulai dibentuk, yaitu:

- 1) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Sadang Hulu, peserta terdiri dari tokoh masyarakat, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), aparat Desa Telajung, Desa Mekar Wangi, Desa Ganda Mekar dan unsur pengusaha/industriawan yang berlokasi di sekitar Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Sadang Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Annas F.S. (Pengelola Kawasan PT. YKK Zipper)
- b. Wakil Ketua : Midik Prabowo (Pengurus BPD Desa Gandasari)
- c. Sekretaris : Abdul Rojak (PT. Chuhatsu Indonesia)
- d. Bendahara : Mikas PL. (Pengurus BPD Desa Mekar Wangi)
- e. Anggota :
 - 1. Subandi (Pengurus BPD Mekar Wangi);
 - 2. Mesin (Aparat Desa Gandasari);
 - 3. Wanda (Aparat Desa Gandasari);
 - 4. M. Kosim (Aparat Desa Gandasari);
 - 5. H. A. Jalil (Aparat Desa Mekarwangi);
 - 6. Mento (Tokoh Masyarakat Desa Gandasari);
 - 7. Moch. Hatta (Tokoh Masyarakat Desa Telajung);
 - 8. H. Soekamto (PT. Taiyo Sinar Teknik);
 - 9. Waris Aris Santoso (PT. Omega Primawood);
 - 10. M. Karmat (Aparat Desa Jatiwangi).

2) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Sadang Hilir, peserta terdiri dari tokoh masyarakat, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), aparat desa Ganda Sari, Desa Telaga Asih dan unsur pengusaha/industriawan di sekitar Sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Sadang Hilir, dengan susunan pengurus:

- a. Ketua : Agus Purwanto (Pengelola Kawasan PT. Gobel Dharma Nusantara)
- b. Wakil Ketua : M. Sukri (PT. Coca Cola Bottling Indonesia)
- c. Sekretaris : Made Ariwibawa (PT. Sosro Cibitung)
- d. Bendahara : Suhardi Citro Waryono (Pengurus BPD Desa Telaga Asih)
- e. Seksi-Seksi :
 - 1. Seksi Humas : - Heri Asfianto (PT. Andini Sakti).
- M. Nisan (Pengurus BPD Telaga Asih).
 - 2. Seksi Teknis : - Wardo (PT. Coca Cola Bottling Indonesia).
- Arnadi (Pengurus BPD Desa Telaga Asih).
 - 3. Seksi Hukum : - Nahrowi S. (Aparat Desa Telaga Asih).
- Rio Hendra Purnama (PT. Topan Samporna)
- M. Basri (Pengurus BPD Telaga Asih).

3) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Cikedokan, peserta terdiri dari tokoh

masyarakat, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), aparat Desa Jatiwangi, Sukadanau, Cikedokan dan unsur pengusaha/industriawan di sekitar Sub-DAS Kali Cikedokan, dengan susunan pengurus:

- a. Ketua : Indra Kusnanda (Pengelola KI MM 2100)
- b. Wakil Ketua : Edi Mulyono (Aparat Desa Sukadanau)
- c. Sekretaris : MI Astheria (PT. Indo Aluminium)
- d. Bendahara : Nico Hariyanto (PT. Essar Dhanan Jaya)
- e. Anggota:
 - 1. Susiyanto (PT. Lucky Print Abadi)
 - 2. Nana Suryana (PO. Sinar Jaya)
 - 3. Slamet (PT. Harina dan PT. Kalatham)
 - 4. M. Nuryana (PT. Indofood Sukses Makmur)
 - 5. Muwari (PT. Nof Mas Chemicals Industries)
 - 6. Wahyu Nugroho (PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia)
 - 7. M. Fahrudin (Pengelola Kawasan Industri PT. MM 2100)
 - 8. Seluruh Perusahaan yang Berada di Wilayah Kali Cikedokan.

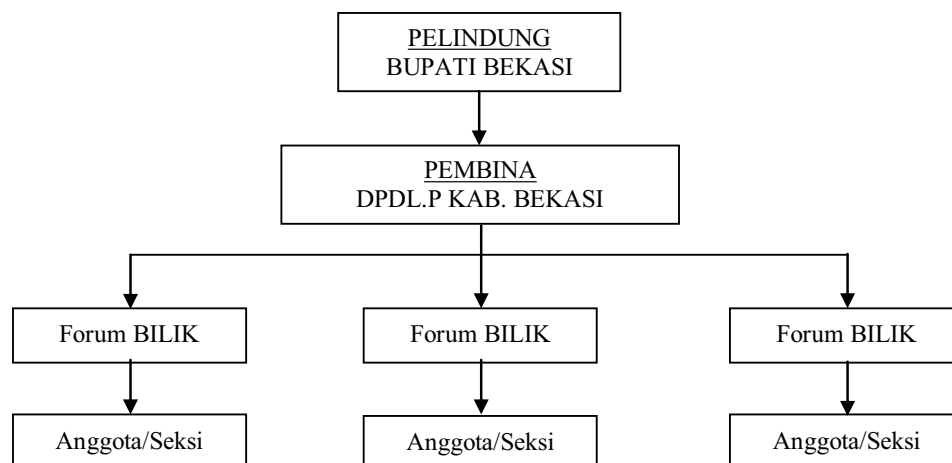
3.2.2 Kelembagaan Forum BILIK

Organisasi forum bilik yang telah di bentuk kemudian dikuatkan/disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan, dengan kegiatan operasional maupun administrasi, meliputi:

- a. Menyusun rencana pengawasan, penanggulangan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di sekitar Kali/Sungai/Sub-DAS Sadang Hulu, Sadang Hilir dan Cikedokan di Wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi secara terpadu;
- b. Membantu pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka penataan Kali/Sungai/Sub-DAS Sadang Hulu, Sadang Hilir dan Cikedokan untuk menanggulangi penyumbatan serta pengikisan alur sungai;

- c. Mengadakan pertukaran informasi antarsumber kegiatan dalam upaya penataan, penanggulangan dan pengendalian pencemaran lingkungan dengan memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan pada setiap kegiatan yang diperkirakan akan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Pengurus Forum BILIK setiap tiga bulan sekali menyampaikan laporan kepada Bupati Bekasi melalui Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Dana dalam pelaksanaan kegiatan Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) berasal dari anggaran masing-masing perusahaan yang menjadi anggota dari tiap-tiap Forum Bilik. Struktur organisasi Forum Bilik seperti terlihat pada Gambar 3.5.



Sumber: DPDLP Kabupaten Bekasi, 2003

GAMBAR 3.5
STRUKTUR ORGANISASI FORUM BILIK.

BAB IV

ANALISIS KINERJA FORUM BILIK SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam metodologi penelitian, telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif didukung dengan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan lapangan (observasi). Pada bab ini akan dilakukan analisis dari hasil penelitian dan pengamatan lapangan.

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, terlebih dulu akan dikaji kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial lokasi penelitian; keberadaan Forum Bilik mulai dari proses pembentukan, organisasi dan kegiatan-kegiatan Forum Bilik dalam pengelolaan lingkungan hidup; peran *stakeholder* (masyarakat, industri dan pemerintah) dalam mendukung forum bilik. Selanjutnya akan dilakukan analisis kinerja dari Forum Bilik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dilakukan analisis komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari Forum Bilik.

Analisis dilakukan dari awal pada saat data diperoleh. Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan direduksi untuk mendapatkan bahan analisis yang disesuaikan dengan fokus dari permasalahan. Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi atas data-data tersebut. Proses ini pada akhirnya akan ditulis kembali berdasarkan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam kerangka yang bersifat sementara (Miles, M and Hubberman, A. 1992, 17 – 21).

Pembahasan yang berupa paparan akan disusun dalam kerangka penulisan

yang mengarah atau memiliki keterkaitan informasi satu dengan yang lainnya. Hasil analisis diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

4.1 Analisis Kondisi Fisik Lingkungan dan Kondisi Sosial Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di sekitar Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sadang dan Cikedokan dengan batasan bahwa DAS tersebut secara administrasi masuk ke dalam Wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Salah satu pertimbangannya bahwa di wilayah Kecamatan Cikarang Barat terdapat lokasi industri baik di kawasan industri maupun zona industri. Selain itu, Kecamatan Cikarang Barat dalam RTRW Kabupaten Bekasi tata guna lahannya diperuntukkan sebagai zona industri pergudangan dan perumahan.

4.1.1 Kondisi Fisik dan Lingkungan Sub DAS Sadang dan Cikedokan

Wilayah Kecamatan Cikarang Barat terbagi menjadi sebelas desa dengan luas wilayah 5.369 Ha. Di Wilayah Kecamatan Cikarang Barat mengalir dua buah sungai, yaitu Sungai Sadang dan Cikedokan.

Hulu Sungai Cikedokan berasal dari rawa di Desa Cibening dan Ciledug Kecamatan Setu yang bersatu dengan anak Sungai Cikarang. Panjang Sungai Cikedokan diperkirakan \pm 8 km dengan lebar antara 3-6 meter, aliran sungai melintasi Kecamatan Setu (Desa Cibening dan Ciledug); Cikarang Barat (Desa Cikedokan, Talajung, Jatiwangi, Mekarwangi, Gandamekar, Danau Indah, dan Sukadanau) dan bersatu/bertemu dengan Sungai Sadang.

Sedangkan hulu Sungai Sadang berasal dari Wilayah Kabupaten Bogor

dan Rawa Burangkeng di Kecamatan Setu (bagian selatan Wilayah Kabupaten Bekasi). Aliran Sungai Sadang melintasi Desa Taman Rahayu, Burangkeng, Ciledug dan Tamansari di Kecamatan Setu, sedangkan di Kecamatan Cikarang Barat melintasi Desa Talajung, Mekarwangi, Gandamekar, Gandasari dan Telaga Asih dan bermuara di Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung.

Sungai Sadang dan Cikedokan merupakan sungai alam yang awalnya dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar sungai untuk keperluan domestik, pertanian dan perikanan. Hal ini diperkuat dengan informasi hasil wawancara dari beberapa sumber data sebagai berikut:

“dulu kali cikedokan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama untuk pengairan sawah, airnya bening bisa untuk mandi dan mencuci. Kondisi saat ini air kali cikedokan dimanfaatkan untuk sawah dan kolam ikan, masyarakat tidak berani mandi di kali lagi, air terasa gatal mungkin sudah tercemar.” [FL. 1.7/1 -4]

“...kondisi air kali sadang di udik ma bagus masih bening, sedamg mulai desa talajung kesini sampe lewat kawasan sudah kotor kadang bau...” [FL. 1.1/3 -5]

Wilayah Kabupaten Bekasi yang secara geografis berbatasan dengan DKI Jakarta, topografi yang relatif datar dan kemudahan transportasi (Jalan Tol Jakarta-Cikampek) menjadikan Wilayah Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah tujuan pengembangan lokasi kawasan industri. Seiring dengan perkembangan tersebut, menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana dan prasarana termasuk saluran pembuang limbah.

Dengan berkembangnya industri potensi untuk mencemari lingkungan juga akan semakin besar. Selain itu berkembangnya industri akan membuat

tekanan terhadap daya dukung lingkungan misalnya perubahan fungsi sungai-sungai di Kabupaten Bekasi dari sungai alam menjadi sungai dengan peruntukan sebagai saluran pembuang limbah industri. Hal ini seperti yang terjadi dengan Sungai Sadang dan Cikedokan yang ditetapkan sebagai sungai dengan fungsi saluran pembuang limbah industri. Berikut informasi hasil wawancara dengan sumber data tentang fungsi Sungai Sadang dan Cikedokan:

”...ada sungai sebagai sumber air baku air minum, saluran pembuang lmbah dan saluran irigasi. Sungai yang diperuntukkan sebagai sumber air baku air minum adalah Sungai Cikarang, sedangkan Sungai Sadang dan Cikedokan termasuk dalam Sungai sebagai saluran pembuang limbah...” [F L. 3.4/1-4]

Sementara itu, jika ditinjau dari aspek lingkungan, industri memberikan kontribusi pencemaran yang cukup besar antara lain yang terkandung dalam bahan baku, bahan kimia, bahan penolong serta material pendukung lainnya. Dalam proses produksi banyak dihasilkan sisa dari kegiatan tersebut yang lazimnya disebut limbah yaitu air limbah, emisi udara, dan limbah padat baik bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun non B3.

Sebagai gambaran hasil pengamatan di lapangan (*observasi*) terhadap kondisi air Sungai Sadang dan Cikedokan seperti terlihat pada Gambar 4.1 dan 4.2. Hasil diskusi dengan beberapa sumber data diperoleh gambaran yang tidak jauh berbeda, dimana secara kasat mata kondisi air di kedua sungai tersebut. Berikut hasil wawancara dengan beberapa sumber data:

”...kondisi air cikedokan secara kasad mata sangat mengawatirkan, misalnya di belakang PT. Coca-Cola, hal ini karena masih ada sebagian perusahaan yang belum sempurna mengolah air limbahnya sebelum dibuang ke sungai...” [FL. 2.1/1-4]

”...kondisi air Kali Sadang di udik mah bagus masih bening, sedamgkan

mulai Desa Talajung kesini sampe lewat kawasan sudah kotor kadang bau...” [FL. 1.1/3 -5]



Sumber: Hasil Observasi, 2007

GAMBAR 4.1
KONDISI AIR SUNGAI CIKEDOKAN DI BELAKANG PT. COCA-COLA
DESA SUKADANAU, KEC. CIKARANG BARAT



Sumber: Hasil Observasi, 2007

GAMBAR 4.2
KONDISI AIR SUNGAI SADANG DI DESA TALAJUNG
KEC. CIKARANG BARAT

Hasil penggalan informasi dengan wawancara dan diskusi dengan sumber data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam kesimpulan sementara sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 1:

Di satu pihak industri menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat namun dilain pihak industri juga menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik, dampak pencemaran yang ditimbulkannya bukan hanya merugikan masyarakat, bahkan dapat membahayakan masyarakat.

4.1.2 Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Cikarang Barat.

Perkembangan penduduk di Kecamatan Cikarang Barat 3 tahun terakhir (2003-2005), menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat yang disebabkan oleh masuknya pendatang baru (faktor migrasi) seperti yang terlihat pada Tabel IV.1. Dari hasil sensus penduduk tahun 2000 di Kabupaten Bekasi laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,23% yang terdiri migrasi 2,33% dan alamiah 1,90%.

TABEL IV. 1
TABEL DATA KEPENDUDUKAN KECAMATAN CIKARANG BARAT
KABUPATEN BEKASI

No.	Kependudukan	Tahun		
		2003	2004	2005
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	146.016	149.594	155.566
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)	27,20	27,86	28,97
3.	Laju Pertumbuhan (%)		2,45	3,99

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2006.

Sebelum perkembangan industrialisasi di Wilayah Kabupaten Bekasi pada dekade tahun 1980-an, Kecamatan Cikarang Barat (dulunya Kecamatan

Cibitung) merupakan daerah pertanian. Sektor usaha pertanian merupakan basis utama perekonomian masyarakat daerah ini. Dari hasil penggalian pendapat dalam masyarakat diperoleh informasi bahwa sebelum adanya kawasan industri, sebagian besar penduduk di Kecamatan Cikarang Barat bekerja pada sektor pertanian, karena kondisi alam, ekonomi dan sosial budayanya sangat mendukung keberadaan sektor ini, seperti terungkap dari hasil wawancara dengan sumber data sebagai berikut:

"...Dulu masyarakat Desa Mekarwangi pekerjaannya petani, sawah subur, air Kali Sadang dan Cikedokan bisa buat mengairi sawah. Sekarang sawah-sawah tadi sudah banyak yang dijual dijadikan pabrik..". [Sos.1.1/1 -3]

"...sebelum akhir tahun 80-an Daerah Cibitung menjadi salah satu lumbung padi, baru sekitar tahun 90-an banyak muncul kawasan industri dan perumahan..." [Sos.1.4/1 -3]

Perkembangan industri mengakibatkan lahan pertanian semakin menyempit. Penyempitan lahan persawahan, mengakibatkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan. Banyak juga petani yang tidak lagi memiliki sawah, dan menjadi buruh tani musiman.

Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Cikarang Barat dengan masuknya industri ke daerah ini, mengubah pola mata pencaharian penduduk yang semula didominasi peran sektor pertanian kepada nonpertanian, yaitu industri, perdagangan dan jasa. Dampak sosial yang terasa berat dirasakan bagi penduduk yang semula sebagai petani yaitu ketidaksiapan mereka untuk bekerja pada sektor yang lain. Hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Mekarwangi yang bekerja sebagai petani mengatakan:

"...pekerjaan saya petani, bertani sekarang ribet, kagak ada untungnya, lahan sempit itupun tanah udah milik pabrik, belum lagi tenaga kerja mahal. Mau jadi kuli pabrik, kagak punya keahlian, sekolah timbang lulusan SMP..." [Sos.1.5/1 -4]

Dampak lain keberadaan industri bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang ekonomi misalnya terbukanya lapangan kerja, munculnya usaha-usaha kontrakan, usaha dagang dan jasa lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh sumber data sebagai berikut:

"...banyaknya kawasan industri didaerah sini membuat sawah-sawah banyak yang terkena gusuran. Hasil dari jual tanah saya jadikan modal untuk bikin kontrakan..." [Sos.1.8/1-3]

Kecenderungan penduduk asli untuk menjual tanah dan beralih mata pencaharian, telah meningkatkan kemampuan ekonomi sebagian penduduk di Kecamatan Cikarang Barat. Dengan dimilikinya sejumlah uang, baik dari hasil penjualan tanah maupun dari hasil mata pencaharian mereka, ternyata diikuti peningkatan biaya hidup. Hal ini tidak terlepas dari tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan hidup yang mengiringi proses pengkotaan, seperti sarana transportasi dan komunikasi, sarana kesehatan, pendidikan, hiburan, perdagangan, dan sebagainya, telah menarik penduduk asli untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang ada di lingkungan masyarakatnya.

Dengan berubahnya kepemilikan dan penggunaan lahan, akan mengubah lahan pekerjaan mereka. Dengan demikian, pertemuan tersebut tidak bisa dilangsungkan lagi dalam satu tempat karena kesibukan mereka masing-masing yang sudah berbeda-beda, sehingga pertemuan di antara penduduk asli lebih banyak dalam situasi yang lebih formal, seperti dalam kegiatan pengajian, siskamling, dan kegiatan-kegiatan kampung lainnya.

Masuknya pendatang baru juga mempengaruhi budaya penduduk asli, dengan bertambah besarnya arus pendatang ke daerah ini, pertemuan-pertemuan antara penduduk asli melalui kegiatan RT/RW pun mulai berkurang, karena mereka pun terbawa oleh kebiasaan baru yang dibawa oleh para pendatang yang pada umumnya sibuk dengan pekerjaannya, sehingga banyak kegiatan-kegiatan kampung seperti siskamling, pengajian, arisan tidak bisa diikuti dan sebagai penggantinya mereka membayar iuran sebagai pengganti kegiatan. Kebiasaan ini juga banyak diikuti oleh penduduk asli, yang mulai menunjukkan kesibukan dengan aktivitas pekerjaannya.

“...disini kalo ngadain rapat RT harus malam minggu, masyarakat susah untuk berkumpul masing-masing sibuk dengan kerjanya, kebanyakan pekerja di pabrik kena shift, ada yang masuk malam, siang dan pagi...”
[Sos.1.9/1 -3]

Hasil penggalan informasi dengan wawancara diperoleh fenomena seperti yang terpaparkan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 2:

Tingginya heterogenitas menyebabkan masing-masing anggota masyarakat (individu) tidak dapat lagi mengembangkan pola-pola hubungan yang intensif, melainkan hubungan yang bersifat impersonal, karena kesibukan masing-masing dan latar belakang sosial budaya yang beragam.

4.1.3 Sintesis Analisis Kondisi Fisik Lingkungan dan Kondisi Sosial Lokasi

Penelitian

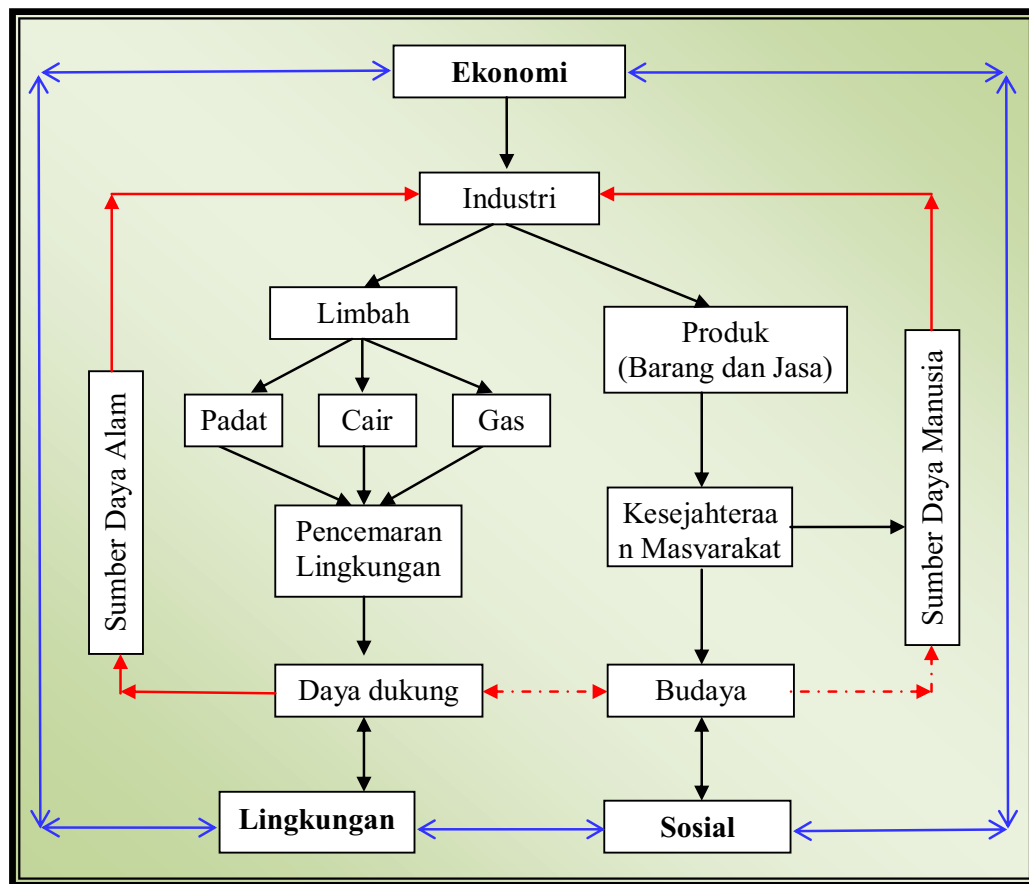
Dari analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Kegiatan pembangunan di berbagai bidang termasuk industri yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Proses produksi berbagai industri dengan berbagai teknologi dan bahan yang digunakan menghasilkan berbagai jenis limbah, yaitu limbah cair, padat dan gas. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pihak industri harus melakukan upaya pengelolaan dan pengendalian terhadap limbah yang dihasilkan dengan sebaik-baiknya dan benar, sehingga dapat memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan sebelum masuk atau dibuang ke media lingkungan. Pada praktiknya perkembangan teknologi tidak sepenuhnya diikuti dengan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai kasus pencemaran lingkungan seperti: pencemaran air sungai, danau, situ, waduk, sumur-sumur penduduk, polusi udara sekitar pabrik, kebauan, bising dan lain-lain.

- Masuknya pendatang baru (para pekerja pada sektor industri) yang diikuti dengan berkembangnya komplek-komplek pemukiman dan pembangunan-pembangunan fisik lainnya, sedikit demi sedikit mengubah hubungan sosial sesama penduduk asli. Ketika mereka masih bekerja pada sektor pertanian hubungan di antara penduduk asli masih bisa berlangsung, misalnya waktu bekerja di sawah atau di kebun. Perubahan nilai dalam hubungan sosial ini diidentifikasi oleh Soedjito (1987) sebagaimana dikutip dalam Insaf (2004: 92) dikarenakan adanya peningkatan peredaran uang di daerah pedesaan. Pada masyarakat dengan peredaran uang yang terbatas, jasa dipergunakan sebagai alat penukar. Manifestasinya, tercipta gotong royong dan sifat tukar menukar jasa

yang mengakibatkan saling ketergantungan. Sebaliknya, di dalam masyarakat dengan peredaran uang yang intensif, masyarakat dapat berhubungan dengan orang lain tanpa saling mengenal dan melihat, sehingga saling ketergantungan menjadi menipis. Secara diagram, terlihat seperti pada Gambar 4.3.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 4.3
KETERKAITAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN

4.2 Analisis Pembentukan Forum Bilik

Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai salah satu media peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengawasan pencemaran air sungai, yang dibentuk di sekitar daerah aliran sungai (Sub DAS) dengan keanggotaan terdiri dari masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan) dan pengusaha/industriawan.

Dalam subbab ini akan dilakukan analisis pembentukan Forum Bilik yang diawali dari latar belakang, proses pembentukan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Bilik tersebut.

4.2.1 Latar Belakang Munculnya Forum Bilik

Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) di Kabupaten Bekasi pertama kali dibentuk pada tahun 1996 sebelum ada pemisahan antara Kabupaten dan Kota Bekasi. Ide Forum Bilik muncul atas inisiatif pemerintah, dimana pada awalnya beranggotakan para pengusaha/industriawan. Forum Bilik ini bertujuan agar industri-industri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai wadah untuk berkomunikasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Pada tahun 1996, dibentuk Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) yaitu sebuah forum komunikasi yang beranggotakan para perusahaan/industri (SK Bupati Bekasi No. 660.1/SK-859/LH/1996, tanggal 3 Mei 1996), forum ini dibentuk menurut lokasi perusahaan dengan pendekatan Sub DAS. Ide awalnya dari pemerintah, kalo tidak salah pencetusnya Pak Supandi (saat itu masih Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi)... ... tahun 2003 oleh Pak Mastar Forum Bilik tersbut di restrukturisasi (disesuaikan dengan wilayah administrasi karena ada pemisahan wilayah antara kabupaten dan kota)” [FB .3.1/1-8]

Filosofi desentralisasi yang ingin menjadikan rakyat sebagai subyek

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengilhami Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk merestrukturisasi Forum Bilik yang telah berjalan. Berikut hasil penelusuran informasi tentang latar belakang munculnya Forum Bina Lingkungan, seperti hasil wawancara dengan sumber data sebagai berikut:

“...Forum Bilik awalnya merupakan forum komunikasi antarperusahaan/industri yang tentunya beranggotakan masyarakat industri. Pada tahun 2003 oleh pemerintah daerah dibentuk lagi (restrukturisasi, peneliti) berdasarkan lokasi industri dengan SubDAS serta keanggotaannya tidak saja masyarakat industri tetapi juga masyarakat umum di sekitar industri...” [FB.2.2/1 -5]

“...Forum Bilik muncul sebagai salah satu cara pengawasan pencemaran lingkungan. Dengan berkembangnya industri maka potensi untuk mencemari lingkungan akan semakin besar, sedangkan sumber daya manusia (SDM) pemerintah sebagai pengawas terbatas. Untuk itu pemerintah berinisiatif membentuk Forum Bilik yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sehingga ada kewenangan dari Forum Bilik untuk melaporkan jika ada terjadi pencemaran. ... seharusnya industri dan masyarakat lebih berpartisipasi misalnya dana kegiatan Forum bilik berasal dari industri (forum bilik yang mandiri)...” [FB.3.2/1 -6 dan 17-19]

Rotasi, mutasi maupun promosi pejabat dalam lingkungan pemerintah merupakan hal yang sudah biasa terjadi dengan berbagai macam alasan bahkan tidak menutup kemungkinan kepentingan politis. Hal ini juga terjadi pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Kabupaten Bekasi. Dari informasi yang diperoleh, dalam waktu tiga tahun kegiatan restrukturisasi dan pembentukan Forum Bilik dilakukan oleh tiga pejabat yang berbeda. Berikut hasil wawancara dengan sumber data dari unsur pemerintah daerah:

“... latar belakang dibentuknya Forum Bilik yaitu dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama pencemaran sungai. Ide awal pembentukan Forum Bilik dari pemerintah dengan harapan proses pengawasan bisa tumbuh dari bawah/masyarakat (bottom up), harapannya setelah itu masyarakat bisa mandiri. Ide ini

dilatar belakangi karena keterbatasan aparat pemerintah, misalnya keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan jam kerja dll. Selain itu juga untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.... mungkin anda pernah mendengar atau membaca berita-berita di media masa tentang tercemarnya beberapa sungai di Bekasi. Salah satu penyebabnya karena lemahnya pengawasan terhadap industri sebagai akibat keterbatasan SDM yang dimiliki, misalnya keterbatasan waktu kerja, disamping adanya perusahaan yang 'nakal' sering membuang limbah pada malam hari, apalagi sehabis hujan.”. [FB.3.3/1 -11]

Penggalan informasi pembentukan Forum Bilik selain dari sumber data yang berasal dari pemerintah/institusi juga dilakukan wawancara dengan anggota dari Forum Bilik. Dari hasil wawancara terhadap anggota Forum Bilik diperoleh informasi/gambaran tentang latar belakang pembentukan Forum Bilik yang tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut di atas yaitu:

“Forum Bilik dibentuk atas inisiatif pemerintah tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan industri dalam pengelolaan lingkungan hidup.” [FB.2.3/1 -3] [FB.2.5/1 -2] dan [FB.2.6/1 -2]

Dari paparan-paparan yang telah disampaikan di atas, kemudian dituangkan dalam kesimpulan sementara sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 3:

Forum Bina Lingkungan sebagai wujud partisipasi masyarakat sebagai salah satu strategi pengawasan dan pengendalian pencemaran air dalam pengelolaan sungai. Masyarakat memiliki fungsi kontrol dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi. Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai salah satu media partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dibentuk di sekitar daerah aliran sungai (Sub DAS) dengan keanggotaan terdiri dari masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan) dan pengusaha/industriawan.

Kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya dapat diwujudkan dengan meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat serta

ketanggapsegeraan masyarakat. Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Selain itu, meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

4.2.2 Proses Pembentukan Forum Bilik dalam Kerangka Perencanaan

Proses perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha yang memiliki titik fokus untuk mencapai satu kondisi keseimbangan dalam konteks *problem solving*, *future oriented* dan *resource allocation*.

Menurut Conyers (1994), perencanaan pembangunan cenderung untuk dianggap bukan hanya sebagai kegiatan terbatas saja, tetapi sebagai bagian dari suatu proses pembangunan yang kompleks, melibatkan beberapa kegiatan/tahapan:

1. Identifikasi tujuan umum dan kenyataan yang ada.
2. Formulasi strategi pembangunan yang luas guna mengatasi kenyataan yang ada.
3. Penerjemahan strategi yang ada ke dalam bentuk rencana dan proyek.
4. Implementasi program dan proyek.
5. Pemantauan terhadap implementasi dan hambatan yang timbul untuk pencapaian tujuan serta kenyataan.

Berikut akan dianalisis tahapan pembentukan forum bilik dalam kerangka

perencanaan berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari sumber data. Wawancara dilakukan terhadap sumber data yang merupakan anggota forum bilik, baik dari masyarakat maupun industri. Selain itu, juga dilakukan wawancara terhadap sumber data dari institusional/pemerintah. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber data yang merupakan wakil perusahaan sebagai berikut:

“...pembentukan forum bilik merupakan inisiatif pemerintah. Forum Bilik dibentuk sebagai wadah komunikasi antara aparatur pemerintah, pengusaha dan masyarakat... ..tujuan menciptakan pembinaan lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan.seingat saya forum bilik inisiatif dari pemerintah, tentang perencanaan forum bilik saya tidak tahu. Sepertinya industri tidak dilibatkan dalam proses perencanaan... waktu itu kita hanya menerima undangan apresiasi pengelolaan lingkungan, hasilnya dibentuk forum bilik...” [FB.2.3/1 -7]

“...Forum Bilik bisa sebagai media komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. PT. Sinar Sosro menjadi anggota Forum Bilik Sub DAS Sadang Hilir... setahu saya ide awal pembentukan forum bilik dari pemda. Waktu itu saya ditugaskan mewakili perusahaan untuk menghadiri undangan dari pemda, ternyata rapat tersebut dalam rangka membentuk forum bina lingkungan...” [FB.2.4/1 -5]

“...forum bilik, proses awalnya saya tidak tahu pasti, yang jelas dari pemerintah. Kami hanya terlibat pada saat musyawarah pembentukan organisasi dan pemilihan pengurus, yaitu forum bilik Sadang Hulu, Sadang Hilir dan Cikedokan. PT. LPA (maksudnya Lucky Print Abadi, pen) termasuk dalam forum bilik Cikedokan...” [FB.2.5/1 -6]

Selain itu juga diperoleh informasi dari sumber data dari anggota forum bilik yang mewakili unsur masyarakat, sebagai berikut:

“...forum bilik dibentuk tahun 2003... ..tidak ada inisiatif dari masyarakat, masyarakat tahunya menerima undangan dari pemerintah. Waktu itu yang hadir banyak, dari tiap-tiap desa di Cikarang Barat (Kecamatan, pen) ada wakilnya. Wakil kebanyakan dari desa dan pengusaha. ...organisasi Forum Bilik udah dibentuk, ada ketua, bendahara, sekretaris tetapi lupa nama-namanya. Pembentukan forum bilik tujuannya untuk pengelolaan lingkungan. ...kami tahunya hanya hadir memenuhi undangan pemerintah... Kegiatan forum bilik sepertinya berhenti, hampir setahun,

waktu itu pernah membersihkan kali sadang, penyuluhan dan rapat-rapat silaturahmi di perusahaan bergantian.” [FB.1.1/5 -12]

“....menurut saya forum bilik sangat bagus tetapi pada proses pembentukannya pemerintah seakan memaksakan kehendak, seharusnya sebelum mengundang masyarakat ada informasi terlebih dulu ke desa sehingga kita bisa mempersiapkan atau paling tidak kita punya gambaran. Eh.. tahu-tahu ada undangan rapat dan hasilnya kita menjadi anggota forum bilik. kita gak tahu perencanaannya, yaitu itu tadi tahu-tahu ada undangan...” [FB.1.2/1 -6]

Untuk memperkaya informasi yang diperoleh dari sumber data yang mewakili perusahaan dan masyarakat, maka wawancara juga dilakukan guna memperoleh informasi dari sumber data yang berasal dari institusional/pemerintah sebagai berikut:

“...saya punya ide untuk membentuk sebuah forum yang beranggotakan masyarakat dan pengusaha, ide tersebut saya usulkan ke dinas... ..menyangkut tahapan dari perencanaan, prinsipnya mengikuti mekanisme perencanaan program dan penganggaran yang diselaraskan dengan Visi, Misi dan Renstra Kabupaten Bekasi. ...pada tahun 2003 pemda menganggarkan untuk kegiatan restrukturisasi forum bilik...” [FB.3.3/12 -16]

Untuk tahapan perencanaan program, dalam hal ini proses perencanaan forum bilik pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Kabupaten Bekasi mengikuti proses penyusunan APBD (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).

“...proses perencanaan pada Dinas LH, pengajuan kebutuhan dari masing-masing seksi sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dengan mengacu ke visi, misi dan renstra pembangunan Kabupaten Bekasi... ..pada tahap usulan masing-masing seksi mengajukan usulan program hasil dari musrenbang. Musrenbang diakomodir dipadukan dengan tupoksi SKPD, musrenbang menjadi prioritas pertama kemudian usulan dari bidang sesuai tupoksi... ..forum bilik setahu saya diusulkan oleh bidang wasdal, bukan usulan masyarakat (hasil musrenbang)... ” [FB.3.6/1 -7]

“...mekanisme perencanaan, usulan dari masyarakat lewat musrenbang mengacu kepmendagri. Dimungkinkan usulan dari desa/masyarakat. ...masyarakat cenderung mengusulkan program yang bersifat fisik misal jaling. Untuk bidang lingkungan masih belum menjadi prioritas masyarakat... ...masalah partisipatif masyarakat, pemda sudah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, tetapi dari masyarakat masih kurang... ...ada kecenderungan anggapan dari masyarakat bahwa pembangunan sudah ada APBD, masyarakat mau terima jadi saja... ...masyarakat maunya hanya terima honor aja, tetapi gak mau ikut bekerja... ...bapeda akan merancang sebuah sistem agar masyarakat bisa berpartisipasi... ...dalam hal usulan pembangunan ada sebagian instansi yang kurang mengakomodir partisipasi, sebagai contoh untuk program animas. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan bahwa masyarakat yang berpartisipasi ditumpangi LSM yang punya maksud-maksud “tertentu”...” [FB.3.5/1 -14]

“...idealnya pembentukan Forum Bilik idenya (inisiatifnya) dari masyarakat sehingga mereka punya rasa memiliki sedangkan pembinaannya dari pemerintah. ...tentang mekanisme perencanaan di Bapeda mengacu ke Kepmendagri, diawali aspirasi dari bawah (musbangdes, musbang kecamatan, musrenbang Kabupaten) ...berdasarkan skala prioritas maka muncul sebuah kegiatan. ..atau bisa dikatakan bahwa sukses atau tidaknya sebuah kegiatan ada didinas teknis, dalam hal Forum Bilik sebetulnya fokus perencanaanya ada pada Dinas PDLP.” [FB.3.4/4 -10]

Dari informasi di atas menggambarkan bahwa forum bilik muncul sebagai produk dari sistem perencanaan dari atas (*top down planning*) dimana pemerintah mempunyai inisiatif kemudian rencana tersebut diaplikasikan tanpa melihat kondisi dan karakteristik sosial masyarakat. Dari informasi-informasi yang disampaikan seperti tersebut di atas ada poin penting terkait dengan proses timbulnya forum bilik, yaitu:

Kesimpulan Sementara 4:

Ide awal untuk membentuk forum bilik murni inisiatif dari pemerintah (top down planning). Pihak industri dan masyarakat (stakeholder) tidak terlibat dalam proses perencanaan yang dimulai dari tahap identifikasi masalah sampai dengan munculnya sebuah kebijakan (dalam hal ini forum bina lingkungan). Masyarakat dan industri hanya terlibat dalam pembentukan organisasi dan kepengurusan forum bilik.

Pendekatan perencanaan dari atas ke bawah apabila tidak memperhatikan arus informasi yang didukung oleh perencanaan dari bawah ke atas maka pendekatan tersebut cenderung menghasilkan dokumen perencanaan yang teoritis atau hanya menghasilkan proyek-proyek yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan proyek yang dilaksanakan tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat, selain pemborosan dana masyarakat setempat merasa tidak berkepentingan untuk berpartisipasi.

4.3 Analisis Peran *Stakeholder* NonPemerintah dalam mendukung Forum Bilik

Pada bagian ini akan disampaikan informasi-informasi tentang peran masyarakat dan industri/pengusaha terhadap Forum Bilik dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya lingkungan sungai. Dari informasi-informasi tersebut dapat dianalisis untuk mendeskripsikan peran masyarakat dan industri dalam forum bilik maupun pengelolaan lingkungan hidup.

4.3.1 Peran Masyarakat dalam mendukung Forum Bilik dan Pengelolaan Sungai

Dalam upaya menggali informasi tentang bagaimana peran masyarakat dalam mendukung forum bilik, akan dikaji terlebih dulu pandangan (persepsi) pendapat maupun partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sungai khususnya forum bilik.

Persepsi menurut Daldjoeni (1997) diartikan sebagai fungsi psikologis

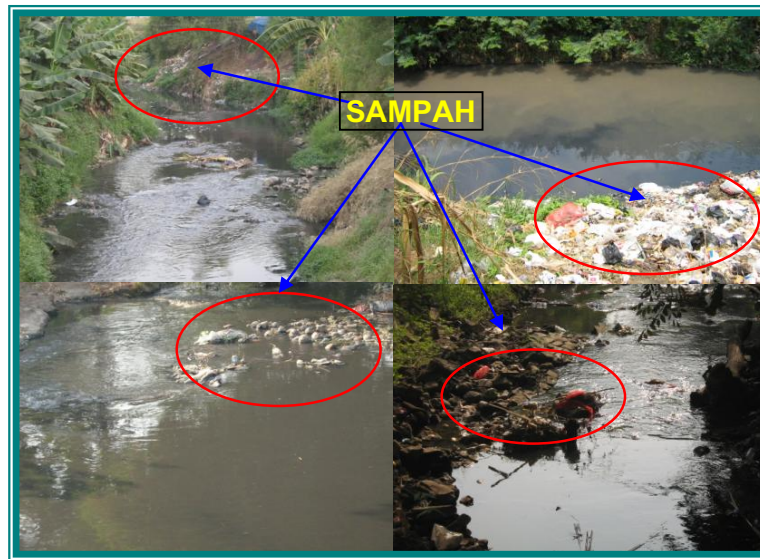
yang membuat individu mampu mengamati rangsangan indrawi dan mengubahnya menjadi perjalanan yang berkaitan secara tertata. Akibat dari pengaruh daya persepsi inilah maka pemahaman dan perumusan atas suatu isu sesungguhnya bersifat subyektif. Persepsi ini pada gilirannya akan berpengaruh terhadap penilaian suatu masalah. Gibson (1997) mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif yang digunakan seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya.

“...banyak ormas, LSM dan masyarakat sekarang hanya peduli kepada limbah padat/sampah dari industri yang masih bisa dijual lagi (misalnya kertas, kayu, skrap besi dll)... ..jarang ada upaya dari masyarakat untuk memelihara Kali Cikedokan. Sepengetahuan masyarakat pengelolaan kali tanggung jawab pemerintah, ...masyarakat tidak ada partisipasi. ...ada keinginan masyarakat agar konsisi air Kali Cikedokan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.” PLS.1.3/1 -6]

“Pembersihan sungai oleh masyarakat jarang, kalau ada perintah dari desa baru masyarakat kerja bakti bersih-bersih sungai, malah kadang ada yang buang sampah di kali... Kebersihan sungai menjadi tanggung-jawab pemerintah dan industri...partisipasi masyarakat Desa Mekarwangi paling hanya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal sendiri. ...Forum Bilik sebagian masyarakat tidak tahu, mungkin hanya aparat desa saja yang tahu. Masyarakat setuju adanya Forum Bilik, biar kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan kepada pemerintah atau bisa kompalin langsung kepada industri.” PLS.1.5/5 -11]

“...pengelolaan sungai menjadi tanggungjawab pemerintah... Masyarakat boro-boro melakukan pembersihan kali terkadang mereka sendiri buang sampah di kali... Partisipasi masyarakat kurang, mungkin karena tidak ada penggerakannya.masyarakat sudah tahu kalau Kali Sadang sebagai kali pembuang limbah jadinya masyarakat kurang peduli. ...Forum Bilik belum pernah dengar tetapi seharusnya ada.tugasnya bisa bersih-bersih kali, seperti ulu-ulu waktu jaman dulu, sehingga bisa bantu petani...” PLS.1.4/6 -12]

Disamping itu juga banyak ditemukan tumpukan-tumpukan sampah yang berada di badan sungai, baik Sungai Sadang maupun Cikedokan.



Sumber: Hasil Observasi, 2007

GAMBAR 4.4
SAMPAH PADA BADAN SUNGAI SADANG DAN CIKEDOKAN

Pemandangan tersebut terutama banyak terlihat pada badan sungai yang dekat dengan pemukiman penduduk. Gambar 4.4 memperlihatkan tumpukan sampah pada Badan Sungai Sadang dan Cikedokan.

"...sepertinya masyarakat jarang melakukan pembersihan sungai... ...partisipasi masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar... ...pengelolaan sungai menjadi tanggungjawab bersama yaitu pemerintah, masyarakat dan industri... ...masyarakat belum tahu tentang Forum Bilik..." [PLS.1.7/4 -7]

"...dalam pengelolaan sungai, menurut saya masyarakat harus dilibatkan, termasuk menjadi anggota forum bilik. Partisipasi masyarakat disekitar sini menurut saya tidak buang sampah ke sungai juga udah bagus... ...pengelolaan sungai menjadi tanggungjawab bersama yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat... ...kebanyakan masyarakat belum mengetahui organisasi Forum Bilik..." [PLS.1.6/ 1-5]

Dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, kemudian

dirangkum menjadi sebuah kesimpulan sementara sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 5:

Masyarakat jarang melakukan pembersihan sungai, partisipasi diwujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal walaupun dapat dikatakan masih kurang. Kebanyakan masyarakat belum mengetahui keberadaan Forum Bilik, kecuali mereka yang menjadi anggota Forum Bilik tersebut.

Sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar sungai mempersepsikan Sungai Sadang dan Cikedokan sebagai saluran pembuang limbah, sehingga menurut mereka pengelolaan sungai tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri. Lebih jauh lagi persepsi yang demikian menyebabkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sungai cenderung pasif. Atau dapat dikatakan masyarakat kurang dalam berpartisipasi.

“Partisipasi masyarakat kurang, mungkin karena tidak ada penggerakannya.” [PS.1.4/8 -9]

Akan tetapi tidak semua masyarakat punya persepsi yang demikian. Bahkan sebaliknya, sebagian masyarakat sadar bahwa pengelolaan sungai merupakan tanggung jawab bersama, sehingga menurut persepsi mereka masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sungai. Hal ini mendorong perilaku mereka untuk tidak memperparah pencemaran sungai misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Contoh lainnya adalah tidak membuang sampah ke badan sungai.

“...dalam pengelolaan sungai, menurut saya masyarakat harus dilibatkan, termasuk menjadi anggota forum bilik. Partisipasi masyarakat disekitar sini menurut saya tidak buang sampah ke sungai juga udah bagus...” [PS1.6/1 -3]

Dari informasi-informasi yang didapat diperoleh informasi bahwa

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai masih kurang. Selanjutnya berbagai informasi-informasi tersebut di atas, dapat sebuah kesimpulan sementara sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 6

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pengelolaan sungai menjadi tanggung jawab bersama sedangkan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa pengelolaan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dipengaruhi oleh pandangan (persepsi) mereka (masyarakat) terhadap pengelolaan sungai itu sendiri. Dengan persepsi yang demikian akan mempengaruhi peran (partisipasi) masyarakat dalam mendukung forum bilik. Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh dampak/hasil dari kegiatan forum bilik terhadap masyarakat, dimana menurut masyarakat kegiatan forum bilik belum memperlihatkan hasilnya.

Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor internal misalnya dari ciri-ciri individu, persepsi, ikatan psikologis, organisasi dan kepemimpinan. Selain faktor internal partisipasi juga dipengaruhi faktor eksternal, misalnya peran pemerintah dan pendamping pihak ketiga (fasilitator) serta mekanisme pelaksanaan program.

Menurut Conyers (1994: 186), beberapa penyebab keengganan masyarakat untuk berpartisipasi antara lain: hasil dari partisipasi itu sendiri, dimana masyarakat akan enggan berpartisipasi jika merasa hasil dari partisipasi tersebut tidak berpengaruh pada hasil akhir. Selain itu, masyarakat juga enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka, ataupun aktivitas yang tidak berpengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

4.3.2 Peran Industri dalam Mendukung Forum Bilik dan Pengelolaan Sungai

Selain persepsi masyarakat juga akan dipaparkan informasi tentang pandangan (persepsi) perusahaan/industri tentang pengelolaan lingkungan sungai.

“...pengelolaan sungai itu sendiri menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat, tetapi lebih ditekankan pada pemerintah dan industri. ...dalam pengelolaan sungai perlu melibatkan masyarakat, seperti dalam Forum Bilik. ...dalam Forum Bilik tersebut terjadi diskusi-diskusi masalah pengelolaan lingkungan sehingga diharapkan jika ada kesulitan dalam penolakan air limbah. ...partisipasi perusahaan yaitu dengan mentaati dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ada.” [PLS.2.1/4 -12]

“...lingkungan merupakan anugrah Tuhan, sehingga wajib dikelola dengan baik. Pengelolaan sungai menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. ...Forum Bilik bisa sebagai media komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat, PT. Sinar Sosro menjadi anggota Forum Bilik Sub DAS Sadang Hilir... ...partisipasi yang dilakukan perusahaan yaitu mengelola limbah yang dihasilkan agar memenuhi baku mutu lingkungan (BML). Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi dan inovasi IPAL.” [PLS2.4/5 -10]

Perusahaan sangat mendukung adanya Forum Bilik yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu memenuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sungai merupakan tanggung jawab bersama, akan tetapi industri sebagai yang menghasilkan limbah harus lebih berinisiatif mengelola limbah yang dihasilkan agar memenuhi BML.” [PLS.2.3/8 -12] [PLS.2. 5/6-11] dan [PLS.2.6/ 3-8]

Pada subbab terdahulu telah disampaikan analisis terhadap persepsi masyarakat maupun industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam rangka mendukung forum bilik. Untuk itu, pada bagian ini akan dipaparkan partisipasi industri/perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam mendukung forum bilik. Guna memperoleh informasi yang dapat mewakili perusahaan/industri akan dilakukan wawancara terhadap sumber

data yang merupakan anggota forum bilik yang berasal dari perusahaan.

“...pengelolaan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Dengan terbentuknya forum bilik diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan pencemaran akibat limbah industri. ...untuk itu keterkaitannya harus sinergi, harus punya kemauan yang sama, di sinilah industri berpartisipasi misalnya kalangan industri harus menganggarkan dana untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan... ...mengupayakan perbaikan ipal, melakukan inovasi-inovasi misalnya dengan 3R, reuse, reduce dan recycle.” [PS.2.2/6 -10] dan [PS.2.2/12 -14]

Pada subbab tentang persepsi perusahaan/industri terhadap pengelolaan lingkungan dan forum bilik telah diuraikan bahwa sebagian sumber data yang mewakili pihak perusahaan berpendapat bahwa partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan, diantaranya dengan mengelola limbah yang dihasilkan agar memenuhi baku mutu lingkungan.

“Perusahaan sangat mendukung adanya Forum Bilik yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu memenuhi ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sungai merupakan tanggung jawab bersama, akan tetapi industri sebagai yang menghasilkan limbah harus lebih berinisiatif mengelola limbah yang dihasilkan agar memenuhi BML.” [PS.2.3/8 -12] [PS.2.5/6 -11] dan [PS.2.6/3 -8]

Apabila diperbandingkan dengan pendapat sebelumnya terdapat perbedaan pendapat yang akan memperkaya informasi yang diperoleh, sebagai berikut:

*“PT. CCBI sangat concern terhadap pengelolaan lingkungan hidup, hal ini salah satu diwujudkan dalam corporate social responsibility (CSR) dengan membentuk **Program “Cinta Air”** yang telah diluncurkan secara resmi pada bulan Maret tahun 2006. Cinta Air adalah program kemitraan antara Perusahaan Coca-Cola di Indonesia dan USAID (Indonesia) dalam pemberdayaan komunitas dalam bidang pengelolaan air yang berkesinambungan untuk kehidupan yang lebih baik, target*

program yang telah dilaksanakan adalah komunitas di dusun Wangkal, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Program ini memiliki empat tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman komunitas mengenai aktivitas-aktivitas konservasi air, termasuk penanaman pohon serta melindungi sumber daya air; kedua, memperbaiki tingkat kesehatan komunitas melalui kampanye kesehatan dan kebersihan terkait dengan air dan praktek sanitasi yang baik dan benar; ketiga, memberdayakan komunitas dalam upaya perbaikan kualitas air dengan memperkenalkan metode dan pendekatan yang sederhana untuk memperbaiki, melindungi dan memonitor kualitas air; dan yang keempat, meningkatkan kapasitas komunitas untuk memahami dan berkomitmen dalam usaha jangka panjang untuk memastikan ketersediaan air bersih.. ...menurut saya forum bilik bisa padukan dengan CSR dari perusahaan...” [PS.2.8/2 -17]

“...kebijakan perusahaan di PT Idofarma, masalah pengelolaan lingkungan hidup struktur organisasinya berada dibawah General Affair (GA) sedangkan corporate social responsibility sudah berdiri sendiri. ...CSR yang dilakukan perusahaan secara tidak langsung telah membantu tugas pemerintah di bidang sosial. ...CSR sudah merupakan corporate strategy, jika masyarakat tidak berkembang, perusahaan juga akan sulit berkembang.... Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit, yang diharapkan dari kegiatan ini adalah benefit berupa citra perusahaan...” [PS.2.9/1 -7]

Dari informasi-informasi tersebut di atas, dapat rangkum dalam kesimpulan sementara, sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 7:

Persepsi perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan sungai didasarkan pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan perusahaan sangat mempengaruhi partisipasi perusahaan/industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, partisipasi perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup juga tergantung dari pemahaman perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan forum bilik dapat dipadukan dengan community development (CD) ataupun corporate social responsibility (CSR)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah merupakan suatu konsep bahwa perusahaan

memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus mampu meningkatkan kualitas manusia dan lingkungan (Salim dalam Kompas, 16 Maret 2007). Corporate Social Responsibility (CSR) berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka, seperti halnya keuntungan melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

4.4 Analisis Peran Pemerintah dalam mendukung Forum Bilik

Pada subbagian ini akan disampaikan mengenai analisis peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan forum bina lingkungan.

Informasi yang disampaikan oleh sumber data yang mewakili pemerintah yang sebagian telah disampaikan pada subbab sebelumnya diantaranya:

- a. Forum bilik dibentuk sebagai alternatif pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama pencemaran sungai.
- b. Forum bilik muncul sebagai produk dari sistem perencanaan dari atas (*top down planning*).
- c. Pemerintah tidak membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang pencemaran lingkungan hidup, forum bilik juga harus diberikan sarana dan

prasarana.

- d. kelembagaan forum bilik masih belum jelas.

Dari beberapa poin tersebut di atas, akan digali informasi yang telah dilakukan dengan wawancara dengan sumber data yang mewakili pemerintah, sebagai berikut:

“...sebaiknya forum bilik ada kelembagaan yang jelas yaitu di bawah Dinas PDLP sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. ...bahkan seharusnya industri dan masyarakat lebih berpartisipasi misalnya dana kegiatan Forum bilik berasal dari industri (forum bilik yang mandiri)...” [PR.3.2/15 -19]

“...untuk mendukung forum bilik, Dinas PDLP melakukan program-program yang dapat dipadukan dengan kegiatan forum bilik, misalnya PROKASIH tahun 2004 prokasih dengan sasaran Sungai Cikedokan, sedangkan prokasih tahun 2005 dengan sasaran Sungai Sadang... ...dalam pelaksanaan prokasih selain kegiatan fisik, juga diadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat tentang pencemaran lingkungan... ...tahun 2006 pemerintah menganggarkan pembangunan laboratorium permanen... ...kami berharap forum bilik bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut.” [PR.3.1/8 -14]

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, sebagai berikut :

“...faktor kegagalan Forum Bilik misalnya: 1) Faktor masyarakat, sebagian besar pendatang (punya rasa masa bodoh), kaitannya dengan budaya masyarakat yang sebagian besar pekerja pada sektor industri, pada siang hari mereka bekerja sehingga ada kesulitan untuk berpartisipasi. 2) Pemerintah sebagai pembina, kurang sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat dan industri kurang intensif. 3) Faktor dari pengusaha/kebijakan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup...” [PR.3.4/ 10-16]

Dari informasi-informasi tersebut, pemerintah memang telah banyak melakukan program-program yang mendukung kegiatan forum bilik, namun kebanyakan program-program tersebut berorientasi “proyek”, sebagai konsekuensi dari pendekatan *top down planning*. Dari beberapa program tersebut belum nampak

program yang merupakan usulan dari masyarakat sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat belum terserap.



Sumber: Dinas PDLP Kab. Bekasi, diolah, 2007

GAMBAR 4.5
PENYULUHAN TERHADAP MASYARAKAT DAN INDUSTRI
YANG BERLOKASI DISEKITAR SUNGAI SADANG



Sumber: Dinas PDLP Kab. Bekasi, diolah, 2007

GAMBAR 4.6
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROKASIH
SUNGAI SADANG

Dari paparan-paparan tersebut di atas kemudian dituangkan dalam kesimpulan sementara sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 8:

Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan merupakan tangan panjang pemerintah, sehingga mereka akan bertanggung jawab terhadap pemerintahan di atasnya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat (community development), mereka menjadi kurang dalam memberikan perhatian untuk masyarakat, apalagi tidak ada pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal ini karena orientasi pemerintah dalam melakukan pembangunan dengan pendekatan dari atas (top down).

4.5 Analisis Kegiatan Forum Bilik

Proses pembentukan Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) telah dipaparkan pada subbab sebelumnya. Pada bagian ini coba akan dideskripsikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Bilik dalam pengelolaan lingkungan. Forum Bilik dalam hal ini akan dibatasi yaitu Forum Bilik Sadang Hulu, Sadang Hilir dan Cikedokan sesuai batasan penelitian.

4.5.1 Kegiatan Forum Bilik Sub-DAS Sadang Hulu

Penelusuran informasi terhadap sumber data yang merupakan anggota dari Forum Bilik Sub-DAS Sadang Hulu dan informasi dari data sekunder yang mendukung dari instansi terkait yaitu Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi. Berbagai informasi tentang kegiatan Forum Bilik dari sumber data sebagai berikut:

”Kegiatan Forum Bilik paska restrukturisasi yaitu, melakukan kordinasi antaranggota dan membentuk sekretariat sementara. Pertemuan dilakukan tiap bulan biasanya pada Hari Jumat pada minggu terakhir, tempat

pelaksanaan bergantian. Kita juga mengundang masyarakat sekitar agar mereka juga ikut terlibat aktif, barang kali ada saran-saran dari mereka ataupun keluhan-keluhan mereka... Dalam pertemuan dilakukan sharing tentang kendala/kesulitan yang dihadapi dalam pengolahan air limbah oleh anggota, sebagai tindakan preventif yang diharapkan akan mengurangi tingkat pencemaran sungai oleh limbah industri. Kegiatan lain ikut mendukung Program Kali Bersih (Prokasih) bersama masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi belakangan ini, hampir setahun kegiatan Forum Bilik fakum. Penyebabnya antara lain penunjukan anggota cenderung ke perorangan, akan lebih baik jika lembaganya. Jika perorangan sering mis komunikasi jika terjadi pergantian karyawan. Akan lebih bagus lagi jika peran pemerintah lebih ditingkatkan.” [KFB.2.7/1-12]

“...menurut saya kegiatan Forum Bilik sangat bagus bisa terjadi komunikasi antara pemerintah, industri dan masyarakat. Walaupun kadang dari perusahaan sering keberatan karena PT. Chuhatsu tidak menghasilkan limbah cair dan lokasi perusahaan jauh dari Sungai Sadang. Tentang kegiatan Forum Bilik, sepertinya sekarang berhenti. Waktu itu sempat aktif, kegiatannya tukar menukar informasi dalam pengelolaan lingkungan, pembersihan kali, pernah juga mengadakan penghijauan bantaran kali. Saya sendiri kurang aktif, kadang sangat sibuk dengan pekerjaan, itu yang menjadi salah satu kendala.” [KFB.SU.2.10/3-10]

”...masyarakat jarang yang tahu Forum Bilik, kan kebanyakan anggotanya aparat desa, pengurus BPD, ada juga tokoh masyarakat tapi informasinya tidak sampai ke masyarakat. Kegiatan Forum Bilik selama ini mengikuti program pemerintah, misalnya prokasih, penghijauan bantaran Sungai Sadang di dekat Indofarma. Pernah juga penyuluhan dari Bandung di gedung Sucofindo. Sekarang sepertinya jarang ada kegiatan lagi, mungkin tidak dianggarkan oleh pemerintah lagi. ...jika ada pencemaran sungai masyarakat otomatis melaporkan ke desa bahkan kalo ketahuan sumbernya masyarakat langsung mendatangi ke pabrik... ...harus ada pembekalan pengetahuan tentang limbah kepada masyarakat.” [KFB.SU.1.10/1-9]

”...kegiatannya forum bilik sepertinya berhenti, hampir setahun, waktu itu pernah membersihkan kali sadang, penyuluhan dan rapat-rapat silaturahmi di perusahaan secara bergantian...” [KFB.SU.1.1/11-12]

Informasi di atas dapat menggambarkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Forum Bilik yang sifatnya berupa tindakan preventif dalam internal (berupa kegiatan konsolidasi) antarperusahaan sebagai anggota Forum Bilik.

Kegiatan lainnya membantu pemerintah daerah dalam Program Kali Bersih (Prokasih) dan penghijauan bantaran sungai seperti terlihat pada Gambar 4.7.



Sumber: Dinas PDLP Kab. Bekasi, diolah, 2007

GAMBAR 4.7
KEGIATAN FORUM BILIK SUB DAS SADANG HULU TAHUN 2005

Hal-hal seperti yang sudah disampaikan sumber data seperti telah dipaparkan di atas, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dalam kesimpulan sementara, yaitu:

Kesimpulan Sementara 9:

Peran yang dilakukan oleh industri/perusahaan dalam kegiatan forum bilik (Sadang Hulu) masih sebatas pada tindakan preventif, terutama dalam pengelolaan limbah yang mereka hasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Adapun peran masyarakat dalam kegiatan forum bilik masih pasif, fungsi kontrol dari masyarakat dalam pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum terlihat.

4.5.2 Kegiatan Forum Bilik Sub-DAS Sadang Hilir

Forum Bilik pada Sungai Sadang dibagi menjadi dua forum yaitu Forum Bilik Sadang Hulu dan Sadang Hilir. Pada subbagian di atas telah dideskripsikan

mengenai kegiatan forum bilik Sub-DAS Sadang Hilir. Kegiatan Forum Bilik Sadang Hilir akan dideskripsikan berdasarkan penelusuran informasi terhadap sumber data yang merupakan anggota dari Forum Bilik Sub DAS Sadang Hilir dan informasi dari data sekunder yang mendukung dari instansi terkait, yaitu Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Kabupaten Bekasi. Berbagai informasi tentang kegiatan Forum Bilik dari sumber data sebagai berikut:

“...kegiatan forum bilik Sadang Hilir tidak ada, tidak aktif. ...ada pertemuan di PT. Coca-Cola, yaitu pembentukan pengurus.... ...terakhir saya dengar kabar kalo ketuanya yaitu Pak Agus sudah pindah kerja, semenjak itu tidak ada kegiatan lagi. ...saya tidak bisa menilai kinerja forum bilik efektif dan efisiennya, karena forum bilik Sadang Hilir tidak ada kegiatan (vakum)... ...masalah penyebabnya saya rasa masing-masing pengurus maupun anggota sibuk dengan tugas kesehariannya artinya bahwa harus ada kebijakan perusahaan yang mendukung forum bilik, misalnya dengan penunjukan karyawan yang khusus menangani lingkungan dan forum bilik.” [KFB.SI.2.4/10 -18]

“...forum bilik, wah saya baru dengar, maklum saya baru di Plant Cibitung, tidak ada informasi dari personel sebelumnya... ...kegiatan forum bilik mungkin pernah aktif, tetapi sekarang tidak pernah ada pemberitahuan atau undangan atau informasi baik dari anggota yang lain maupun dari pemmakalau saya ditanya apakah kinerja forum bilik efektif dan efisien? Saya belum bisa menilai, tidak ada informasi tentang kegiatan forum bilik. ...seandainya kegiatannya berjalan saya pikir bisa efisien dan efektif, dengan catatan forum bilik didukung oleh semua stakeholder termasuk pemerintah.” [KFB.SU.2.8/ 1-2 dan 19-25]

Untuk melengkapi informasi dari wakil perusahaan, wawancara juga dilakukan terhadap wakil masyarakat, sebagai berikut:

“...kita gak tahu perencanaannya, yaitu itu tadi tahu-tahu ada undangan. ...kegiatan forum bilik Sadang Hilir seingat saya belum ada tindak lanjutnya sejak rapat pembentukan pengurus di PT. Coca-Cola, atau mungkin saya gak diundang...” [KFB.SI.1.2/5 -10]

Jika dicermati dari informasi-informasi yang telah disampaikan diatas memberikan gambaran bahwa forum bilik Sub-DAS Sadang Hilir mengalami

kevakuman atau tidak ada kegiatan sejak proses pembentukannya. Ada beberapa poin yang dapat digarisbawahi untuk forum bilik Sadang Hilir, seperti dalam kesimpulan sementara sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 10:

Kegiatan forum bilik Sub-DAS Sadang Hilir tidak berjalan, antara lain disebabkan oleh: tidak adanya komunikasi dan kordinasi antaranggota maupun antarperusahaan dalam organisasi forum bilik tersebut; kebijakan perusahaan dalam penunjukan karyawan (PIC) yang tidak jelas sehingga tanggung jawab sebagai pengurus forum bilik terabaikan; peran pemerintah sebagai fasilitator belum terlihat.

4.5.3 Kegiatan Forum Bilik Sub-DAS Cikedokan

Pada subbagian di atas telah dideskripsikan mengenai kegiatan forum bilik Sub-DAS Sadang Hulu dan Sadang Hilir. Penelusuran informasi terhadap sumber data yang merupakan anggota dari Forum Bilik Sub-DAS Cikedokan yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang diharapkan dapat mendukung informasi yang sudah ada. Berbagai informasi tentang kegiatan Forum Bilik Sub-DAS Cikedokan dari sumber data sebagai berikut:

Indra Kusnanda, Ketua Forum Blik Sub DAS Cikedokan, menyampaikan pendapatnya : *...untuk kegiatan forum bilik persiapan jangka pendek, meneliti kualitas limbah cair dari masing-masing anggota misalnya ada beberapa anggota Forum Bilik Cikedokan yang perlu bantu secara teknis misalnya pancamega, multikimia dan swasti.... permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi forum bilik: person in charge dari masing-masing anggota tidak punya kewenangan untuk memutuskan (decision maker) sehingga kesulitan dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan forum bilik yang sifatnya mengeluarkan dana,hambatan lainnya bahwa kewenangan bilik terbatas baik dari sisi teknis maupun area/wilayah kerja, sedangkan di hulu dan hilir kondisi airnya tidak bisa dikendalikan. ...adanya keterlibatan masyarakat dalam forum bilik diharapkan meningkatkan kinerja forum bilik, tetapi masyarakat di luar industri belum mempunyai pengetahuan sebagai inspektor/supervisi... yang diperlukan forum bilik yaitu sarana prasarana, kualitas SDM dan perangkat/alat monitoring.”* [KFB.CK.3.2/14 -25]

Kegiatan Forum Bilik Cikedokan setahun terakhir mengalami kevakuman. Faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak berjalan, diantaranya masing-masing anggota forum bilik belum ada kesepakatan, terutama tentang anggaran ataupun dana operasional forum bilik yang menjadi beban tiap-tiap anggota.

“...kegiatan Forum Bilik Cikedokan pernah berjalan baik, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan antara lain pembersihan saluran pembuang limbah (beberapa pabrik lokasinya jauh dari aliran sungai cikedokan), mengeruk lumpur-lumpuranya. Bahkan pernah ada rencana untuk membuat tanggul saluran pembuang limbah pada masing-masing perusahaan anggota forum bilik, tetapi rencana ini belum sempat berjalan, forum bilik sudah vakum. Hal ini mungkin karena para anggota belum sepakat tentang pembiayaan/anggarnya untuk kegiatan forum bilik yang dibebankan kepada pihak perusahaan.” [KFB.CK.2.5/11 -18]

Forum bilik yang bergerak di bidang lingkungan belum pernah terbentuk. Forum bilik yang mereka ketahui adalah Forum Gandasuka, merupakan forum kerja sama antara Desa Sukadanau dengan Desa Gandamekar.

“...keberadaan forum bilik ada, tetapi forum bilik yang ada berupa gandasuka (gandasari-sukadanau) sebuah kerjasama antardesa. Untuk forum bilik di bidang lingkungan belum ada/belum terbentuk...” [KFB.CK.1.3/9 -11]

Apabila informasi tersebut di atas dilakukan *cross check* dengan data keanggotaan Forum Bilik Cikedokan seperti pada BAB III, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 11:

Kegiatan forum bilik Sub-DAS Cikedokan tidak berjalan, antara lain disebabkan oleh: masyarakat kurang terlibat dalam keanggotaan maupun kegiatan-kegiatan forum bilik; tidak adanya komunikasi dan kordinasi antaranggota maupun antarperusahaan dalam organisasi forum bilik tersebut, sehingga tidak ada kesepakatan antaranggota.

4.6 Analisis Kinerja Forum Bilik dalam Pengelolaan Lingkungan Khususnya Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai.

Analisis kinerja forum bilik akan dilakukan berdasarkan informasi yang yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan serta data-data sekunder yang saling memperkuat. Dari pernyataan-pernyataan sumber data terhadap kinerja forum bilik, baik untuk forum bilik Sub-DAS Sadang Hulu, Sadang Hilir dan Cikedokan kemudian dirangkum dan disimpulkan.

Sebelum melakukan analisis kinerja forum bilik dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran sungai, akan disampaikan terlebih dulu pengertian efektivitas dan efisiensi sebagai patokan/tolok ukur dalam menyimpulkan pendapat sumber data. Efektivitas (*effectiveness*), yaitu apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas dilihat dari:

- a) Pemecahan masalah, efektivitas dibentuknya Forum Bina Lingkungan tercapai apabila dalam pelaksanaan menunjukkan suatu hasil berupa pemecahan persoalan, dalam hal ini adalah meningkatnya fungsi air Sungai Sadang dan Cikedokan di Kecamatan Cikarang Barat.
- b) Pencapaian tujuan, dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai.

Efisiensi (*Efficiency*) yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi memfokuskan perhatian pada masukan-masukan (*input*) yang digunakan dan cara masukan-

masukannya tersebut ditangani.

4.6.1 Efektivitas Kinerja Forum Bilik.

Dalam subbab ini dipaparkan hasil wawancara dengan sumber data berkaitan dengan kinerja dari Forum Bilik, dalam hal ini akan dilihat efektivitasnya. Wawancara dilakukan terhadap sumber data baik dari unsur masyarakat, wakil industri dan pemerintah.

“Keterlibatan sebagai anggota, seharusnya ada kelanjutannya... kesulitan ada pada anggaran untuk melakukan kegiatanforum bilik bisa efektif jika organisasi bisa berjalan, kegiatan juga berjalan dan ada informasi baik dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah.” [KFB.1.1/12 -15]

“Masalah forum bilik sebagian masyarakat tidak tahu, mungkin hanya aparat desa saja yang tahu. Masyarakat setuju adanya forum bilik, biar kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan kepada pemerintah atau bisa complain langsung kepada industri. Forum bilik ini mungkin efektif kalau pemerintah aktif dalam kegiatannya dan bisa berjalan terus, yang terpenting ada biaya untuk forum bilik tadi.” [EFB.1.5/8-11]

Dari hasil penggalian informasi dari masyarakat seperti tersebut di atas dan informasi-informasi pada subbab sebelumnya, menurut masyarakat bahwa kegiatan forum bilik pernah berjalan tetapi sekarang mengalami kevakuman (berhenti), sehingga kinerja Forum Bilik belum efektif. Adapun informasi dari perusahaan dan pemerintah sebagai berikut:

“...saya tidak bisa menilai kinerja forum bilik efektif dan efisiennya, karena forum bilik Sadang Hilir tidak ada kegiatan (vakum)...” [EFB.2.4/14 -15]

“...kalau saya ditanya apakah kinerja forum bilik efektif dan efisien? Saya belum bisa menilai, tidak ada informasi tentang kegiatan forum bilik. ...seandainya kegiatannya berjalan saya pikir bisa efisien dan efektif, dengan catatan forum bilik didukung oleh semua stakeholder termasuk pemerintah.” [EFB.2.8/ 21-25]

“Kegiatan forum bilik berhenti (tidak ada kegiatan). Forum Bilik belum efektif, disamping kegiatannya vakum juga belum ada titik temu antara pemerintah, industri dan masyarakat.” [EFB.2.3/12 -14] [EFB.2.5/11 -13] dan [EFB.2.10/1 -3]

“Respon pihak perusahaan dan masyarakat cukup bagus, bahkan kegiatan telah jalan beberapa tahun cuma akhir-akhir ini kegiatan forum bilik tidak berjalan. Jika forum bilik berjalan dengan baik, forum bilik sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya kelembagaan, kemauan masyarakat dan perusahaan, pembinaan tidak berjalan, konsistensi pemerintah terhadap forum bilik kurang terbukti forum bilik tidak jalan, sering mutasi pejabat sehingga kadang terjadi misinformasi. Selain itu ada hambatan dalam pengusulan anggaran, biasanya jika kegiatan yang kurang berdampak secara fisik kadang mengalami hambatan.” [EFB.3.3/16 -23]

“Keterlibatan masyarakat (peran) kurang respon, pengetahuan masyarakat tentang forum bilik terbatas misal dari pengetahuan pengelolaan lingkungan. Forum bilik harus diberikan sarana dan prasarana. Kondisi forum bilik saat ini vakum, hal ini menyebabkan forum bilik belum efektif. Langkah-langkah yang ditempuh inventarisasi forum bilik yang sudah dibentuk, tentukan skala prioritasnya. Upaya lainnya akan dibuatkan payung hukum yang kuat sebagai kepanjangan tangan dinas lingkungan hidup...” [EFB.3.2/ 7-9, 14-15 dan 19-22]

Selain hasil wawancara dengan sumber data seperti diuraikan di atas, berikut disampaikan informasi-informasi yang berasal dari pemberitaan media massa, sebagai berikut:

“Sepuluh sungai di kawasan Bekasi, Jawa Barat, yang telah tercemar limbah industri hingga kini belum serius diatasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Sungai yang sudah tercemar itu antara lain Sungai CBL, Sungai Cikedokan, Sungai Bojong, dan Sungai Cikarang. Hasil penelitian oleh Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) bekerja sama dengan Universitas Trisakti dan Universitas Sahid dengan menggunakan laboratorium Sucofindo, pada bulan November 2001, pencemaran sungai di Bekasi sudah sangat mengkhawatirkan” (Kemitraan Air Indonesia, 27 Mei 2002).

Sungai Sadang dan Cikedokan bermuara ke Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), sehingga jika kondisi air kedua sungai tersebut tercemar maka

kondisi air di Sungai CBL akan tercemar juga.

“Kualitas air di Kanal Cibitung-Bekasi Laut (CBL) di kawasan utara Kabupaten Bekasi, kini dalam kondisi memprihatinkan akibat pencemaran yang diduga berasal dari limbah sejumlah pabrik di sekitarnya. Air yang tercemar zat-zat kimia berbahaya itu sudah tidak layak lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga dan menyebabkan ikan di laut atau tambak sering kali mati keracunan. Keterbatasan peralatan menyebabkan pemerintah setempat belum mampu membuktikan perusahaan mana yang membuang limbahnya begitu saja ke CBL atau sungai-sungai lain di Bekasi” (Harian Kompas tanggal 28 Juli 2003).

“Industri-industri di wilayah Kabupaten Bekasi yang membuang limbahnya ke wilayah perairan utara mengakibatkan produktivitas pertanian dan perikanan di kawasan tersebut menurun. Menurunnya kualitas air sungai di kawasan utara akibat limbah industri maupun domestik itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para petani sawah atau tambak di Kabupaten Bekasi terpuruk. Kondisi ini amat ironis karena kawasan utara merupakan pusat pengembangan pertanian dan perikanan. Namun, kebijakan itu tidak didukung dengan upaya Pemkab Bekasi mengawasi pencemaran parah yang melanda perairan di kawasan utara. Akibatnya, kawasan itu semakin tertinggal karena masyarakat yang mengandalkan hidup dari pertanian dan perikanan tidak memperoleh hasil cukup untuk memperbaiki taraf hidup Bekasi.” (Harian Kompas, 23 Juni 2004)

Jumlah industri yang mencapai ribuan (Dinas PDLP mencatat sejumlah 3000 industri) sangat ironis jika dibandingkan dengan jumlah SDM bidang WASDAL yang hanya berjumlah 17 orang. Untuk itu upaya yang dilakukan guna mengurangi pencemaran yaitu memberikan penyuluhan kepada pengusaha/ industri tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

“Kondisi beberapa aliran sungai di Bekasi mengkhawatirkan akibat tercemar limbah. Bahkan, beberapa sungai seperti Sungai Cilemahabang, Sadang, Cokedokan, Ciherang, Bekasi, dan Cikadang Bekasi Laut (CBL), dipastikan tercemar limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Limbah tersebut pada umumnya berasal dari ribuan pabrik di kawasan dan zona industri yang ada di wilayah ini. Tetapi, tidak diketahui pasti pabrik mana saja yang membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terlebih dahulu. Ia mengatakan seharusnya limbah tersebut diolah

sebelum dibuang ke sungai. Dalam catatan dinas ini, di Kabupaten Bekasi ada sekitar 3.000 pabrik yang berpotensi menghasilkan limbah dalam proses produksi. Sementara itu, petugas Wasdal hanya 17 orang dan suatu hal yang tidak mungkin untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ribuan pabrik. Selama ini langkah yang dilaksanakan hanya sebatas imbauan dan penyuluhan terhadap pentingnya lingkungan” (Sinar Harapan, 2 Agustus 2006).

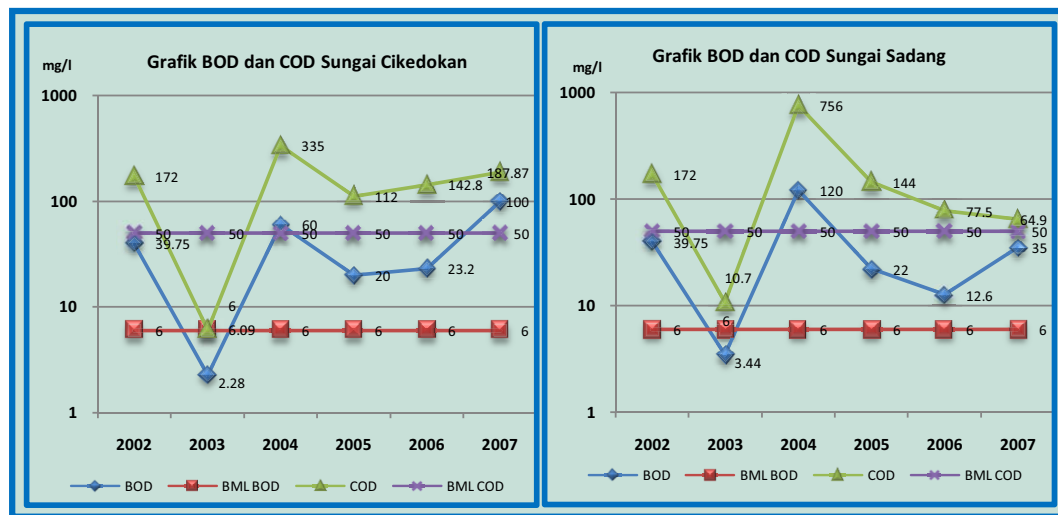
“...seluruh sungai di Bekasi mengandung limbah kimia dikenal Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) buangan dari pabrik. Sebanyak 1700 buah pabrik yang beroperasi di Kabupaten Bekasi dalam kegiatannya selalu membuang limbah beracun ke sungai. Akibat pencemaran itu, air sungai tak layak dikonsumsi warga... Ada 9 sungai yang tercemar di Bekasi dan mengandung limbah B3, antara lain Sungai Kalimalang, Sungai Kali Bekasi, Sungai Sadang (Tambun), Sungai Kali Jaeren, Sungai Kali Jambe, Sungai Menir, Sungai Kali Cikarang Bekasi Laut (Kampung Babakan), Sungai Cilemah Abang, dan Sungai Cikarang” (Tempo News, 17 Mei 2004, download pada www.tempointeraktif.com tanggal 12 September 2007).

Untuk melengkapi informasi hasil wawancara dengan sumber data dan berita-berita dari media massa, berikut disampaikan hasil analisis kualitas air Sungai Sadang dan Cikedokan (parameter BOD₅ dan COD) seperti Gambar 4.8.

Dari pendapat-pendapat hasil wawancara dengan sumber data, baik dari unsur masyarakat, industri maupun pemerintah dan dilengkapi dengan informasi dari media massa serta hasil analisis kualitas air seperti tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara sebagai berikut:

Kesimpulan sementara 12

Kinerja forum bilik, baik forum bilik Sadang Hulu, Sadang Hilir maupun Cikedokan belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kelembagaan, kemauan masyarakat dan perusahaan, sarana dan prasarana, dan konsistensi pemerintah terhadap forum bilik termasuk juga sosialisasi serta pembinaan yang tidak berjalan.



Sumber: DPDLP Kab. Bekasi diolah, 2007

GAMBAR 4.8
HASIL ANALISIS PARAMETER BOD₅ DAN COD
SUNGAI SADANG DAN CIKEDOKAN TAHUN 2002-2007

4.6.2 Efisiensi Kinerja Forum Bilik.

Kinerja dari forum bina lingkungan selain efektivitasnya juga dapat dilihat efisiensinya. Dalam subbab ini dipaparkan hasil wawancara dengan sumber data berkaitan dengan kinerja, yaitu efisiensi dari Forum Bilik. Wawancara dilakukan terhadap sumber data baik dari unsur masyarakat, wakil industri dan pemerintah.

“...forum bilik kurang efisien, sebetulnya tujuannya bagus tapi belum efisien. dari anggota tidak ada penularan informasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahuinya...” [EFB.1.1/15 -17]

“...forum bilik saat ini belum efektif, forum bilik akan efektif dan efisien apabila semua stakeholder berperan sesuai porsinya. Satu lagi peran pemerintah sangat dibutuhkan, jangan semata-mata karena proyek saja...” [EFB.1.2/7 -10]

Dari hasil penggalian informasi dari masyarakat seperti tersebut di atas

dan informasi-informasi pada subbab sebelumnya terlihat bahwa menurut masyarakat bahwa kinerja dari forum bilik belum efisien.

“...saya tidak bisa menilai kinerja forum bilik efektif dan efisiennya, karena forum bilik Sadang Hilir tidak ada kegiatan (vakum)...” [EFB.2.4/14 -15]

“...kalau saya ditanya apakah kinerja forum bilik efektif dan efisien? Saya belum bisa menilai, tidak ada informasi tentang kegiatan forum bilik. ...seandainya kegiatannya berjalan saya pikir bisa efisien dan efektif, dengan catatan forum bilik didukung oleh semua stakeholder termasuk pemerintah.” [EFB.2.8/21 -25]

“Menurut saya jika program forum bilik berhasil maka sangat efisien dalam membantu tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena ada kontrol dari masyarakat.” [EFB.2.1/12 -14]

“...forum bilik sangat efisien (bila kegiatannya berjalan), jika masyarakat telah berdaya/berpartisipasi maka pemerintah tidak harus mengeluarkan anggaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan. ...masyarakat sebetulnya punya kepedulian terhadap pencemaran lingkungan... Sebelum ada forum bilik masyarakat bingung kepada siapa mereka akan mengadukan/menyampaikan pencemaran lingkungan.” [EFB.3.3/16 -23]

“...untuk saat ini forum bilik tidak efisien, karena forum bilik tersebut belum bisa mandiri. Selama ini kegiatan forum bilik dianggarkan oleh pemerintah yaitu dengan melibatkan forum bilik dalam kegiatan-kegiatan seperti prokasih, penghijauan bantaran sungai maupun penyuluhan-penyuluhan baik oleh pemkab maupun pemprop.” [EFB.3.2/23 -26]

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas hasil wawancara dengan sumber data baik dari unsur masyarakat, industri maupun pemerintah dapat diambil kesimpulan sementara sebagai berikut:

Kesimpulan Sementara 13

Kinerja forum bilik, baik forum bilik Sadang Hulu, Sadang Hilir maupun Cikedokan belum efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kelembagaan, kemauan masyarakat dan perusahaan, sarana dan prasarana, dan konsistensi pemerintah terhadap forum bilik termasuk juga sosialisasi serta pembinaan yang tidak berjalan.

4.7 Analisis Komprehensif

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kinerja forum bina lingkungan (Forum Bilik) dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran air Sungai Sadang dan Cikedokan di Kecamatan Cikarang Barat memberikan implikasi teoritis sebagai berikut:

Pertama, Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) Sadang dan Cikedokan merupakan sebuah organisasi/forum yang beranggotakan masyarakat dan industri yang berada di sekitar Sungai Sadang dan Cikedokan. Forum bilik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran sungai. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dengan pendekatan partisipatif, dalam hal ini forum bilik dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal (pemerintah daerah). Faktor internal tersebut adalah pandangan (persepsi) dari stakeholder terhadap partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup (keanggotaan masyarakat dan industri dalam forum bilik).

Persepsi masyarakat terhadap pembangunan partisipatif, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup masih kurang. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber data, yaitu bahwa pengelolaan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman dan latar belakang budaya masyarakat tersebut. Adapun persepsi perusahaan/industri tentang partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup baru sebatas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan dan

perundangan yang berlaku, sehingga inisiatif pihak perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang (kesimpulan sementara 2, 5, 6 dan 7).

Persepsi masyarakat dan industri terhadap pengelolaan lingkungan akan mempengaruhi partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa sebagian masyarakat mengetahui bahwa Sungai Sadang dan Cikedokan yang diperuntukkan sebagai saluran pembuang limbah industri. Dengan demikian, menurut mereka pengelolaan kedua sungai tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri. Dengan demikian sebagian masyarakat merasa enggan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sungai tersebut.

Menurut Wibawanti (2003) persepsi seseorang (masyarakat) terhadap sesuatu akan berubah sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan dari masing-masing individu/masyarakat. Dalam dinamika pengalaman spasial yang dialami manusia, maka akan terjadi persepsi terhadap ruang (*perception of space*), dimana manusia mampu mengaitkan hubungan spasial secara obyektif antara obyek-obyek, selanjutnya dikembangkan konsepsi terhadap ruang (*conception about space*), dimana manusia mampu menjaring hubungan spasial secara abstrak berdasarkan koordinasi-koordinasi, kemudian muncul formasi melalui ruang (*formation through space*), dimana manusia mampu menciptakan hubungan spasial yang nyata dan akhirnya melakukan aksi dalam ruang (*action in space*). Jelaslah bahwa persepsi bukanlah sesuatu yang bersifat statif, melainkan dinamis dan bisa berubah-ubah.

Apabila persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan forum bilik

dimana masyarakat sebagai salah satu *stakeholder*. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan dan kinerja dari forum bilik tersebut dalam pengelolaan lingkungan. Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa kegiatan-kegiatan forum bilik mengalami kevakuman, sehingga forum bilik belum memperlihatkan kinerja yang efektif (kesimpulan sementara 9, 10 dan 11).

Terkait dengan pandangan masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Soetrisno (1995) ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum siap untuk berpartisipasi secara sepenuhnya, diantaranya adalah: a) kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang efektif yang dapat menggerakkan masyarakat dan b) tidak adanya kesadaran bahwa masyarakat dan individu mempunyai hak untuk berpartisipasi.

Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah (Pemkab Bekasi) sangat besar artinya dalam merubah pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, sehingga mereka bisa dan mampu memahami peran yang mereka miliki dalam pembangunan, khususnya pengelolaan lingkungan hidup. Dari penelitian diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan program forum bilik Pemkab Bekasi tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan industri terlebih dulu. Selain itu, hasil penelitian juga menginformasikan bahwa salah satu penyebab masyarakat kurang berpartisipasi, yaitu tidak adanya motor penggeraknya. Menurut masyarakat pemerintah daerah harus bisa menjadi penggerak (fasilitator) untuk mendukung kinerja forum bilik (kesimpulan sementara 12 dan 13).

Kedua, faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan dan

keberlanjutan forum bilik peran pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung forum bilik. Pemerintah daerah sangat berperan dalam menentukan berhasil dan keberlanjutan pembentukan forum bilik yang merupakan manifestasi dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran pemerintah daerah tersebut terlihat dalam pendekatan perencanaan yang digunakan dalam pembentukan forum bilik, sehingga hal ini juga akan berdampak pada dukungan program terhadap kinerja serta keberlanjutan forum bilik (kesimpulan sementara 4 dan 8).

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kinerja forum bilik bahwa ide awal pembentukan forum bilik berasal dari pemerintah daerah (*top down planing*) dengan harapan pengawasan pencemaran sungai bisa tumbuh dari bawah/masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berdaya/mandiri (*bottom up*). Hasil penelitian juga menginformasikan bahwa masyarakat dan industri tidak dilibatkan dalam proses perencanaan forum bina lingkungan (tahapan-tahapan perencanaan). Masyarakat dan industri hanya terlibat pada saat pembentukan organisasi dan pengesahan (pelegalan) forum bilik tersebut.

Menurut Dusseldorp (1980) dalam Slamet (1993) dalam perencanaan pembangunan, pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) sering juga disebut “prosedur fungsional”, dimana menurut prosedur ini, rencana nasional atau sejenisnya menentukan fungsi-fungsi yang mungkin dijalankan oleh berbagai wilayah dalam proses pembangunan secara keseluruhan selama periode rencana dalam waktu yang akan datang. Menurut prosedur ini pula, rencana nasional merupakan kerangka dasar bagi kegiatan-kegiatan pembangunan nasional

yang kegiatan-kegiatannya secara terperinci dirumuskan dalam rencana sektoral dan regional dan merupakan kerangka dasar bagi rencana-rencana, program dan proyek lokal atau daerah.

Menurut Dusseldorp (1980) dalam Slamet (1993), pendekatan perencanaan dari bawah ke atas disebut "*prosedur berdasarkan sumber daya*", sebab rencana pembangunan didasarkan pada penilaian mengenai potensi wilayah (fisik, ekonomi dan sosial) agar dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan menjamin partisipasi penduduk setempat, dan merupakan rencana-rencana lokal yang dirumuskan secara mendasar baik oleh penduduk setempat atau oleh para pimpinan pemerintahan setempat.

Demikian pula yang terjadi dengan forum bina lingkungan, sebagai produk dari *topdown planning*. Hal ini terlihat dari kurangnya dukungan ataupun program-program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung forum bilik tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa forum bilik tidak diberikan anggaran, sarana maupun prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja forum bilik. Bahkan kegiatan-kegiatan dari forum bilik mengalami kevakuman, sehingga kinerja dari forum bilik tersebut belum efektif.

Dalam pendekatan perencanaan dari *atas ke bawah* apabila tidak memperhatikan arus informasi dan kondisi sosial masyarakat (perencanaan dari *bawah ke atas*) maka pendekatan tersebut cenderung menghasilkan dokumen perencanaan yang teoritis dan "berorientasi proyek semata" (*project oriented*) atau hanya menghasilkan proyek-proyek yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan apa yang dilaksanakan tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat, selain pemborosan

dana masyarakat setempat merasa tidak berkepentingan untuk berpartisipasi.

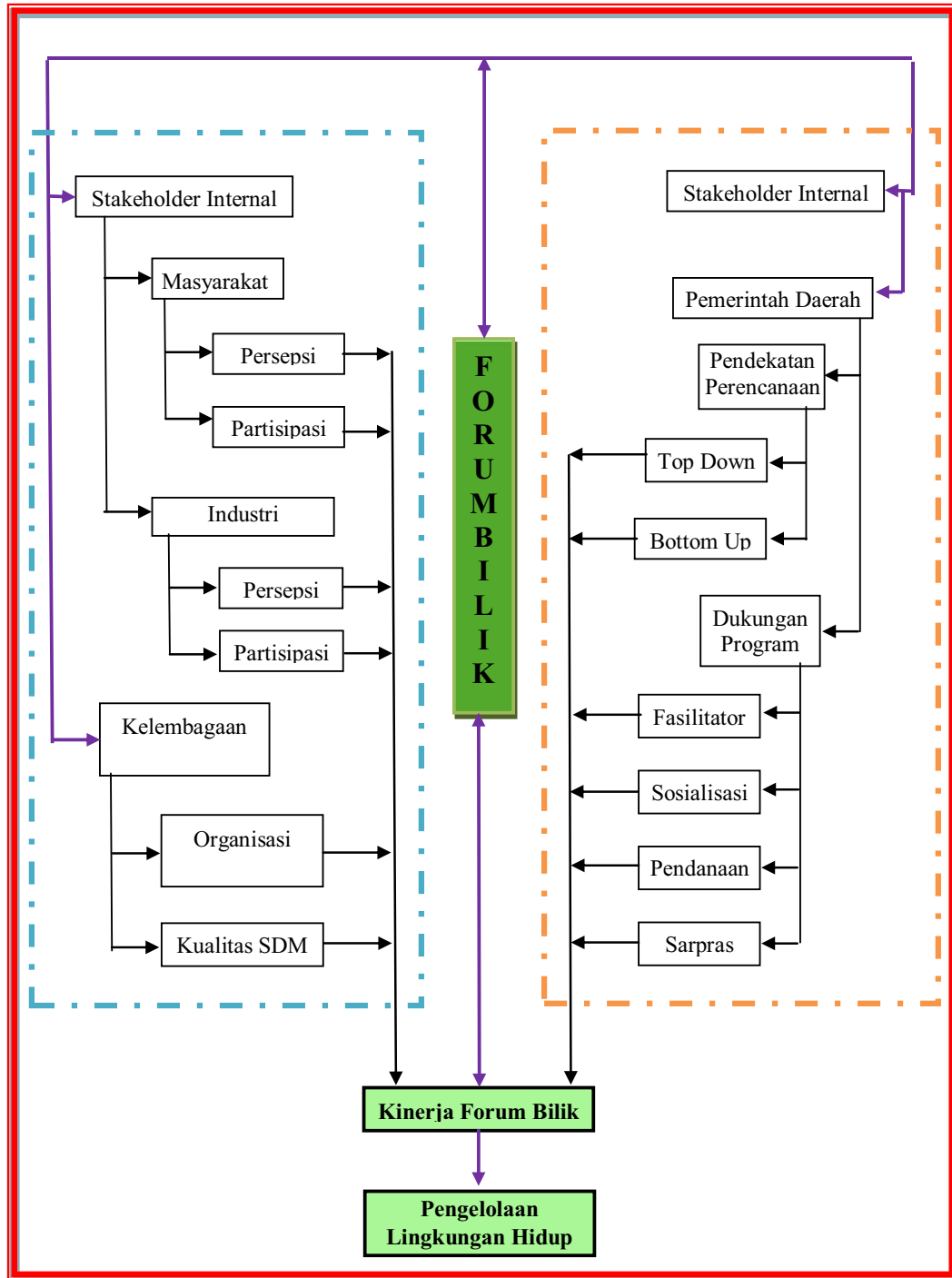
Sedangkan menurut Kunarjo (1992) dalam Haryanto (2006) pendekatan perencanaan dari bawah ke atas, apabila tidak selaras dengan perencanaan dari atas ke bawah, maka sebagian besar rencana lokal itu tidak dapat dilaksanakan dan ini akibatnya akan mengecewakan rakyat. Menurut ESCAP (1979) dalam Haryanto (2006) ada kelemahan sistem perencanaan dari bawah ke atas yaitu sangat kurangnya tenaga-tenaga perencana yang cukup terlatih dan kurangnya data dan informasi yang cukup tentang daerah. Oleh karena itu, perencanaan di negara yang sedang berkembang mempunyai kecenderungan “top-down bias”.

Terkait dengan perencanaan pembangunan partisipatif, John Friedman (1987) dalam Hardiansah (2005) memberikan definisi luas mengenai *planning* sebagai upaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik (*scientific and technical knowledge*) kepada tindakan-tindakan dalam domain publik, menyangkut proses pengarahannya sosial dan proses transformasi sosial. Dari definisi luas *planning* tersebut dapat disimpulkan bahwa filosofi peran serta masyarakat dalam perencanaan mengalami suatu pergeseran, dari *for people* sebagai sifat perencanaan *social reform* menjadi *by people* sebagai sifat perencanaan dalam pembelajaran sosial (*social learning*). Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam memahami perencanaan akan lebih baik apabila perencanaan dipahami sebagai sebuah upaya untuk membuat pengetahuan dan tindakan teknis dalam perencanaan yang secara efektif akan mendorong tindakan-tindakan publik.

Terkait hal tersebut di atas apabila dilihat dari hasil penelitian terdapat potensi partisipasi, baik oleh masyarakat maupun industri. Bentuk-bentuk

Community Development (CD) ataupun *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dikembangkan oleh para pengusaha. Pemerintah daerah dapat mengembangkan partisipasi industri, dimana banyak industri/perusahaan yang telah melakukan *Community Development (CD)* ataupun *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam hal ini forum bilik dapat diselaraskan dengan program CD/CSR dari perusahaan/industri, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup (kesimpulan sementara 7).

Menurut Hadi (2007), Tanggung Jawab Sosial Korporasi atau *Coorporate Social Responsibility (CSR)* merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), pengembangan masyarakat (*community development*) dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan fungsi korporasi yang dalam kiprahnya berusaha memenuhi *corporate objective*, *societal objective* dan *personal objective*. *Corporate objective* adalah mendapatkan keuntungan, *personal objective* adalah memenuhi tujuan yang ingin dicapai dari para staf dan karyawan yang bekerja di perusahaan, diantaranya mendapatkan gaji, tunjangan dan aktualisasi diri melalui pelatihan dan pengembangan. Adapun *societal objective* adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk produk maupun kebutuhan masyarakat yang lain, seperti sarana, prasarana, pengembangan menuju kemandirian masyarakat sampai pada pencegahan terhadap gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan seperti kebisingan, getaran, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dari uraian-uraian tersebut di atas, secara diagram faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja forum bina lingkungan (bilik) dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 4.9 sebagai berikut:



Sumber: Analisis, 2007

GAMBAR 4.9
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KINERJA FORUM BINA LINGKUNGAN

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini merupakan bagian akhir dari proses penulisan laporan penelitian yang dilakukan terhadap kinerja Forum Bina Lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengawasan dan pengendalian pencemaran sungai di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini yang dilakukan sebagai upaya memperluas dan memperdalam khasanah keilmuan serta diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan dalam pembangunan wilayah dan kota khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi.

5.1 Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan berdasarkan sasaran dan tujuan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaruh keberadaan industri terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.

Dampak positif keberadaan industri antara lain terbukanya lapangan kerja, timbulnya kegiatan-kegiatan ekonomi (*trickle down effect*) di sekitar lokasi industri seperti kontrakan, perdagangan dan jasa. Secara tidak langsung keberadaan industri akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut, keberadaan industri juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup, misalnya pencemaran air sungai oleh limbah cair industri.

Tingginya heterogenitas menyebabkan masing-masing anggota masyarakat (individu) tidak dapat lagi mengembangkan pola-pola hubungan yang intensif, melainkan hubungan yang bersifat impersonal, karena kesibukan masing-masing dan latar belakang sosial budaya yang beragam.

Perubahan nilai dalam hubungan sosial ini diidentifikasi oleh Soedjito, (1987) sebagaimana dikutip dalam Insaf (2004: 92) dikarenakan adanya peningkatan peredaran uang di daerah pedesaan. Di dalam masyarakat dengan peredaran uang yang terbatas, jasa dipergunakan sebagai alat penukar. Manifestasinya, tercipta gotong royong dan sifat tukar menukar jasa yang mengakibatkan saling ketergantungan. Sebaliknya, di dalam masyarakat dengan peredaran uang yang intensif, masyarakat dapat berhubungan dengan orang lain tanpa saling mengenal dan melihat, sehingga saling ketergantungan menjadi menipis.

b. Proses Pembentukan Forum Bilik

Masyarakat memiliki fungsi kontrol dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi. Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) sebagai salah satu media partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dibentuk di sekitar daerah aliran sungai (Sub DAS) dengan keanggotaan terdiri dari masyarakat dan pengusaha/industriawan. Ide awal untuk membentuk forum bilik merupakan inisiatif dari pemerintah (*top down planning*). Pihak industri dan masyarakat (*stakeholder*) tidak terlibat dalam proses perencanaan yang dimulai dari tahap identifikasi masalah sampai dengan munculnya sebuah kebijakan (dalam hal ini forum bina lingkungan).

Masyarakat dan industri hanya terlibat dalam pembentukan organisasi dan kepengurusan forum bilik.

Menurut Dusseldorp (1980) dalam Slamet (1993) dalam perencanaan pembangunan, pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) sering juga disebut “prosedur fungsional”, dimana menurut prosedur ini, rencana nasional atau sejenisnya menentukan fungsi-fungsi yang mungkin dijalankan oleh berbagai wilayah dalam proses pembangunan secara keseluruhan selama periode rencana dalam waktu yang akan datang. Menurut prosedur ini pula, rencana nasional merupakan kerangka dasar bagi kegiatan-kegiatan pembangunan nasional yang kegiatan-kegiatannya secara terperinci dirumuskan dalam rencana sektoral dan regional dan merupakan kerangka dasar bagi rencana-rencana, program dan proyek lokal atau daerah.

Adapun pendekatan perencanaan dari bawah ke atas disebut “*prosedur berdasarkan sumber daya*”, sebab rencana pembangunan didasarkan pada penilaian mengenai potensi wilayah (fisik, ekonomi dan sosial) agar dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan menjamin partisipasi penduduk setempat, dan merupakan rencana-rencana lokal yang dirumuskan secara mendasar baik oleh penduduk setempat atau oleh para pimpinan pemerintahan setempat (Dusseldorp, 1980 dalam Slamet, 1993).

- c. Peran *stakeholder* nonpemerintah dalam mendukung forum bilik dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan perusahaan akan mempengaruhi partisipasi perusahaan/industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu

partisipasi perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, juga tergantung dari pemahaman perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Partisipasi perusahaan/industri dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mentaati peraturan perundang-undangan salah.

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk partisipasi masyarakat dalam mendukung forum bilik. Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor internal misalnya dari ciri-ciri individu, persepsi, ikatan psikologis, organisasi dan kepemimpinan. Selain faktor internal, partisipasi juga dipengaruhi faktor eksternal, misalnya peran pemerintah dan pendamping pihak ketiga (fasilitator) serta mekanisme pelaksanaan program.

Menurut Conyers (1994: 186) beberapa penyebab keengganan masyarakat untuk berpartisipasi antara lain: hasil dari partisipasi itu sendiri, dimana masyarakat akan enggan berpartisipasi jika merasa hasil dari partisipasi tersebut tidak berpengaruh pada hasil akhir. Selain itu, masyarakat juga enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka, ataupun aktivitas yang tidak berpengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

d. Peran Pemerintah dalam Mendukung Forum Bilik.

Pemerintah daerah sangat berperan dalam menentukan berhasil dan keberlanjutan pembentukan forum bilik yang merupakan manifestasi dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran pemerintah daerah tersebut terlihat dalam pendekatan perencanaan yang

digunakan dalam pembentukan forum bilik, sehingga hal ini juga akan berdampak pada dukungan program terhadap kinerja serta keberlanjutan forum bilik.

Instansi/Dinas merupakan tangan panjang pemerintah, sehingga mereka akan bertanggung jawab terhadap pemerintahan di atasnya, sehingga orientasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat (*community development*) dengan pendekatan dari atas (*top down*) menjadikan pemerintah kurang dalam memberikan perhatian untuk masyarakat, apalagi tidak ada pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Dusseldorp (1980) dalam Slamet (1993) dalam pendekatan perencanaan dari *atas ke bawah* apabila tidak memperhatikan arus informasi dan kondisi sosial masyarakat (perencanaan dari bawah ke atas) maka pendekatan tersebut cenderung menghasilkan dokumen perencanaan yang teoritis dan “berorientasi proyek semata (*project oriented*) atau hanya menghasilkan proyek-proyek yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan apa yang dilaksanakan tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat, selain pemborosan dana masyarakat setempat merasa tidak berkepentingan untuk berpartisipasi.

- e. Mengkaji Kinerja Forum Bilik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya Pengawasan Pencemaran Air Sungai.

Kinerja forum bilik, baik forum bilik Sadang Hulu, Sadang Hilir maupun Cikedokan belum efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kelembagaan, kemauan masyarakat dan perusahaan, sarana dan

prasarana, dan konsistensi pemerintah terhadap forum bilik termasuk juga sosialisasi serta pembinaan yang tidak berjalan.

Menurut Bernard dalam Gibson (1997: 56), efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas. Menurut Zulkaidi dalam Wahyuningsih (2005: 22), efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan yang dapat dilihat dari:

- 1) Kemampuan memecahkan masalah. Keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.
- 2) Pencapaian tujuan. Efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata.

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Forum Bilik

Dari hasil penelitian yang dilakukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja forum bilik, sehingga belum efektif dan efisien, yaitu bahwa forum bilik sebagai suatu organisasi tentunya dipengaruhi faktor-faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor, yang berasal dari dalam organisasi forum Bilik itu sendiri, yaitu:

- 1) persepsi dan partisipasi masyarakat dan industri (*stakeholder internal*), masyarakat di sekitar Sungai Sadang dan Cikedokan yang mengetahui

bahwa kedua sungai tersebut sebagai saluran pembuang limbah industri sehingga masyarakat mempersepsikan bahwa pengelolaan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri. Dengan persepsi yang demikian menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi. Adapun persepsi pihak industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebatas mentaati peraturan perundang-undangan, sehingga upaya-upaya yang mereka lakukan dalam pengelolaan limbah yang mereka hasilkan belum optimal, masih sebatas memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

- 2) kelembagaan dan organisasi dari forum bilik, permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi dalam kelembagaan forum bilik bahwa kewenangan bilik terbatas baik dari sisi teknis maupun area/wilayah kerja, misalnya pada sungai bagian hulu dan hilir kondisi airnya tidak bisa dikendalikan. Dalam organisasi, penunjukan anggota (*person in charge*) dari pihak industri sebagian besar tidak punya kewenangan untuk memutuskan (*decision maker*), sehingga kesulitan dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan forum bilik yang sifatnya mengeluarkan dana. Selain itu, kualitas SDM terutama anggota yang berasal dari masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam hal permasalahan pencemaran air sungai oleh limbah industri.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar forum bilik, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi (*stakeholder eksternal*). Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap tidak efektif dan efisiennya kinerja dari forum bilik. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) konsep pembentukan forum bilik (pendekatan perencanaan), pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) apabila tidak memperhatikan arus informasi yang didukung oleh perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*), maka perencanaan tersebut cenderung menghasilkan dokumen perencanaan yang teoritis atau hanya berorientasi pada proyek semata (*project oriented*). Hal ini dikarenakan proyek yang dilaksanakan tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat, selain pemborosan dana (tidak efisien) juga masyarakat setempat merasa tidak berkepentingan untuk berpartisipasi. Begitu juga dalam proses pembentukan forum bilik, dimana inisiatif pembentukannya murni berasal dari pemerintah. Masyarakat dan industri tidak terlibat secara langsung pada setiap tahapan perencanaan, mereka hanya terlibat pada saat pembentukan pengurus dan organisasi (*pengesahan*) tanpa ada sosialisasi terlebih dulu.
- 2) dukungan-dukungan program terhadap forum bilik itu sendiri, sebagai konsekuensi dari perencanaan yang berorientasi proyek.

5.2 Rekomendasi

Sebagai upaya untuk memberikan masukan dalam perencanaan partisipatif, terutama dalam pembangunan wilayah dan kota dengan kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) maka direkomendasikan:

- a. Peremajaan/pergantian pengurus dan keanggotaan forum bilik, diupayakan agar penunjukan ketua/anggota forum bilik yang berasal dari perusahaan, yaitu institusinya bukan perorangan (*person*), sehingga memudahkan dalam membuat

keputusan terutama yang membutuhkan pendanaan.

- b. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan partisipatif dalam upaya menggali kebutuhan nyata masyarakat, maka mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang telah ada untuk diberdayakan. Selain itu, perlu disusun suatu desain mekanisme pelaksanaan tahapan perencanaan yang membuka peluang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat serta mampu menjamin dalam pengambilan keputusannya pada tahapan perumusan perencanaan pembangunan partisipatif dalam arti sebenar-benarnya (*the real bottom-up planning*). Dalam hal ini dapat diwujudkan dengan restrukturisasi forum bilik dimulai dari konsep pembentukannya, proses perencanaan yang melibatkan *stakeholder* serta kelembagaan dan organisasinya.
- c. Mengadakan pendekatan dengan pihak industri/perusahaan untuk mendukung forum bilik dengan menyelaraskan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun *Community Development (CD)* dari pihak perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (dengan forum bilik).
- d. Merumuskan program-program yang mendukung forum bilik, seperti sosialisasi, sarana dan prasarana serta memberikan pembekalan/pelatihan-pelatihan terutama untuk masyarakat dalam hal pengawasan dan pengendalian pencemaran sungai.
- e. Merumuskan bentuk pendampingan (fasilitasi) kepada masyarakat melalui kegiatan pembangunan yang bersifat nonproyek dalam jangkauan yang lebih luas sehingga diperoleh kesempatan yang sama dari seluruh wilayah agar terjadi proses percepatan perencanaan partisipatif.

Dalam penelitian melalui pendekatan studi kasus yang berusaha untuk mengkaji kinerja dari forum bilik sebagai manifestasi pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis partisipasi masyarakat ini terikat oleh ruang dan waktu, sehingga untuk pengembangan studi lanjutan direkomendasikan untuk:

- a. Dalam mengkaji kinerja forum bilik dalam hal ini efisiensi dengan pendekatan penelitian kualitatif mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan pengertian efisiensi tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas ekonomi yaitu rasio efektivitas dengan usaha/biaya. Untuk itu, direkomendasikan apabila mengkaji kinerja dari sisi efisiensi menggunakan pendekatan kuantitatif.
- b. Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji dibatasi pada kinerja forum bilik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, tanpa mengkaji tingkat partisipasi dari masyarakat. Untuk itu direkomendasikan melakukan penelitian untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kondisi realitas ekonomi, sosial dan budaya yang lebih luas dan beragam sehingga rekonstruksi analisis yang didapatkan dari pemahaman, sikap, perilaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan menjadi lebih kaya dan bernilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander . 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Alfarini, Putri. 2004. *Polisi akan selidiki pencemaran sungai yang terjadi di Kabupaten Bekasi*. Tempo News Room Download pada www.tempointeraktif.com tanggal 12 September 2007.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arstein, Sherry, 1969, *A ladder of Citizen Participation*, Journal of the American Institut of Planner. In “*City Reader*”: 3th Edition, 2003 By Richard T. Le Gates and Federic Stout (eds).
- Asdak, Chay. 2004. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- BPS Kabupaten Bekasi. 2006. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka*. Bekasi.
- Bappenas. 2001. *Konsep Strategi dan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D)*. Jakarta: Bappenas.
- BPLHD Jabar. 2004. *Beberapa Permasalahan Lingkungan Dan Rekomendasi Penanganan Wilayah Pesisir Pantai Jawa Barat*. Download www.bplhdjabar.go.id
- Bryant dan White. 1998. *Menajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT. Alumni.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada Unversity Press.
- Chouguill, MB. 1996. *A Ladder of Community Participation for Underdevelopment Countries*. HABITAT INTL. Vol. 20 No. 3 pp. 431 – 444.
- Daldjoeni, Nathanael. 1997. *Geografi Desa Kota*. Bandung: Alumni
- Darminto, F. 2003. *Discourse on Public Participation in Planning*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 14. No. 1: 1 – 15.
- Deepa, Narayan. 1998. *Participatory Evaluation Tools for Managing Change in Water and Sanitation*. USA: World Bank.
- Dinas PDLP Kabupaten Bekasi. 2006. *Laporan Kegiatan Tahun 2006*. Bekasi: Dinas PDLP Kabupaten Bekasi.
- Dirdjojuwono, Roestanto W. 2004. *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah*

Perencanaan dan Aplikasinya. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.

- Djogo, T. Dkk. 2003. *Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office.
- Drucker, Peter, F. 1978. *Manajemen: Tugas dan Tanggung Jawab Praktek*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Dunn, William. N. 1998. *Policy Analysis: An Introduction*. Edisi terjemahan Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, dkk. 1997. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga..
- Hadi, Sudharto, P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sudharto P. 2007. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. Makalah disampaikan pada Sosialisasi tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah.
- Hardiansah, E. C. 2005. *Perencanaan dan Politik*. Download pada <http://catuy.blogspot.com/20050801archive> tanggal 12 September 2007.
- Haroeopetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. 1992. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. download tanggal 15 Maret 2007 pada www.pacific.net.id/dedes/Peran%20serta.htm
- Haryanto, R. 2006, *Proses Perencanaan*, Handout mata kuliah proses perencanaan MTPWK Undip, tidak diterbitkan.
- Hijrin, T. Yusfadh. 2007. *Kajian Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Pasca Bencana di Kecamatan Singkil*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro Semarang.
- Insaf, Moh.. 2004. *Tesis: Fenomena Urbanisasi Kawasan Pinggiran Kota Jakarta (Studi Kasus: Desa Bojonggede. Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor)*. Tesis tidak diterbitkan. MTPWK UNDIP. Semarang.
- Kartasamita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemertaan*. Jakarta: CIDES.
- Keban, Yeremias T.. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Kinerja Organisasi Publik. Kebijakan Dan Penerapannya. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Kemitraan Air Indonesia. 2002. *Pencemaran 10 Sungai di Bekasi Mengkhawatirkan*. Download www.inawater.com tanggal 12 September 2007
- Lenvine, H. Charles dkk. 1972. *Effective Management Social Psychological Approach*.

- Mikkhelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya – Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Praktisi Lapangan*. Terjemahan Matheos Nelle. Jakarta: Penerbit Obor.
- Miles, Matthew B. dan A. Micha Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lex J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukherjee, N. Et. Al. 2000. *Methodology for Participatory Assesment with Communities, Institutions and Policy Makers*. New York: WSP – EAP IRC
- Nasir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. 1987. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nieras, RM et. al. 2002. *Making Participatory in Local Governace Happen*. United Kingdom: Institut of Development Studies, University of SussexBrighton,
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Alumni.
- Pemerintah Kabupaten Bekasi. 2004. *State of Environment Report (SoER) 2003*. DPDLP. Bekasi.
- Pemerintah Kabupaten Bekasi. 2005. *State of Environment Report (SoER) 2004*. DPDLP. Bekasi.
- Pemerintah Kabupaten Bekasi. 2006. *Siatem Informasi Lingkungan*. DPDLP. Bekasi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pegelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
- Rico, Handiman. 2007. *Merealisasikan Hak Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang*. Divisi Riset JKPP–Bogor: download 20 Juni 2007 pada www.bakosurtanal.go.id
- Salim, Emil. 2007. *Corporate Social Responsibility (CSR) Harus Tingkatkan Kualitas Manusia dan Lingkungan*. Download pada tanggal 29 November 2007 di <http://kompas.com/ver1/Ekonomi/0703/16/174652.htm>
- Sanoff, Henry. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Toronto: John Wiley & Sons Inc.
- Sastropetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni
- Schubeler, Peter. 1996. *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. Washington DC: The World Bank.
- Siagian, Sondang P. 1998. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Surakarta:

Sebelas Maret University Press.

- Soegiarto, et.al. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia.
- Soegijoko, BT.et.al. 2005 (eds). *Bunga Rampai Pembangunan Kota di Indonesia Dalam Abad 21: Buku 2 Pengalaman Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Soemarwoto, Otto. 1999. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Mitfah. 1998. *Perilaku Organisasi. Konsep dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali.
- Tjahjati, Budhy, S. dan BS. Kusbiantoro. 1997. *Bungai Rampai Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- UNICEF. 1999. *A Water Handbook*, New York. UNICEF. Download pada <http://www.unicef.org/html> tanggal 29 November 2007.
- Uphoff, Norman. 1986. *Local Institution Development*. Kumarian Press. Cornell University.
- Wahyuningsih, D. 2005. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Salaman Mloyo Kabupaten Semarang*. Tugas Akhir tidak diterbitkan. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro Semarang.
- Yeung, Y.M and T.G. Mc Gee. 1986 (eds). *Community Participation in Delivering Urban Services in Asia*. Ottawa: IDRC.
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudohusodo, Sarwono. 1991. *Perumahan Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL.

LAMPIRAN I :
TABEL REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

No.	Responden	Hasil Wawancara	Kodefikasi	Substansi yang dapat diambil
1.	Masyarakat di sekitar Sungai Sadang dan Cikedokan	<p>1. Bp. H. Abdul Jalil, penduduk asli Desa Mekarwangi pekerjaannya petani, sawah subur, air Kali Sadang dan Cikedokan bisa buat mengairi sawah. Sekarang sawah-sawah tadi sudah banyak yang dijual dijadikan pabrik.... ...kondisi air kali sadang di udik ma bagus masih bening, sedang mulai desa talajang kesini sampe lewat kawasan sudah kotor kadang bau.... ...forum bilik dibentuk tahun 2003... ...tidak ada inisiatif dari masyarakat, masyarakat tahunya menerima undangan dari pemerintah. Waktu yang hadir banyak dari tiap-tiap desa di Cikarang Barat (Kecamatan, pen) ada wakilnya. Wakil kebanyakan dari desa dan pengusaha. ...organisasi Forum bilik udah dibentuk, ada ketua, bendahara, sekretaris tetapi lupa nama-namanya. Tujuan pembentukan forum bilik tujuannya untuk pengelolaan lingkungan. ...kami tahunya hanya hadir memenuhi undangan pemerintah... Kegiatananya forum bilik sepertianya berhenti, hampir setahun, waktu itu pernah membersihkan kali sadang, penyuluhan dan rapat-rapat silaturahmi di perusahaan bergantian. Keterlibatan sebagai anggota, seharusnya ada kelanjutannya... kesulitan ada pada anggaran untuk melakukan kegiatanforum bilik bisa efektif jika organisasi bisa berjalan, kegiatan juga berjalan dan ada informasi baik dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah. ...forum bilik kurang efisien, sebetulnya tujuannya bagus tapi belum efisien. dari anggota tidak ada penalaran informasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahuinya....</p> <p>2. Bp. Suhardi Citro Waryono sebagai berikut :menurut saya forum bilik sangat bagus tetapi pada proses pembentukannya pemerintah sekan memaksakan kehendak, seharusnya sebelum mengundang masyarakat ada informasi terlebih dulu ke desa sehingga kita bisa mempersiapkan atau paling tidak kita punya gambaran. Eh.. tahu-tahu ada undangan rapat dan hasilnya kita menjadi anggota forum bilik. kita gak tahu perencanaannya, yaitu itu tadi tahu-tahu ada undangan.... ...kegiatan forum bilik Sadang Hilir seingat saya belum ada tindak lanjutnya sejak rapat pembentukan pengurus di PT. Coca-Cola, atau mungkin saya gak diundang.... ...forum bilik saat ini belum efektif, forum bilik akan efektif dan efisien apabila semua stakeholder berperan sesuai porsinya. Satu lagi peran pemerintah sangat dibutuhkan, jangan semata-mata karena proyek saja....</p>	<p>§os.1.1/1 -3] [L.1.1/1 -5]</p> <p>KFB.SU.1.1/ 11-12]</p> <p>FB.1.1/12 -15]</p> <p>EFB.1.1/15 - 17]</p> <p>FB.1.2/1 -6] KFB.SI.1.2/5 -10]</p>	<p>➤ Identifikasi kondisi fisik lingkungan (khususnya sungai sadang dan cikedokan) yang meliputi pengelolaan, potensi dan permasalahan</p> <p>➤ Identifikasi perilaku, persepsi dan pengetahuan partisipasi serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan sungai</p> <p>➤ Identifikasi</p>

		<p>3. Bp. Mardalih, lulusan SLTP berumur 35 tahun, pekerjaan sekretaris Desa Sukadanau: ...<i>banyak ormas, LSM dan Masyarakat sekarang hanya peduli kepada limbah padat/sampah dari industri yang masih bisa dijual lagi (misalnya kertas, kayu, scrap besi dll). ...kondisi kali cikedokan, sebagai kali alam sangat kotor tidak terkontrol/tidak terawat. Apalagi kali cikedokan merupakan kali saluran pembuang limbah, jadi masyarakat kurang peduli. Pemanfaatan kali cikedokan sudah tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selama ini jarang ada upaya dari masyarakat untuk memelihara kali cikedokan. Sepengetahuan masyarakat pengelolaan kali tanggungjawab pemerintah, ...masyarakat tidak ada partisipasi. Sebetulnya ada keinginan masyarakat agar konsisi air kali cikedokan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. ...keberadaan forum bilik ada, tetapi forum bilik yang ada berupa gandasuka (gandasari-sukadanau) sebuah kerja sama antar desa. Untuk forum bilik dibidang lingkungan belum ada/belum terbentuk...</i></p> <p>4. Bp. Misan warga Desa Telagaasih sebagai berikut : ...<i>sebelum akhir tahun 80-an daerah Cibitung menjadi salah satu lumbung padi, baru sekitar tahun 90-an banyak muncul kawasan industri dan perumahan... ...misalnya air kali sedang sekarang jadi tercemar, sudah tidak dapat dimanfaatkan, air sudah item kalo jam 4 pagi warnanya kadang bisa merah, biru, dan berganti-ganti warna, masyarakat sudah sering mengeluh, sudah sering komplain ke pemerintah tapi sampai sekarang enggak ada tindakan. Pengelolaan sungai menjadi tanggungjwb pemerintah... ...masyarakat boro-boro melakukan pemberian kali kadang mereka sendiri buang sampah di kali, coba bapak lihat disebalah sana... banyak sampah kan? Partisipasi masyarakat kurang, mungkin karena tidak ada penggeraknya.masyarakat sudah tahu kalau kali sedang sebagai kali pembuang limbah jadi masyarakat kurang peduli. ...Forum Bilik belum pernah dengar tetapi seharusnya ada.tugasnya bisa bersih-bersih kali, seperti ulu-ulu waktu jaman dulu, sehingga bisa bantu petani...</i></p> <p>5. Bp. M Data warga Desa Mekarwangi, pekerjaan petani menyatakan : ...<i>pekerjaan saya petani, bertani sekarang ribet, kagak ada untungnya, lahan sempit iipun tanah udah milik pabrik, belum lagi tenaga kerja mahal. Mau jadi kuli pabrik, kagak punya keahlian, sekolah timbang lulusan SMPpartisipasi masyarakat desa mekarwangi paling hanya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal sendiri. Pembersihan sungai oleh masyarakat jarang, kalau ada perintah dari desa baru masyarakat kerja bakti bersih-bersih sungai, malah kadang ada yang buang sampah di kali... ..kebersihan sungai tanggung-jawab pemerintah dan industri kan industri bayar pajak ke pemerintah... ..masalah Forum Bilik sebagian masyarakat tidak tahu, mungkin hanya aparat desa saja yang tahu. Masyarakat setuju adanya Forum Bilik, biar kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan kepada pemerintah atau bisa kompalin langsung kepada industri.</i></p>	<p>PLS.1.3/1 -6]</p> <p>KFB,CK.1.3/9-11]</p> <p>§os.1.4/1 -3]</p> <p>PLS.1.4/6 -12]</p> <p>§os.1.5/1 -4]</p> <p>EFB.1.5/8 -11]</p>	<p>keberadaan forum bilik yang meliputi proses pembentukan tugas, kelengkapan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan penyelesaian nya.</p> <p>➤ Identifikasi peran pemerintah dalam mendukung forum bilik.</p> <p>➤ Kinerja forum bilik dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai dan faktor-faktor yang mempengaruhi</p>
--	--	---	--	---

		<p>6. Bp. Sabar sebagai berikut : ...dalam pengelolaan sungai, menurut saya masyarakat harus dilibatkan, termasuk menjadi anggota forum bilik. Partisipasi masyarakat disekitar sini menurut saya tidak buang sampah ke sungai juga udah bagus... ...pengelolaan sungai menjadi tanggungjawab bersama yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat... ...kebanyakan masyarakat belum mengetahui organisasi Forum Bilik...</p> <p>7. Ujat, aparat Desa Cikedokan menyatakan : ...dulu kali cikedokan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama untuk pengairan sawah, airnya bening bisa untuk mandi dan mencuci. Kondisi saat ini air kali cikedokan dimanfaatkan untuk sawah dan kolam ikan, masyarakat tidak berani mandi di kali lagi, air terasa gatal mungkin sudah tercemar... .. seperti masyarakat jarang melakukan pembersihan sungai... .. partisipasi masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar... .. pengelolaan sungai menjadi tanggungjawab bersama yaitu pemerintah, masyarakat dan industri... .. masyarakat belum tahu tentang Forum Bilik...</p> <p>8. H. Sakum, warga Desa Jatiwangi menyatakan : ...banyaknya kawasan industri didaerah sini membuat sawah-sawah banyak yang terkena gusuran. Hasil dari jual tanah saya dijadikan modal untuk bikin kontrakan...</p> <p>9. Bp. Oman, seorang ketua RT di Desa Jatiwangi sebagai berikut : ... disini kalo ngadain rapat RT harus malam minggu, masyarakat susah untuk berkumpul masing-masing sibuk dengan kerjanya, kebanyakan pekerja di pabrik kena shift, ada yang masuk malam, siang dan pagi...</p> <p>10. M. Kosim, aparat Desa Gandasari menyatakan : ... masyarakat jarang yang tahu Forum Bilik, kan kebanyakan anggotanya aparat desa, pengurus BPD, ada juga tokoh masyarakat tapi informasinya tidak sampai ke masyarakat. Kegiatan Forum Bilik selama ini mengikuti program pemerintah, misalnya prokasilah, penghijauan bantaran Sungai Sadang di dekat Indofarma. Pernah juga penyuluhan dari Bandung di gedung Sucofindo. Sekarang seperti jarang ada kegiatan lagi, mungkin tidak dianggarkan oleh pemerintah lagi. ...jika ada pencemaran sungai masyarakat otomatis melaporkan ke desa bahkan kalo ketahuan sumbernya masyarakat langsung mendatangi ke pabrik... .. harus ada pembekalan pengetahuan tentang limbah kepada masyarakat.</p>	<p>PS.1.6/1 -3] PLS.1.6/1 -5]</p> <p>FL.1.7/1 -4]</p> <p>PLS.1.7/4 -7]</p> <p>Sos.1.8/1 -3]</p> <p>Sos.1.9/1 -3]</p> <p>KFB.SU.1.10 /1-9]</p>	hinya.
2.	Pengusaha/ Industri disekitar Sungai Sadang dan	<p>1. Bapak Fachrudin, pengelola IPAL KI. MM2100 menyatakan : ...kondisi air cikedokan secara kasad mata sangat mengkhawatirkan, misalnya di belakang PT. Coca-Cola, hal ini karena masih ada sebagian perusahaan yang belum sempurna mengolah air limbahnya sebelum dibuang ke sungai... .. pengelolaan sungai itu sendiri menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat, tetapi lebih ditekankan pada pemerintah dan industri... .. bagi</p>	<p>FL.2.1/1 -4]</p> <p>PLS.2.1/4 -12]</p>	<p>➤ Identifikasi kondisi fisik lingkungan (khususnya sungai)</p>

Cikédokan	<p>pengelola kawasan industri MM2100 sangat berkomitmen untuk mengelola air limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan khususnya sungai... ..dalam pengelolaan sungai perlu melibatkan masyarakat, seperti dalam Forum Bilik. Forum Bilik merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke badan penerima (sungai), dalam Forum Bilik tersebut terjadi diskusi-diskusi masalah pengelolaan lingkungan sehingga diharapkan jika ada kesulitan dalam penolakan air limbah dapat diatasi... ..partisipasi perusahaan yaitu dengan mentaati dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ada... ..menurut saya jika program forum bilik berhasil maka sangat efisien dalam membantu tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena ada kontrol dari masyarakat...</p> <p>2. Indra Kusnanda, pengelola KI MM2100 menyampaikan pendapatnya: ...Forum Bilik awalnya merupakan forum komunikasi antar perusahaan/industri yang tentunya beranggotakan masyarakat industri. Pada tahun 2003 oleh pemerintah daerah dibentuk lagi (restrukturisasi, pen) berdasarkan lokasi industri dengan SubDAS serta keanggotannya tidak saja masyarakat industri tetapi juga masyarakat umum disekitar industri... ..pengelolaan sungai merupakan tanggungjawab bersama. Dengan terbentuknya forum bilik diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan pencemaran akibat limbah industri... ..untuk itu keterkaitannya harus sinergi, harus punya kemauan yang sama, disinilah industri berpartisipasi misalnya kalangan industri harus menganggarkan dana untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan... ..partisipasi dalam program forum bilik Cikédokan yaitu restrukturisasi dan melakukan konsolidasi internal perusahaan/organisasi maupun dengan organisasi-organisasi forum bilik, mengupayakan perbaikan ipal bagi industri yang air limbahnya belum dapat memenuhi baku mutu lingkungan sedangkan bagi industri yang air limbahnya sudah bagus dapat melakukan inovasi-inovasi misalnya dengan 3R, reuse, reduce dan recycle... ..untuk kegiatan forum bilik persiapannya jangka pendek, meneliti kualitas limbah cair dari masing-masing anggota misalnya ada beberapa anggota forum bilik cikédokan yang perlu bantu secara teknis misalnya pancamega, multikimia dan swasti... ..permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi forum bilik : person in charge dari masing-masing anggota tidak punya kewenangan untuk memutuskan (decision maker) sehingga kesulitan dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan forum bilik yang sifatnya mengeluarkan dana... ..hambatan lainnya bahwa kewenangan bilik terbatas baik dari sisi teknis maupun area/wilayah kerja sedangkan di hulu dan hilir kondisi airnya tidak bisa dikendalikan... ..adanya keterlibatan masyarakat dalam forum bilik diharapkan meningkatkan kinerja forum bilik, tetapi masyarakat diluar industri belum mempunyai pengetahuan sebagai inspektor/supervisi... ..yang diperlukan forum bilik yaitu sarana prasarana, kualitas sdm dan perangkat/alat monitoring...</p>	<p>EFB.2.1/12 - 14]</p> <p>FB.2.2/1 -5]</p> <p>PS.2.2/6 -10]</p> <p>PS.2.2/12 -14]</p> <p>KFB.2.2/14 - 25]</p>	<p>sadang dan cikédokan) yang meliputi pengelolaan, potensi dan permasalahan sebagai dampak dari keberadaan industri.</p> <p>➤ Identifikasi persepsi dan partisipasi perusahaan/i ndustri dalam pengelolaan sungai terutama dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai.</p> <p>➤ Identifikasi keberadaan forum bilik yang meliputi proses perencanaan, pembentukan tugas, , kelembagaan, kegiatan-</p>
-----------	---	--	---

		<p>3. Bapak Yayan Yanuarsa memberikan informasi :pembentukan forum bilik merupakan inisiatif pemerintah. Forum Bilik dibentuk sebagai wadah komunikasi antara aparatatur pemerintah, pengusaha dan masyarakat.... ..tujuan menciptakan pembinaan lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan.seingat saya forum bilik inisiatif dari pemerintah, tentang perencanaan forum bilik saya tidak tahu. Seperti nya industri tidak dilibatkan dalam proses perencanaan... waktu itu kita hanya menerima undangan apresiasi pengelolaan lingkungan, hasilnya dibentuk forum bilik... ..perusahaan sangat mendukung adanya Forum Bilik yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu memenuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sungai merupakan tanggungjawab bersama, akan tetapi industri sebagai yang menghasilkan limbah harus lebih berinisiatif mengelola limbah yang dihasilkan agar memenuhi BML.kegiatan forum bilik berhenti (tidak ada kegiatan). Forum Bilik belum efektif, disamping kegiatannya vakum juga belum ada titik temu antara pemerintah, industri dan masyarakat....</p> <p>4. Bapak Made Arimbawa, Qality Control Manager PT. Sinar Sosro Cibitung mengemukakan: ...Forum Bilik bisa sebagai media komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. PT. Sinar Sosro menjadi anggota Forum Bilik Sub DAS Sadang Hilir... ..setahu saya ide awal pembentukan forum bilik dari pemda. Waktu itu saya ditugaskan mewakili perusahaan untuk menghadiri undangan dari pemda, ternyata rapat tersebut dalam rangka membentuk forum bina lingkungan... ..lingkungan merupakan anugerah Tuhan, sehingga wajib dikelola dengan baik. Pengelolaan sungai menjadi tanggungjawab bersama antar pemerintah, pengusaha dan masyarakat. ...Forum Bilik bisa sebagai media komunikasi antara pemerintah,pengusaha dan masyarakat. PT. Sinar Sosro menjadi anggota Forum Bilik Sub DAS Sadang Hilir... ..partisipasi yang dilakukan perusahaan yaitu mengelola limbah yang dihasilkan agar memenuhi baku mutu lingkungan (BML). Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi dan inovasi IPAL. ...kegiatan forum bilik sadang hilir tidak ada, tidak aktif. ...ada pertemuan di PT. Coca-Cola, yaitu pembentukan pengurus... ..terakhir saya dengar kabar kalo ketuanya yaitu Pak Agus sudah pindah kerja (sebelumnya pengelola KI Gobel Darma Nusantara, pen), semenjak itu tidak ada kegiatan lagi.saya tidak bisa menilai kinerja forum bilik efektif dan efisiennya, karena forum bilik Sadang Hilir tidak ada kegiatan (vakum)... ..masalah penyebabnya saya rasa masing-masing pengurus maupun anggota sibuk dengan tugas kesehariannya artinya bahwa harus ada kebijakan perusahaan yang mendukung forum bilik, misalnya dengan penunjukan karyawan yang khusus menangani lingkungan dan forum bilik.</p>	<p>FB.2.3/1 -3] FB.2.3/1 -7]</p> <p>PLS.2.3/7 -12]</p> <p>FB.2.4/1 -5]</p> <p>PLS.2.4/5 -10]</p> <p>KFB.2.4/10 -18]</p> <p>EFB.2.4/14 -15]</p>	<p>kegiatan yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan penyelesaian nya.</p> <p>➤ Identifikasi peran pemerintah dalam mendukung forum bilik.</p> <p>➤ Kinerja forum bilik dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai dan faktor-faktor yang mempengaru hinya.</p>
--	--	---	--	---

		<p>5. Ibu Sri Nugraheni sebagai berikut : ...<i>Forum Bilik dibentuk atas inisiatif pemerintah tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan industri dalam pengelolaan lingkungan hidup. ...Forum bilik, proses awalnya saya tidak tahu pasti, yang jelas dari pemerintah. Kami hanya terlibat pada saat musyawarah pembentukan organisasi dan pemilihan pengurus, yaitu forum bilik Sadang Hulu, Sadang Hilir dan Cikedokan. PT. LPA (maksudnya Lucky Print Abadi, pen) termasuk dalam forum bilik Cikedokan... ..perusahaan sangat mendukung adanya Forum Bilik yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu memenuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sungai merupakan tanggungjawab bersama, akan tetapi industri sebagai yang menghasilkan limbah harus lebih berinisiatif mengelola limbah yang dihasilkan agar memenuhi BML. ...kegiatan Forum Bilik Cikedokan pernah berjalan baik, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan antara lain pembersihan saluran pembuangan limbah (beberapa pabrik lokasinya jauh dari aliran sungai cikedokan), mengeruk lumpur-lumpurinya. Bahkan pernah ada rencana untuk membuat tanggul saluran pembuangan limbah pada masing-masing perusahaan anggota forum bilik, tetapi rencana ini belum sempat berjalan, forum bilik sudah vakum. Hal ini mungkin karena para anggota belum sepakat tentang pembiayaan/anggarannya untuk kegiatan forum bilik yang dibebankan kepada pihak perusahaan ...saat ini kegiatan forum bilik berhenti (tidak ada kegiatan). Forum Bilik belum efektif, disamping kegiatannya vakum juga belum ada titik temu antara pemerintah, industri dan masyarakat.</i></p>	<p>[FB.2.5/1 -2] [FB.2.5/1 -6]</p> <p>KFB.CK.2.5/ 11-18]</p>
		<p>6. Ibu Rosiatiningsih, PT. Taiyo Sinar Teknik : ... <i>Forum Bilik dibentuk oleh pemerintah tujuannya agar masyarakat dan industri terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup... ..prinsipnya perusahaan sangat mendukung adanya Forum Bilik yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, kebetulan PT. Taiyo Sinar tidak menghasilkan limbah cair... partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu memenuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya menyusun UKL-UPL dan melaporkannya ke penda... pengelolaan sungai merupakan tanggungjawab bersama, pemerintah, industri dan masyarakat....</i></p>	<p>[FB.2.6/1 -2] [PLS.2.6/3 -8]</p>
		<p>7. Menurut Zaenur Manurung, anggota dari PT. Indofarma Tbk. : ...<i>kegiatan Forum Bilik paska restrukturisasi yaitu melakukan kordinasi antar anggota dan membentuk sekretariat sementara... Pertemuan dilakukan tiap bulan biasanya pada hari Jumat pada minggu terakhir, tempat pelaksanaan bergantian. Kita juga mengundang masyarakat sekitar agar mereka juga ikut terlibat aktif, barang kali ada saran-saran dari mereka ataupun keluhan-keluhan mereka... Dalam pertemuan dilakukan sharing tentang kendala/kesulitan yang dihadapi dalam pengolahan air limbah oleh anggota, sebagai tindakan preventif yang diharapkan akan mengurangi tingkat</i></p>	<p>[FB.2.7/1 -12]</p>

		<p>pencemaran sungai oleh limbah industri... ..kegiatan lain ikut mendukung Program Kali Bersih (Prokasih) bersama masyarakat dan pemerintah... ..tapi belakangan ini, hampir setahun kegiatan Forum Bilik vakum, penyebabnya antara lain penunjukan anggota cenderung ke perorangan, akan lebih baik jika lembaganya... .. Jika perorangan sering mis komunikasi jika terjadi pergantian karyawan... ..akan lebih bagus lagi jika peran pemerintah lebih ditingkatkan.</p>		
		<p>8. Iwan Sulistyantoro, CCBI : ...forum bilik, wah saya baru dengar, maklum saya baru di plant cibitung, tidak ada informasi dari personel sebelumnya... ..akan tetapi PT. CCBI sangat konsern terhadap pengelolaan lingkungan hidup, hal ini salah satu diwujudkan dalam corporate social responsibility (CSR) dengan membentuk Program “Cinta Air” yang telah diluncurkan secara resmi pada bulan Maret tahun 2006. Cinta Air adalah program kemitraan antara Perusahaan Coca-Cola di Indonesia dan USAID (Indonesia) dalam pemberdayaan komunitas dalam bidang pengelolaan air yang berkesinambungan untuk kehidupan yang lebih baik, target program yang telah dilaksanakan adalah komunitas di Dusun Wangkal, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Program ini memiliki empat tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman komunitas mengenai aktivitas-aktivitas konservasi air, termasuk penanaman pohon serta melindungi sumber daya air; kedua, memperbaiki tingkat kesehatan komunitas melalui kampanye kesehatan dan kebersihan terkait dengan air dan praktek sanitasi yang baik dan benar; ketiga, memberdayakan komunitas dalam upaya perbaikan kualitas air dengan memperkenalkan metode dan pendekatan yang sederhana untuk memperbaiki, melindungi dan memonitor kualitas air; dan yang keempat, meningkatkan kapasitas komunitas untuk memahami dan berkomitmen dalam usaha jangka panjang untuk memastikan ketersediaan air bersih... ..menurut saya forum bilik bisa padukan dengan CSR dari perusahaan... ..kegiatan forum bilik mungkin pernah aktif, tetapi sekarang tidak pernah ada pemberitahuan atau undangan atau informasi baik dari anggota yang lain maupun dari pendakalau saya ditanya apakah kinerja forum bilik efektif dan efisien? Saya belum bisa menilai, tidak ada informasi tentang kegiatan forum bilik.seandainya kegiatannya berjalan saya pikir bisa efisien dan efektif, dengan catatan forum bilik didukung oleh semua stakeholder termasuk pemerintah.</p>	<p>KFB.SI.2.8/1 -2] PS.2.8/2 -17]</p>	
		<p>9. Bpk Mulyono, Indofarma : ...kebijakan perusahaan di PT Idofarma, masalah pengelolaan lingkungan hidup struktur organisasinya berada dibawah General Affair (GA) sedangkan corporate social responsibility sudah berdiri sendiri. ...CSR yang dilakukan perusahaan secara tidak langsung telah membantu tugas pemerintah di bidang sosial. ...CSR sudah merupakan corporate strategy, jika masyarakat tidak berkembang, perusahaan juga akan sulit berkembang... .. Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit, yang diharapkan dari kegiatan ini adalah benefit berupa citra perusahaan... Kegiatan forum bilik</p>	<p>KFB.SI.2.8/ 1 9-25] FEB.2.8/21 - 25] PS.2.9/1 -7]</p>	

		berhenti (tidak ada kegiatan).		
		<p>10. Bpk. Abdul Rojak, penanggungjawab UKL/UPL PT. Chuhatstu Indonesia: ...<i>Forum Bilik belum efektif, disamping kegiatannya vakum juga belum ada titik temu antara pemerintah, industri dan masyarakat... menurut saya kegiatan Forum Bilik sangat bagus bisa terjadi komunikasi antara pemerintah, industri dan masyarakat. Walaupun kadang dari perusahaan sering keberatan karena PT. Chuhatstu tidak menghasilkan limbah cair dan lokasi perusahaan jauh dari Sungai Sadang. Tentang kegiatan Forum Bilik, sepertinya sekarang berhenti. Waktu itu sempat aktif, kegiatannya tukar menukar informasi dalam pengelolaan lingkungan, pembersihan kali, pernah juga mengadakan penghijauan bantaran kali. Saya sendiri kurang aktif, kadang sangat sibuk dengan pekerjaan, itu yang menjadi salah satu kendala.</i></p>	<p>EFB.2.10/1 - 3]</p> <p>KFB.SI.2.10/ 3-10]</p>	
3.	Pemerintah Daerah/ Institusi	<p>1. Ibu Tri Tjahjani S, Kasi Pemulihan Lingkungan DPDL : ...<i>pada tahun 1996, dibentuk Forum Bina Lingkungan (Forum Bilik) yaitu sebuah forum komunikasi yang beranggotakan para perusahaan/industri (SK Bupati Bekasi No. 660.1/SK-859/LH/1996, tanggal 3 Mei 1996), forum ini dibentuk menurut lokasi perusahaan dengan pendekatan Sub DAS. Ide awalnya dari pemerintah, kalo tidak salah pencetusnya Pak Supandi (saat itu masih Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi).... tahun 2003 oleh Pak Mastar Forum Bilik tersebut di restrukturisasi (disesuaikan dengan wilayah administrasi karena ada pemisahan wilayah antara kabupaten dan kota)... untuk mendukung forum bilik, Dinas PDLP melakukan program-program yang dapat dipadukan dengan kegiatan forum bilik, misalnya PROKASIH tahun 2004 dengan sasaran Sungai Cikedokan, sedangkan prokasi tahun 2005 dengan sasaran Sungai Sadang... dalam pelaksanaan prokasi selain kegiatan fisik juga diadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat tentang pencemaran lingkungan.... tahun 2006 pemerintah menganggarkan pembangunan laboratorium lingkungan... kami juga berharap forum bilik bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut...</i></p> <p>2. Drs Lukman Heri, Kasi Pemeriksaan Kualitas Lingkungan DPDLingkungun: ...<i>Forum Bilik muncul sebagai salah satu cara pengawasan pencemaran lingkungan. Dengan berkembangnya industri maka potensi untuk mencemari lingkungan akan semakin besar, sedangkan sumber daya manusia (SDM) pemerintah sebagai pengawas terbatas untuk itu pemerintah berinisiatif membentuk Forum Bilik yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sehingga ada kewenangan dari Forum Bilik untuk melaporkan jika ada terjadi pencemaran. ...dalam hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator... keterlibatan (peran) masyarakat kurang respon, pengetahuan masyarakat tentang forum bilik terbatas misal dari pengetahuan pengelolaan lingkungan. Selain itu diharapkan ada juga inisiatif dari masyarakat untuk membuat sebuah</i></p>	<p>FB.3.1/1 -8]</p> <p>PR.3.1/8 -14]</p> <p>FB.3.2/1 -6]</p> <p>FB.3.2/7 -9]</p>	<p>➤ Identifikasi kondisi fisik lingkungan (khususnya sungai sadang dan cikedokan) yang meliputi pengelolaan, potensi dan permasalahan sebagai dampak dari keberadaan industri</p> <p>➤ Identifikasi keberadaan forum bilik yang meliputi latar belakang, proses perencanaan,</p>

		<p>usulan/rencana anggaran mengenai pengelolaan lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan punya respon jika hasil dari usulan tersebut dirasakan oleh masyarakat karena pengelolaan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, industri dan masyarakat. Ada kelemahan dari pemerintah yaitu pemerintah tidak membekali masyarakat dengan pengetahuan, Forum bilik juga harus diberikan sarana dan prasarana, selain itu kelembagaan forum bilik masih belum jelas, sebaiknya ada kelembagaan yang jelas yaitu dibawah Dinas PDLP (Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan, pen) sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. ...bahkan seharusnya industri dan masyarakat lebih berpartisipasi misalnya dana kegiatan Forum bilik berasal dari industri (forum bilik yang mandiri)... Kondidi forum bilik saat ini vakum, hal ini menyebabkan forum bilik belum efektif. Langkah-langkah yang ditempuh inventarisasi forum bilik yang sudah dibentuk, tentukan skala prioritasnya. Upaya lainnya akan dibuatkan payung hukum yang kuat sebagai kepanjangan tangan dinas lingkungan hidup... ...forum bilik harus diberikan sarana dan prasarana... ...untuk saat ini forum bilik tidak efisien, karena forum bilik tersebut belum bisa mandiri. Selama ini kegiatan forum bilik dianggarkan oleh pemerintah yaitu dengan melibatkan forum bilik dalam kegiatan-kegiatan seperti prokasis, penghijauan bantaran sungai maupun penyuluhan-penyuluhan baik oleh Pemkab maupun pemprop...</p> <p>3. Bpk H. Mastar Effendi, pencetus form bilik : ... latar belakang dibentuknya Forum Bilik yaitu dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama pencemaran sungai. Ide awal pembentukan Forum Bilik dari pemerintah dengan harapan proses pengawasan bisa tumbuh dari bawah/masyarakat (bottom up), harapannya setelah itu masyarakat bisa mandiri. Ide ini dilatar belakangi karena keterbatasan aparat pemerintah, misalnya keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan jam kerja dll. Selain itu juga untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.... mungkin anda pernah mendengar atau membaca berita-berita di media masa tentang tercemarnya beberapa sungai di Bekasi. Salah satu penyebabnya karena lemahnya pengawasan terhadap industri sebagai akibat keterbatasan SDM yang dimiliki, misalnya keterbatasan waktu kerja. Perusahaan-perusahaan yang 'nakal' sering membuang limbah pada malam hari, apalagi sehabis hujan. Maka dari itu saya punya ide untuk membentuk sebuah forum yang beranggotakan masyarakat dan pengusaha, ide tersebut saya usulkan ke dinas... ...menyangkut tahapan dari perencanaan, prinsipnya mengikuti mekanisme perencanaan program dan penganggaran yang diselenggarakan dengan Visi Misi dan Renstra Kabupaten Bekasi. ...pada tahun 2003 penda menganggarkan untuk kegiatan restrukturisasi forum bilik...respon pihak perusahaan dan masyarakat cukup bagus, bahkan kegiatan telah jalan beberapa tahun cuma akhir-akhir ini kegiatan forum bilik tidak berjalan... ...jika forum bilik berjalan dengan baik, forum bilik sangat efektif... ...faktor-faktor yang</p>	<p>pembentukan , tugas, kelembagaan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kendala- yang dihadapi dan penyelesaian nya.</p> <p>➤ Identifikasi program-program pemerintah dalam mendukung forum bilik.</p> <p>➤ Kinerja forum bilik dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai dan faktor-faktor yang mempengaru hinya.</p>	<p>PR.3.2/15 -19]</p> <p>FB.3.2/17 -19]</p> <p>EFB.3.2/23 -26]</p> <p>FB.3.3/1 -11]</p> <p>FB.3.3/12 -16]</p> <p>EFB.3.3/16 -23]</p>
--	--	--	---	--

		<p>mempengaruhi misalnya kelembagaan, kemauan masyarakat dan perusahaan, pembinaan tidak berjalan, konsistensi pemerintah terhadap forum bilik kurang terbukti forum bilik tidak jalan, sering mutasi pejabat sehingga kadang terjadi misinformasi... ..selain itu ada hambatan dalam pengusulan anggaran, biasanya jika kegiatan yang kurang berdampak secara fisik kadang mengalami hambatan... ..forum bilik sangat efisien (bila kegiatannya berjalan), jika masyarakat telah berdaya/berpartisipasi maka pemerintah tidak harus mengeluarkan anggaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan... ..masyarakat sebetulnya punya kepedulian terhadap pencemaran lingkungan... ..sebelum ada forum bilik masyarakat bingung kepada siapa mereka akan mengadakan/menyampaikan pencemaran lingkungan...</p>	
		<p>4. Bpk. H. Sutantio, Kabid Fisik SDA dan Lingkungan Bapeda Kab. Bekasi : ...ada sungai sebagai sumber air baku air minum, saluran pembuang limbah dan saluran irigasi. Sungai yang diperuntukkan sebagai sumber air baku air minum adalah Sungai Cikarang, sedangkan Sungai Sadang dan Cikedokan termasuk dalam Sungai sebagai saluran pembuang limbah... ..idealnya pembentukan Forum Bilik idenya (inisiatifnya) dari masyarakat sehingga mereka punya rasa memiliki sedangkan pembinaannya dari pemerintah. ...tentang mekanisme perencanaan di Bapeda mengacu ke Kepmendagri, diawali aspirasi dari bawah (musbangdes, musbang kecamatan, musrenbang Kabupaten) ...berdasarkan skala prioritas maka muncul sebuah kegiatan. ..atau bisa dikatakan bahwa sukses atau tidaknya sebuah kegiatan ada didinas teknis, dalam hal Forum Bilik sebetulnya fokus perencanaanya ada pada Dinas PDLP. ...faktor kegagalan Forum Bilik misalnya : 1) Faktor masyarakat, sebagian besar pendatang (punya rasa masa bodoh), kaitannya dengan budaya masyarakat yang sebagian besar pekerja pada sektor industri, pada siang hari mereka bekerja sehingga ada kesulitan untuk berpartisipasi. 2) Pemerintah sebagai pembina, kurang sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat dan industri kurang intensif. 3) Faktor dari pengusaha/kebijakan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup...</p>	<p>FL.3.4/1 -4]</p> <p>FB.3.4/4 -10]</p> <p>PR.3.4/10 -16]</p>
		<p>5. Ibu Cucu, Kasubid SDA dan Lingkungan Bapeda Kab Bekasi: ...mekanisme perencanaan, usulan dari masyarakat lewat musrenbang mengacu kependagri. ...dimungkinkan usulan dari desa/masyarakat dalam program pembangunan... ..masyarakat cenderung mengusulkan program yang bersifat fisik (infrastruktur) misal jaling, drainase lingkungan, MCK umum... ..bidang lingkungan masih belum menjadi prioritas masyarakat... ..masalah partisipasi masyarakat, penda sudah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, tetapi dari masyarakat masih kurang... ..ada kecenderungan anggapan dari masyarakat bahwa pembangunan sudah ada APBD, masyarakat mau terima jadi saja... ..masyarakat maunya hanya terima honor aja, tetapi gak mau ikut bekerja... ..Bapeda perlu mengadakan studi tentang persepsi masyarakat</p>	<p>FB.3.5/1 -14]</p>

		<p><i>dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bapada juga akan merancang sebuah sistem agar masyarakat bisa berpartisipasi... ..dalam hal usulan pembangunan ada sebagian instansi yang kurang mengakomodir partisipasi, sebagai contoh untuk program animas, hal ini disebabkan karena ada kecenderungan bahwa masyarakat yang berpartisipasi ditumpangi LSM yang punya maksud-maksud "tertentu" ...</i></p> <p>6. Ibu Elisabeth, Kasubag Perencanaan DPDLP Kab. Bekasi :...proses perencanaan di dinas LH, pengajuan kebutuhan dari masing-masing seksi sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dengan mengacu ke visi, misi dan renstra pembangunan serta KUA Kabupaten Bekasi... ..pada tahap usulan masing-masing seksi mengajukan usulan program hasil dari musrenbang. Musrenbang diakomodir dipadukan dengan tupoksi SKPD, musrenbang menjadi alternatif pertama kemudian usulan dari bidang sesuai tupoksi... ..forum bilik setahu saya diusulkan oleh bidang wasdal, bukan usulan masyarakat (hasil musrenbang)...</p>	<p>FB.3.6/1 -7]</p>	
--	--	--	---------------------	--

LAMPIRAN II

KODEFIKASI DAN BAGAN SNOWBALL SAMPLING

A. KODEFIKASI:

- Sumber Data/Informan:
 - 1 = Masyarakat
 - 2 = Industri
 - 3 = Pemerintah Daerah
- Materi Informasi/Substansi:
 - FL = Informasi berkaitan dengan kondisi fisik dan lingkungan sungai lokasi studi
 - Sos = Informasi berkaitan dengan kondisisosial masyarakat lokasi studi
 - FB = Informasi berkaitan dengan forum bilik
 - PLS = Informasi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sungai
 - PS = Partisipasi *stakeholder*
 - PR = Peran *stakeholder*
 - KFB = Kegiatan forum bilik
 - EFB = Kinerja forum bilik
- Lokasi Forum Bilik
 - SU = Forum bilik pada Sub DAS Sadang Hulu
 - SI = Forum bilik pada Sub DAS Sadang Hilir
 - CK = Forum bilik pada Sub DAS Cikedokan

CONTOH:

FL.3.4/1-4

Artinya: informasi berkaitan dengan kondisi fisik dan lingkungan sungai, disampaikan oleh sumber data (informan ke-4) yang berasal dari pemerintah daerah dimana informasi tersebut terletak pada baris ke-1 s.d. baris ke-4 dalam tabel rekapitulasi hasil wawancara.

B. BAGAN SNOWBALL SAMPLING

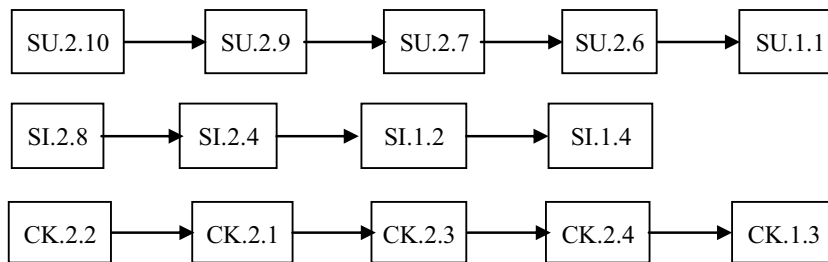
1. Sumber data dari Pemerintah Daerah



Keterangan :

- 3.1. Drs. Lukman Hery (Ka. Seksi Pemeriksaan Kualitas Lingkungan DPDLP Kab Bekasi.
- 3.2. Ir. Tri Tjahjani S. (Ka. Seksi Pemulihan Lingkungan DPDLP Kab. Bekasi)
- 3.3. Drs. H. Mastar Effendi (Mantan Ka. Seksi Pemeriksaan Kualitas Lingkungan DPDLP Kab. Bekasi)
- 3.4. Ir. H. Sutantio (Ka. Bidang Fisik, SDA dan Lingkungan Bapeda Kab. Bekasi)
- 3.5. Ir. Cucu S. (Ka. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Bapeda Kab. Bekasi)
- 3.6. Dra. Elisabeth C., M.Si (Ka. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPDLP Kab. Bekasi)

2. Sumber data dari Perusahaan/Industri dan Masyarakat Anggota Forum Bilik



Keterangan :

- SU.2 : Sumber data dari Industri anggota Forum Bilik Sadang Hulu
SI.2 : Sumber data dari Industri anggota Forum Bilik Sadang Hilir
CK.2 : Sumber data dari Industri anggota Forum Bilik Cikedokan
SU.1 : Sumber data dari Masyarakat anggota Forum Bilik Sadang Hulu
SI.1 : Sumber data dari Masyarakat anggota Forum Bilik Sadang Hilir
CK.1 : Sumber data dari Masyarakat anggota Forum Bilik Cikedokan

LAMPIRAN III
FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN



Wawancara dengan sumber data dan diskusi kecil

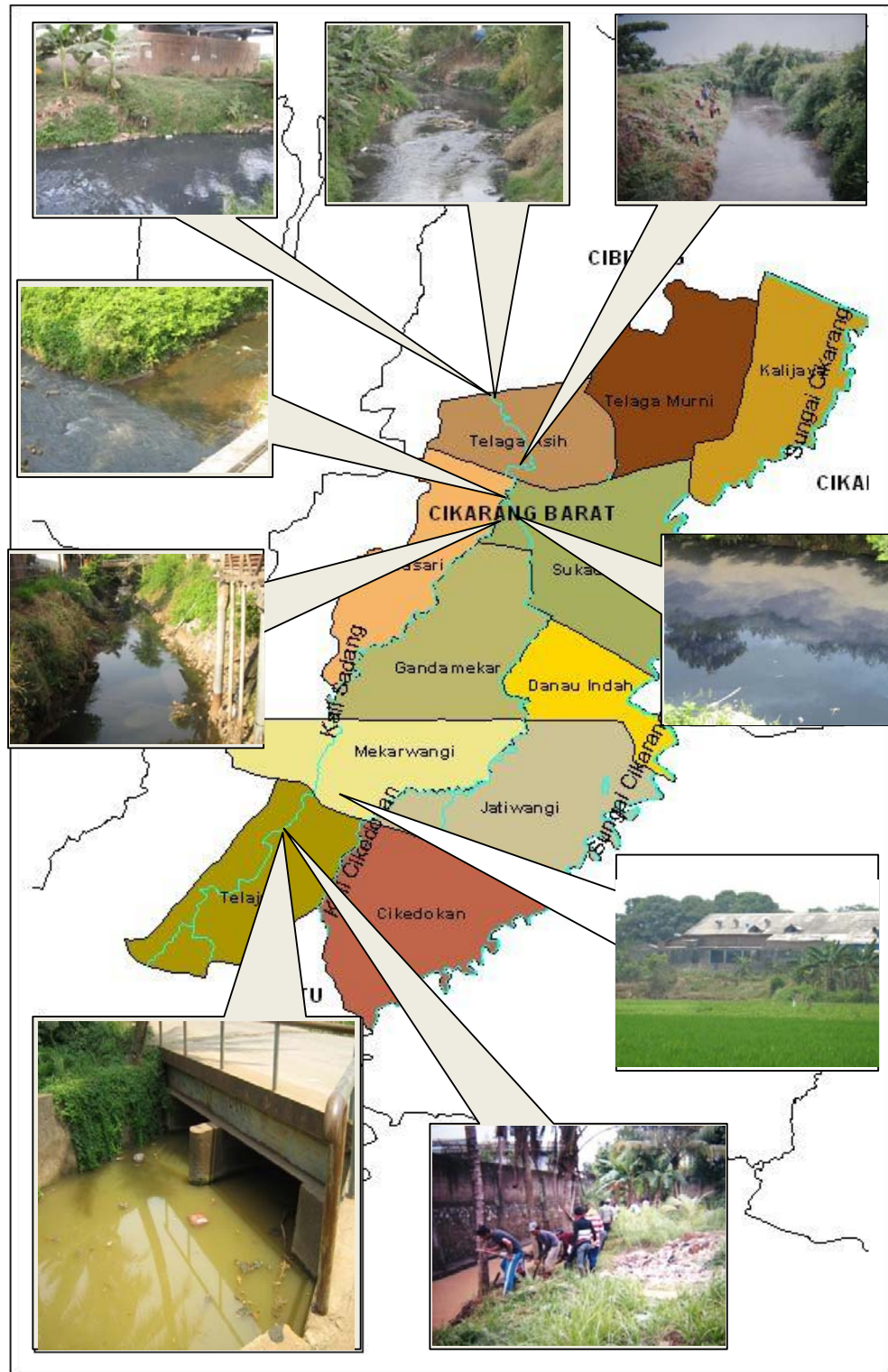


Saluran pembuangan limbah cair dari *Out let* IPAL Perusahaan ke sungai



Keterlibatan masyarakat dalam PROKASIH untuk mendukung forum bilik

Hasil observasi kondisi air Sungai Sadang dan Cikedokan



Riwayat Hidup Penulis



Penulis, bernama lengkap Eko Suparyadi, biasa dipanggil Eko yang saat ini berdomisili di Bekasi, tepatnya di Perumahan Jatimulya Regensi Blok D5 no. 19, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Sebagai sulung dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Soemadi (alm) dan Buntoro di kota kecil Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 14 Desember 1974. Masa kanak-kanak hingga dewasa dihabiskan di kota yang terkenal sebagai kota pensiun tersebut.

Pendidikan dasar ditempuh di SDN Grantung I Kec. Bayan Kab. Purworejo lulus tahun 1988, kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Purworejo lulus tahun 1991, serta sekolah lanjutan tingkat atas di SMAN 1 Purworejo pada Jurusan Fisika (A1) lulus tahun 1994. Pada Tahun 1994 diterima pada Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang yang diselesaikan pada September 1999.

Pengalaman merantau *Penulis*, dari ujung barat hingga ujung timur Jabotabek, mulai dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang di Bekasi. Karir di perusahaan swasta dimulai Maret 2000 yaitu bekerja sebagai *Jr. Production Engeneer* pada PT. Satya Raya Keramindo Indah di Balaraja Tangerang. Kemudian pada September 2000 diterima sebagai *Quality Assurance (QA)* pada PT. Nippon Indosari Corporation di Cikarang Bekasi.

Pada Desember 2002 *Penulis* memulai karir sebagai CPNS yang ditempatkan sebagai staf teknik Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi, pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan yang kemudian pada awal 2007 dirotasi ke Bidang Analisa Dampak Lingkungan. Sejak Agustus 2006 mendapat kesempatan tugas belajar di MTPWK UNDIP melalui Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas.

Pada Agustus 2003, *Penulis* menikah dengan Dara Cantik dari *bumi parahyangan*, Lia Yuliana, S.Si yang mengikuti jejak tugas belajar di MTPWK UNDIP yang seakan tidak mau ditinggal suami tercinta.